

**FORUM DISKUSI DENPASAR 12**

# **MENGGALI ANUGERAH KEBERAGAMAN**

**Penggagas:**

**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.**

Wakil Ketua MPR RI



FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

MENGGALI ANUGERAH KEBERAGAMAN

**Penggagas:**

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.  
Wakil Ketua MPR RI

**Penulis:**

Ade Fitriana  
Gantyo Koespradono  
Kleden Suban

**Penerbit:**

MEDIA  
INDONESIA  
PUBLISHING

# MENGGALI ANUGERAH KEBERAGAMAN

**Pengagas:**

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

**Penulis:**

Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Ade Fitriana (Koordinator)

**Cover:**

Briyanbodo Hendro

**Editor Bahasa:**

Adang Iskandar

**Desain Grafis:**

C Saputro

**Diterbitkan oleh:**

Media Indonesia Publishing

Cetakan I, Februari 2025

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Sekapur Sirih

---

---

**B**UKU ini ialah Buku XVII dari rangkaian panjang Forum Diskusi Denpasar 12 yang diselenggarakan setiap hari Rabu mulai pukul 14.00 WIB. Inilah diskusi kepublikan yang digagas Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. S.S., M.M., diselenggarakan secara virtual dari rumah dinas Jalan Denpasar Raya No.12, Jakarta. Rumah itu ialah rumah dinasnya rakyat, rumah tempat kita ‘membedah persoalan bangsa’.

Bab I berisi topik Menggali Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia. Dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah), di sini berbicara Hasanuddin Ali (Founder & CEO Alvara Research Center), Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Meike Malaon (Nenilai.id), dan penanggap Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI) serta Abdul Kohar (Anggota Dewan Redaksi Media Group).

Bab II berisi topik Pentingnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia. Dimoderatori Abdul Kohar (Jurnalis Senior *Media Indonesia*), di sini dipaparkan pendapat Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., M.Si. (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), Inayah Wulandari Wahid (Jaringan Gusdurian), dan penanggap Eva Yuliana, M.Si.

(Anggota Komisi III DPR RI).

Bab III berisi topik Peran Nilai dan Revolusi Mental Menuju Indonesia 2045. Dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah), di sini disajikan pandangan Alissa Wahid (Humanitarian), Prof. Fransisco Budi Hardiman (Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan), Prof. Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), dan penanggung Henny Supolo Sitepu (Yayasan Cahaya Guru), serta Ahmad Baedowi (Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa).

Bab IV berisi topik Sinergi Strategi Pemberdayaan Pemuda 2003. Dimoderatori Dr. Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR), diskusi berisi pemikiran Ratih Megasari Singkaru, M.Sc. (Anggota Komisi X DPR RI), Prof. Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. (Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), Billy Mambrasar, S.T., M.Sc., M.B.A. (Staf Khusus Presiden RI), Akbar Himawan Buchari (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/BPP Hipmi), Fransiska PW Hadiwidjana (Cofounder & CTO at WomenWorks), dan penanggung Amira Widya Damayanti (Gerakan UI Mengajar/GUIM angkatan ke-12) serta Sahat Martin Philip Sinurat (Rumah Milenial Indonesia).

Bab V berisi topik Peran Produksi Film dan Konten oleh Nega-

ra dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan Negara. Dimoderatori Fifi Aleyda Yahya (Jurnalis *Metro TV*), di sini dipaparkan pendapat Rima Agristina (Deputi Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Muhammad Farhan (Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Periode 2019-2024), Hanifah Makarim (Direktur Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Purwadi Sutanto (Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbud), Judith J. Dipodipuro (Direktur Utama Perum Produksi Film Nasional), Umar Hadi (Dubes RI untuk Korea Selatan), Akhlis Suryapati (Kepala Sinematek Indonesia), Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor Film), Ismail Nurdin (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Diennaryati Tjokrosuprihatono (mantan Duta Besar RI untuk Ekuador), FM Venusiana R (Direktur Consumer Service PT Telkom Indonesia), Agus Mulyadi (Direktur Programming & Production *Metro TV*), M. Gunawan (Asosiasi Game Indonesia), Ari Kartika (Lembaga Psikologi Terapan UI), dan M. Kisworo (Kepala Divisi Bisnis III Jaminan Kredit Indonesia).

Bab VI berisi topik Politik dalam Membangun Peradaban: Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan. Di bagian awal dipaparkan pemikiran Dr. Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia 1981-2003 dan 2018-2020), serta jawabannya atas pertanyaan yang diajukan Latifah AI Anshori (Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem), Eksan (DPW Partai NasDem Jawa Timur), Suyoto (Ketua Koordinator Bidang Kebijakan

Publik dan Isu Stategis DPP Partai NasDem), dan Julie Sutrisno (Ketua DPW Partai NasDem Bali dan Anggota DPR RI) di forum Rakernas Partai NasDem, di Jakarta). Dimoderatori Luthfi Assyaukanie, di bagian berikutnya disajikan pandangan Suryopratomo (Duta Besar RI untuk Singapura), Fachry Ali (Pengamat Politik), Muhammad Farhan (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Periode 2019-2024), Connie Rahakundini Bakrie (Pakar Pertahanan dan Keamanan).

Buku ini ditutup dengan dua tulisan Luthfi Assyaukanie mengenai dua diskusi yang dimoderatorinya, yakni tentang entropi budaya dan tantangan pemuda.

Semua pemikiran itu dirangkum oleh Gantyo Koespradono, Kleden Suban, dan Ade Fitriana.

Penentuan topik, pemilihan pembicara dan penanggap dilakukan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bersama sebuah tim yang dikoordinasikan Arief Adi Wibowio, S.Si, M.T. dan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Tim itu terdiri atas Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M, Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A., dan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A.

Teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual dikelola Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma

Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Tim tenaga ahli lainnya, yaitu Naila Fitri, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.I.P., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi narasumber dan penanggap.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah C. Saputro, dengan supervisi visual editor Briyanbodo Hendro.

Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar. Sentuhan yang perlu dan juga penting agar bahasa Indonesia yang baik dan benar terus terjaga. ■

## Menghargai Harapan-Harapan Positif

---

---

**K**ITA bersyukur sebagai bangsa yang memiliki keberagaman sangat besar. Kita pun bersyukur, sejak dulu kesadaran akan keberagaman itu telah ada, hadir di tengah kehidupan kita berbangsa, dan terus berkelanjutan ketika kita menjadi menjadi sebuah negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah, riwayat kita berbangsa dan bernegara menunjukkan keberagaman bukan pemecah, melainkan anugerah mempersatu.

Hemat saya, keberagaman menjadi dasar yang kuat bagi kita menggelorakan nasionalisme, tidak hanya ke dalam, tetapi juga ke luar, dalam tata pergaulan antarbangsa di tengah derasnya globalisme.

Kesadaran akan keberagaman sebagai anugerah itu perlu terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Bukankah tiap zaman membawa tantangan tersendiri yang membutuhkan jawaban tersendiri pula? Itulah sebabnya diskusi mengenai keberagaman sebagai anugerah haruslah tiada henti, tak mengenal lelah, kita selenggarakan.

Buku ini berisi rekaman berbagai pandangan yang berkembang di dalam diskusi-diskusi yang mencoba melihat keber-

gaman itu secara luas, di antaranya menghadirkan pemikiran mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Di sini ditampilkan potret diri kita yang sejujurnya, seperti kenyataan yang muram berupa entropi budaya yang cukup tinggi. Pun, dipaparkan harapan-harapan yang berbeda antara nilai pribadi yang dipegang dan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita hadapi dengan optimisme, antara lain dengan menghargai harapan-harapan positif yang juga hadir di dalam buku ini.

Saya berterima kasih kepada pembicara, penanggap, moderator, dan peserta diskusi yang setia tiap Rabu mengikuti Forum Diskusi Denpasar 12.

Jakarta, 19 Februari 2025



**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.**

Wakil Ketua MPR RI

## Nasionalisme di Level Warga

---

---

**K**IRANYA penting merenungkan kenapa NKRI masih tegak berdiri. Bukan hanya beragam budaya, negara ini juga pernah mengalami beragam ideologi partai politik terutama di masa awal republik merdeka. Negara ini pun pernah mengalami beberapa pemberontakan daerah yang antara lain disebabkan ketidakpuasan terhadap pusat.

Ancaman integratif terjadi, tetapi boleh dibilang tidak sampai mengkristal, membesar, meluas menjadi krisis integratif. Sekalipun negara kuat dan menang mengatasi ancaman disintegratif, kiranya jawabannya juga kekuatan di level warga, di tingkat rakyat, yang berkemampuan ditempa oleh tuntutan sejarah.

Pandangan itu kira-kira mau mengatakan, apa pun yang terjadi, negara tidak baik-baik saja, sejarah menunjukkan rakyat mampu melewati keadaan yang buruk-buruk. Apa modal kemampuan itu?

Saya pikir jawabnya cinta tanah air. Patriotisme bukan monopoli milik 'elite negara', atau 'elite nasional', tetapi juga bahkan terutama milik 'rakyat seumumnya'. Cinta tanah air, di mata rakyat, bukan gagasan besar, nasionalisme, seperti di benak elite. Cinta tanah air, di hati rakyat, perilaku sederhana. Yang bertetangga, berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal usul, guyub sebagai sesama anak bangsa.

Begitulah cara ikhlas bersyukur secara horizontal atas anugerah vertikal keberagaman manusia Indonesia.

Jakarta, 19 Februari 2025



**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

# DAFTAR ISI

<b>Sekapur Sirih</b>	<b>5</b>
<b>Menghargai Harapan-Harapan Positif</b>	<b>10</b>
<b>Nasionalisme di Level Warga</b>	<b>12</b>

## **MENGGALI NILAI KEMERDEKAAN, KEBERAGAMAN, DAN PERSATUAN INDONESIA**

**19**

1. Latar Belakang: Keberagaman, Berkah atau Masalah?
2. Keragaman bukan Pemecah, Melainkan Anugerah
3. Survei dan Paradoks Sosial
4. Demokrasi Indonesia Terus Mencari Pola
5. Membedah Perbedaan Antargenerasi
6. Proses Menuju Indonesia Bersatu Belum Sempurna
7. Peran Media Menghadirkan Inklusivisme

## **PENTINGNYA NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM KEBERAGAMAN INDONESIA**

**63**

1. Latar Belakang: Empat Pilar Penjaga Toleransi
2. Perbedaan Sebagai Anugerah
3. Mencegah Perpecahan
4. Merayakan Keberagaman
5. Ruang Perbedaan masih Sempit
6. Belajar dari Piagam Madinah



## **PERAN NILAI DAN REVOLUSI MENTAL MENUJU INDONESIA 2045**

**93**

1. Latar Belakang: Upaya Merevitalisasi Revolusi Mental
2. Sistem Pendidikan Harus Bertujuan Memanusiakan Manusia
3. Mencari Solusi agar Indonesia Bergerak Maju
4. Menyikapi Benturan dan Sinkronisasi Nilai dalam Masyarakat
5. Kembalikan Partai Politik sebagai Wakil Sejati Rakyat
6. Tantangan dan Harapan Revolusi Mental
7. Tanda-Tanda Kehancuran Negara



## **SINERGI STRATEGI PEMBERDAYAAN PEMUDA 2023**

**143**

1. Latar belakang: Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda
2. Tanggung Jawab Semua
3. Pembangunan Kepemudaan
4. Pemberdayaan Pemuda
5. Wirausaha Muda
6. Perempuan Posisi Kunci
7. Baper
8. Bukan Figuran Politik
9. Kolaborasi Antargenerasi Muda
10. Integritas



## **KERJA SAMA FORUM DISKUSI DENPASAR 12 DENGAN MPR DAN PRODUKSI FILM NEGARA (PFN)**

**197**

1. Latar belakang: Pendekatan Berbeda
2. Meningkatkan Rasa Kebangsaan
3. Media Penguatan Konsensus
4. Belajar dari Korean Wave
5. Mengembalikan Fungsi PFN
6. Menunggu Kehadiran Negara

# **VI** **POLITIK DALAM MEMBANGUN PERADABAN: HUBUNGAN ASEAN DAN TANTANGAN KE DEPAN** **231**

1. Latar Belakang: Menjaga Akar Kebangsaan di Tengah Perubahan Zaman
2. Pemimpin Harus Berani Amputasi Penyakit Bangsa
3. Tanya Jawab Bersama Mahathir
4. Kawasan Strategis yang Menjadi Daya Tawar Dunia
5. Kepemimpinan Mahathir dan Pengaruhnya terhadap Budaya Asia Tenggara
6. Rekatkan Kembali Rajutan Kebangsaan yang Sempat Terpecah
7. Dicari, Pemimpin yang Cerminkan Keberanian dan Kebenaran

**Catatan Moderator** **279**

**Biodata Tim Ahli** **291**







# Menggali Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia



# 1 Latar Belakang: Keberagaman, Berkah atau Masalah?

---

---

**K**EMAJEMUKAN merupakan kenyataan di Indonesia. Ia terjalin dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa ini.

Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Jawa menjadi kelompok suku terbesar dengan jumlah 85,2 juta atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku ini terletak di Pulau Jawa bagian tengah hingga timur. Suku bangsa terbesar kedua ialah Sunda, yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menjadi yang terbesar ketiga dengan jumlah 8,5 juta jiwa atau 3,6%. Mere-

ka berasal dari Pulau Sumatra bagian tengah utara. Adapun yang terbesar keempat merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi dan yang kelima ialah suku Madura. Kemudian masih ada Kalimantan dan Papua yang juga memiliki suku-suku sendiri. Kemajemukan Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya suku bangsa, tapi juga dari beragamnya agama yang dianut bangsa ini.

Kenyataan di atas dipahami para pendiri bangsa dengan memformulasikan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang mempersatukan. Nilai-nilai dan spiritualitas yang sama dalam setiap kelompok masyarakat dapat disatukan melalui konsensus. Satu dalam keragaman mengatasi perbedaan *ideofact*, *sociofact*, dan *artefact* dengan satu ideologi, filosofi, norma, dan warisan nilai Pancasila.

Semboyan Republik Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, bermakna beragam budaya, suku bangsa, ras, etnis, dan bahasa daerah, tetapi tetap menjadi satu kesatuan.

Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadikan pengingat bahwa penggalian nilai-nilai kebangsaan menjadi proses yang harus terus-menerus dilakukan. Tantangan kebangsaan untuk menjaga keberagaman menjadi penting untuk memastikan cita-cita kemerdekaan terwujud.

Dihadapkan pada tantangan itulah, pada Rabu, 2 Maret 2022, Forum Diskusi Denpasar 12 menilai penting untuk mendiskusikan tantangan bangsa ini, dengan tema Menggali Nilai Kemerdekaan,



M/BRYANBODO HENDRO

Pimpinan umat Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Tanampulu, Banawa Selatan, Donggala, Sulawesi Tengah, bersilaturahmi di halaman Pura Agung Giriwangun, Tanampulu, Selasa (27/07/2021).

Keberagaman, dan Persatuan Indonesia. Salah satu topik yang didiskusikan di Forum Diskusi Denpasar 12 beberapa waktu lalu tentang entropi budaya di Indonesia.

Moderator Luthfi Assyaukanie, saat membuka diskusi, mengingatkan bahwa entropi budaya bisa diartikan sebagai energi yang kurang produktif dan berkembang secara negatif dalam masyarakat. Jika entropinya tinggi, dampaknya bisa buruk bagi sebuah masyarakat, seperti menurunnya produktivitas dan munculnya masalah lain. Biasanya, penilaian entropi diterapkan di pe-

rusahaan-perusahaan besar. Sebuah perusahaan dengan entropi tinggi sering kali memiliki karyawan yang kurang produktif. Sebaliknya, perusahaan dengan entropi rendah biasanya lebih produktif, menghasilkan pendapatan yang besar dan baik.

Penilaian entropi ini, menurut Luthfi, juga bisa diterapkan untuk menilai sebuah negara. Jadi, apakah negara itu produktif atau tidak bisa dilihat dari tingkat entropinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki entropi budaya yang tinggi, lebih dari 40%. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia kurang produktif jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, karena tingginya entropi ini bisa memicu gesekan dan masalah yang tidak produktif di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat, kata Luthfi, ini memang terlihat jelas, terutama dalam hal persatuan dan polarisasi masyarakat. Ia memberikan contoh perdebatan tentang aturan penggunaan pengeras suara di tempat-tempat ibadah yang coba diterapkan oleh Kementerian Agama. Banyak orang yang berdebat, bahkan ada yang memberikan kecaman berlebih atas kebijakan tersebut. Padahal, kebijakan ini sebenarnya baik dan sudah diterapkan di banyak negara muslim, seperti di Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Ini bukan pelarangan, melainkan pengaturan volume suara.

Namun, ketika Menteri Agama mencoba menerapkan aturan itu, muncul reaksi yang sangat besar. Seperti biasa, masyarakat kita terbagi antara yang mendukung dan yang menentang. Ten-

tu saja ketidaksetujuan adalah hal yang wajar dalam masyarakat yang majemuk dengan banyak pandangan berbeda. Akan tetapi, sikap yang terlalu berlebihan sering kali membuat kita prihatin. Hal itu justru membelah masyarakat dan reaksinya kadang tak masuk akal.

Fenomena seperti itu menunjukkan tingginya entropi budaya Indonesia. Masyarakat mudah marah. Potensi gesekan pun sangat besar. Luthfi mengatakan hal tersebut perlu mendapat perhatian, terutama dalam konteks visi Indonesia 2045. Untuk mencapai visi itu, bangsa ini perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Jika masalah-masalah seperti itu tidak ditangani dengan baik, bisa menghambat kemajuan bangsa ini. ■



Dalam realitas  
keberagaman ini,  
kesadaran akan kesatuan  
bangsa menjadi  
keniscayaan.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Keragaman bukan Pemecah, Melainkan Anugerah

---

---

**W**AKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya kesadaran akan keberagaman Indonesia yang sangat besar. Dalam pengantar diskusi, Lestari mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda.

“Meskipun begitu beragam, sejak dulu kesadaran akan keberagaman ini sudah ada. Itulah sebabnya kita mengenal semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang hingga kini terus kita pegang,” ujar Lestari yang akrab dipanggil Rerie itu.

Kesadaran akan keberagaman ini, menurut Rerie, adalah dasar yang menggelorakan semangat nasionalisme. Itu terlihat



MI/BRYANBODO HENDRO

Lestari Moerdijat ketika memberi pengantar dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 2 Maret 2022, dengan topik Menggali Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia.

dari semangat para pemuda Indonesia dengan menggaungkan Sumpah Pemuda dan berjuang bersama meraih kemerdekaan.

Lebih lanjut, ia menegaskan, dalam realitas keberagaman ini, kesadaran akan kesatuan bangsa menjadi keniscayaan. “Kesadaran tersebut harus menjadi landasan untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, bahwa keragaman itu bukanlah pemecah, melainkan anugerah yang memperkaya kita.”

Rerie mengingatkan bahwa mengenali diri sebagai bagian

dari Indonesia saja tidak cukup. Yang dibutuhkan ialah transformasi berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menurutnya, sangat penting untuk memperkokoh persatuan Indonesia.

“Keaslian Indonesia terletak pada sikap gotong royong, dialog, musyawarah mufakat, toleransi, persatuan, dan keadilan yang beradab. Pola pikir ini harus menembus setiap lapisan masyarakat dan menjadi perekat dari setiap perbedaan,” ujarnya.

Rerie juga mengingatkan bahwa menggali dan merefleksikan nilai-nilai tersebut mesti menjadi proses yang tak berhenti. “Yang paling dibutuhkan ialah tindakan nyata, karena hal itulah yang akan menguatkan keberagaman dan persatuan,” tegasnya.

Seorang insan yang merdeka dan berbudaya, tandas Rerie, senantiasa menempatkan derajat dan martabat kemanusiaan sebagai yang utama. ■



Keberagaman ini  
menjadi ciri khas  
yang harus kita jaga  
dan rawat.”

**Meike Malaon**

Nenilai.id

# 3 Survei dan Paradoks Sosial

---

---

**S**ENADA dengan Lestari Moerdijat, Meike Malaon dari Ne-nilai.id berpendapat bahwa keberagaman adalah identitas dan anugerah bagi Indonesia. Menurut dia, dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku, dan 718 bahasa, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. “Keberagaman ini menjadi ciri khas yang harus kita jaga dan rawat,” tegasnya.

Memberikan contoh, ia mengatakan Belanda dikenal dengan terompah kayunya, Italia dengan pastanya, dan Korea dengan *kimchi* dan *hanbok*. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Meike menjawab, Indonesia memiliki begitu banyak hal yang khas, seperti masakan dan bahasa yang beragam. Keberagaman itu menjadi identitas sebagai bangsa.

Dia menjelaskan, Nenilai.id, yang dimulai pada pertengahan 2020, bertujuan memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan dewasa dengan memahami nilai-nilai penting yang ingin diperjuangkan. Nenilai.id pun melakukan survei pada Juli hingga Desember 2020 dengan melibatkan lebih dari 50.000 responden yang mayoritas berusia di bawah 30 tahun. Survei semacam itu, menurut Meike, akan terus dilakukan secara berkala. Adapun survei selanjutnya digelar pada 2023.

Survei bertujuan menggali pandangan masyarakat Indonesia mengenai tiga pertanyaan utama: 1) nilai pribadi apa yang mereka pegang, 2) nilai yang mereka rasakan saat ini dalam masyarakat, 3) nilai yang mereka harapkan di masa depan. Responden memilih 10 nilai terpenting dari 70 pilihan yang disediakan, seperti tanggung jawab, kemanusiaan, dan stabilitas ekonomi.

Hasil survei menunjukkan bahwa banyak responden memilih 'bertanggung jawab' sebagai nilai paling penting. Itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai masalah, bukan hanya mengandalkan pemerintah atau orang lain. Selain itu, tambah Meike, nilai-nilai lain yang dipilih ialah hidup sederhana, keadilan, disiplin, ikhlas, humor, dan kejujuran.

Hasil survei menggambarkan harapan dan keyakinan masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai kehidupan, juga menunjukkan bahwa banyak yang berada di level kesadaran tinggi, yang peduli terhadap kontribusi bagi masyarakat dan kemanusiaan.



Meike Malaon (kanan) bersama moderator Luthfi Assyaukanie dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 2 Maret 2022, dengan topik Menggali Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran tentang harapan masyarakat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, dengan peran aktif setiap individu dalam mewujudkan nilai-nilai yang diyakini. Hanya ada dua kriteria untuk menjadi responden survei *Nenilai.id*, yaitu warga negara Indonesia dan berusia minimal 15 tahun.

Dari 50.000 lebih responden, yang berusia 15-20 tahun sebanyak 30.388 orang dan 21-30 tahun ada 8.000 orang lebih. “Jadi kalau kita jumlahkan, hampir 39.000 orang dari 50.000 sekian ini adalah para pemuda usia 30 tahun ke bawah,” ungkapnya.

Meike menambahkan, kalau bicara perjalanan jangka panjang

sampai 2045, mestinya paling tidak ada gambaran awal tentang apa yang mereka percayai, apa yang mereka dambakan seputar nilai-nilai kehidupan. Pasalnya, menurut dia, pada 2045 golongan usia tersebut adalah tulang punggung kehidupan bangsa ini sehari-hari.

Ia menjelaskan, hasil survei juga menunjukkan banyak orang Indonesia memikirkan kepentingan bersama (*common interest*), bukan hanya kepentingan pribadi. Meskipun, sambung Meike, dalam pandangan Richard Barret, masyarakat yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan juga memikirkan kepentingan bersama secara seimbang.

Hasil survei ini mengungkapkan bahwa sebagian besar responden berharap agar keadilan sosial menjadi prioritas utama. Keadilan dan hak asasi manusia menjadi nilai-nilai yang sangat dihargai oleh banyak orang Indonesia. Mereka juga menginginkan masyarakat yang lebih demokratis, bergotong royong, jujur, bertanggung jawab, serta mampu berpikir jangka panjang (lihat grafis).

Secara keseluruhan, survei ini mengungkapkan gambaran harapan dan tantangan masyarakat Indonesia. Banyak yang menginginkan kondisi masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun tantangannya ialah sistem birokrasi dan interpretasi agama yang kaku.

Meike menyampaikan, lebih dari 16.000 responden memilih keberagaman dan kebinekaan sebagai nilai yang mereka rasakan

## Model dasar Survei Nenilai: Tujuh Jenjang Pendewasaan



Slide presentasi yang dipaparkan Meike Malaon mengenai Nilai-Nilai Kebangsaan, Dialog Nasional yang Membangun, dan Kenapa Kita Perlu Cerita Tentang Indonesia saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 2 Maret 2022, dengan topik Mengkaji Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia.

dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi juga mendapat tempat di hati masyarakat. Namun, di balik hal-hal positif tersebut, muncul berbagai keluhan terkait isu sosial. Keluhan terbesar yang dirasakan masyarakat ialah diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dominasi kaum elite, dan pola pikir jangka pendek yang masih banyak ditemui di berbagai lapisan. Salah satu hal paling rendah dalam harapan masyarakat ialah penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Melalui analisis algoritma dari Richard Barret ditemukan bahwa Indonesia saat ini memiliki tingkat ketegangan sosial (entropi budaya) yang cukup tinggi, mencapai 42%. Angka itu jauh di atas angka ideal yang seharusnya di bawah 15% untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Entropi budaya yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam menciptakan harmoni sosial.

Meike juga menyoroti adanya ketidakselarasan antara nilai-nilai pribadi yang dipegang masyarakat dan realitas yang dihadapi di luar. Misalnya, meskipun seseorang memegang prinsip disiplin, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Hal itu mengindikasikan adanya jarak antara nilai yang diyakini individu dan kenyataan yang ditemui di masyarakat.

Menariknya, meskipun dianggap sebagai nilai penting bagi masyarakat Indonesia, keberagaman dan kebinekaan tidak menjadi harapan utama semua kalangan. Bagi golongan usia 50 tahun ke atas, keberagaman adalah nilai yang mereka pegang dan

harapkan terus ada di masa depan. Namun, pada kelompok usia di bawah 50 tahun, keberagaman tidak menjadi daftar utama harapan mereka. Keberagaman yang dihargai oleh orangtua, tegas Meike, justru bersamaan dengan keluhan mengenai diskriminasi SARA dan dominasi elite. Fenomena itu menciptakan paradoks sosial yang perlu diperhatikan. Masyarakat Indonesia yang multikultural dan pluralistik masih menghadapi tantangan besar dalam meraih kesetaraan dan keadilan sosial.

Hasil survei ini juga menggambarkan pentingnya dialog lebih lanjut di masyarakat untuk mencari solusi agar nilai keberagaman, demokrasi, dan hak asasi manusia dapat diterima dan diterapkan secara lebih merata di semua lapisan usia dan golongan. ■



**Demokrasi  
di Indonesia hingga  
saat ini masih terus  
mencari pola yang tepat  
untuk diterapkan.”**

**Sunanto**

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

# 4 Demokrasi Indonesia Terus Mencari Pola

---

---

**K**ETUA Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menyampaikan pandangan mengenai perkembangan demokrasi dan keberagaman di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia hingga saat ini masih terus mencari pola yang tepat untuk diterapkan. Salah satu indikasi bahwa demokrasi Indonesia belum menemukan titik ideal ialah seringnya revisi terhadap undang-undang pemilu, yang tercatat telah dilakukan sebanyak 18 kali.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses belajar dan belum menemukan pola yang pas. Sunanto juga mengungkapkan pandangan mengenai persepsi terhadap demokrasi Barat. Ia mengatakan sering kali

demokrasi Barat dianggap sebagai kebenaran mutlak, sedangkan budaya dan perilaku kita justru dianggap salah.

Ia berharap persepsi itu bisa diubah dengan memahami bahwa apa yang berlaku di Barat belum tentu benar, dan nilai-nilai budaya Indonesia pun tidak selalu salah. Menurutnya, demokrasi Indonesia perlu menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi Barat dengan nilai-nilai budaya lokal sehingga bisa diterima dan diterapkan dengan baik.

Sunanto juga menyoroti demokrasi di Indonesia saat ini seringkali hanya dipraktikkan oleh segelintir orang, terutama di kalangan partai politik. Hal itu menyebabkan pesta demokrasi seringkali dipandang sebagai ajang untuk bersenang-senang sesaat, tanpa mempertimbangkan siapa sosok pemimpin yang ideal untuk membangun bangsa.

Selain itu, Sunanto juga mengkritisi soal keberagaman di Indonesia. Ia menyebut seharusnya proses keberagaman sudah dianggap selesai sejak Indonesia sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Perjuangan para tokoh bangsa, termasuk tokoh Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menurutnya luar biasa dalam menentukan ideologi negara. Mereka bersedia mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama. Sunanto pun mengingatkan betapa pentingnya kenegawanan para pendiri negara. Ia berharap bangsa ini bisa meneladani kelegawaan dan kebersamaan para *founding fathers* agar persatuan dan keberagaman bangsa ini tetap terjaga, meski infor-



Sunanto saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 2 Maret 2022, dengan topik Menggali Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia.

masi yang berkembang saat ini sangat cepat dan bisa mengancam nilai-nilai tersebut.

Sunanto menyatakan keberagaman di Indonesia sering kali dipolitisasi, terutama dalam proses pemilihan umum. Setiap pemilihan sering kali menguras energi sehingga perjuangan yang telah tertata rapi dalam lima tahun sebelumnya harus dimulai dari awal lagi. Hal itu di satu sisi karena dukungan politik yang sangat kuat bagi kelompok tertentu, sementara di sisi lain nilai-nilai persaudaraan sering kali diabaikan.

Sunanto mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam pemanfaatan teknologi yang berlebihan. Meskipun teknologi

memiliki banyak manfaat, ia mengingatkan agar teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai kebangsaan dan persaudaraan yang selama ini menjadi pegangan. Menurutnya, itu menjadi tantangan besar bagi masa depan bangsa.

Sebagai bagian dari Muhammadiyah yang dikenal dengan konsep *Darul Ahdi wa Syahadah*, Sunanto menegaskan bahwa konsensus bernegara yang menjadi dasar keberagaman bangsa Indonesia sudah tercapai. Karena itu, sudah saatnya untuk berfokus pada upaya memajukan bangsa, dengan dasar nilai yang kokoh untuk membangun literasi dan pengetahuan yang baik. Ia pun mengkritik maraknya narasi negatif dan hoaks yang sering kali mengalahkan informasi yang benar dan bermanfaat.

Sunanto mengungkapkan tantangan terbesar dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 ialah peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi persaingan global. Ia menilai, setelah reformasi, banyak hal yang membingungkan mengenai peran tokoh agama dan tokoh politik di Indonesia. Keduanya kerap tercampur aduk. Kondisi itu menjadi cermin tantangan dalam menciptakan pemahaman yang jelas perihal peran masing-masing di masyarakat.

Ia juga menyoroti peran generasi muda sebagai penjaga keberagaman yang harus lebih inklusif dan tidak sektarian. Ruang untuk diskusi politik dan keberagaman, imbuh Sunanto, semakin sempit sehingga kian sedikit aktor yang bergerak untuk mendorong perubahan positif. Karena itu, Sunanto mengajak semua pihak untuk memanfaatkan ruang-ruang diskusi, seperti Forum

Diskusi Denpasar 12, sebagai wadah terbuka yang dapat mence-  
raahkan semua kalangan.

Sunanto mengingatkan bahwa semua pihak perlu diberi ru-  
ang untuk menyuarakan pendapat agar tidak ada kelompok yang  
merasa terpinggirkan atau dianggap ekstrem. Dengan begitu, ke-  
sadaran akan pentingnya keberagaman dapat semakin berkem-  
bang di masyarakat. ■



Keberagaman Indonesia  
bukan hanya terlihat  
dari sisi etnik  
atau agama,  
tetapi juga  
dari perbedaan  
generasi yang ada.”

**Hasanuddin Ali**  
CEO Alvara Research Center

# 5 Membedah Perbedaan Antargenerasi

---

---

**H**ASANUDDIN Ali, pendiri sekaligus CEO Alvara Research Center, membedah perbedaan antargenerasi di Indonesia, khususnya di era digital. Menurut dia, hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan fakta mengejutkan dan menyenangkan bagi bangsa ini. Saat ini, kata dia, mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh anak muda. Itu mencerminkan postur demografi yang terdiri atas tiga generasi yang sangat dominan. Ketiga generasi tersebut, yaitu generasi X, milenial, dan generasi Z, membentuk adanya gap atau jurang pemisah di antara mereka. Perbedaan tersebut sering menimbulkan perdebatan, terutama antara Gen X yang lahir pada 1965-1980 dan generasi yang lebih muda.

Hasanuddin menjelaskan gen X sering dianggap sebagai generasi yang paling bahagia karena mereka hidup di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Di sisi lain, generasi milenial yang mulai populer 35 tahun lalu menjadi generasi pertama yang akrab dengan internet. Adapun gen Z yang lahir pada 1997-2012 dikenal sebagai '*mobile generation*' karena mereka tidak bisa lepas dari gadget dan internet.

Berdasarkan studi yang dilakukan, terlihat bahwa digitalisasi dan internet berperan besar dalam mengubah cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku antargenerasi. Gen X, meskipun sebagai 'imigran digital', mulai terbiasa dengan penggunaan internet yang kini sudah menjangkau 63,3% dari mereka. Di sisi lain, di kalangan milenial sebagai generasi pertama pengguna internet, sebanyak 88,4% dari mereka terkoneksi dengan internet. Adapun gen Z, generasi dengan keterhubungan internet paling tinggi, mencapai 97% dan sering disebut sebagai pengguna internet 'kecanduan'.

Perbedaan generasi ini tidak hanya terlihat dalam penggunaan internet, tetapi juga dari beragam topik pembicaraan. Generasi muda seperti gen Z dan milenial lebih banyak membahas topik seputar musik, teknologi, olahraga, film, dan pendidikan. Generasi yang lebih tua, seperti gen X dan *baby boomers*, cenderung lebih fokus pada politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya.

Hasanuddin juga menyoroti perbedaan platform media sosial yang digunakan oleh setiap generasi. Gen Z dan milenial lebih

menyukai platform seperti TikTok dan Instagram karena lebih sesuai dengan minat mereka terhadap video, musik, dan fotografi.

Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia bukan hanya terlihat dari sisi etnik atau agama, tetapi juga dari perbedaan generasi yang ada.

### **Generasi Muslim Baru**

Hasanuddin menjelaskan bahwa media sosial seperti *Twitter* menjadi tempat utama bagi perbincangan dan debat mengenai isu-isu penting seperti politik dan agama. Menurutnya, hal itu terjadi karena Twitter menjadi platform yang lebih banyak digunakan oleh orang dewasa untuk membahas topik-topik tersebut.

Di sisi lain, Hasanuddin menyoroti pembelahan yang terjadi dalam perbincangan di media sosial, terutama terkait dengan keagamaan. Berdasarkan survei, 97% masyarakat Indonesia menganggap agama sangat penting dalam kehidupan mereka. Angka itu hanya bisa disaingi oleh negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan. Adapun negara-negara di Timur Tengah umumnya memiliki angka yang lebih rendah, sekitar 70%-80%.

Melihat komposisi penduduk Indonesia dari sisi agama, sebanyak 87,6% di antaranya muslim. Namun, secara geografis, Indonesia memiliki keberagaman agama yang cukup besar. Sering kali kondisi itu tidak disadari oleh masyarakat di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatra, yang mayoritas beragama Islam. Di Papua, misalnya, warga muslim justru menjadi kelompok mi-

noritas. Ketidaktahuan itu sering kali menimbulkan konflik, seperti perbedaan pendapat mengenai tempat ibadah, yang dapat memicu tindakan balasan di provinsi lain.

Lebih lanjut, Hasanuddin juga mencatat kemunculan generasi muslim baru di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Generasi ini sebagian besar berasal dari kelas menengah dan anak muda, dengan jumlah sekitar 30,5 juta orang. Ciri-ciri dari generasi muslim baru ini ialah sangat melek teknologi, aktif di media sosial, dan menggunakan platform itu untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Mereka juga memiliki semangat tinggi dalam mempelajari agama serta menunjukkan simbol-simbol keagamaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik, yang kadang memicu konflik.

Generasi itu pun memiliki gaya hidup modern dan daya beli yang tinggi sehingga tingkat donasi mereka meningkat pesat. Dalam lima tahun terakhir, dana yang terkumpul di lembaga zakat dan donasi di Indonesia melonjak signifikan. Hasanuddin mengingatkan bahwa ormas-ormas keagamaan, termasuk Pemuda Muhammadiyah, perlu memperhatikan dan merespons kebutuhan serta konektivitas generasi muslim baru ini agar hubungan antara generasi muda dan ormas keagamaan semakin erat.

### **Tantangan Toleransi dan Solusi**

Hasanuddin mengungkapkan ada enam tantangan utama terkait dengan toleransi yang perlu diperhatikan di Indonesia saat ini

**FENOMENA TANTANGAN TOLERANSI SAAT INI**

- 1 • Antar Umat Beragama/Berkeyakinan**
  - Mayoritarianisme : pandangan mayoritas berkuasa tanpa reserve
  - Penolakan kehadiran umat beragama/kepercayaan lain
  - Penolakan tempat ibadah umat beragama/kepercayaan
  - Penolakan tradisi adat oleh kelompok-kelompok umat
- 2 • Dunia Digital**
  - Narasi beragama secara eksklusif dan ekstrim di media massa mainstream dan media online
  - *Hoax* dan *hate speech* yang beredar pesat melalui teknologi informasi
- 3 • Praktik Penyelenggara Negara**
  - Harmoni sosial dengan perspektif mayoritas, bukan perlindungan hak konstitusi warga negara
  - Pembatasan atau pelarangan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, dalam kegiatan: a. Ibadah; b. Pentaatan; c. Pengamalan; dan d. pengajaran.
- 4 • Politik Identitas Dalam Kontestasi Politik**
- 5 • Karakter dan Nilai Kebangsaan yang Meluntur**
- 6 • Pahami Keagamaan**
  - Kegamangan pandangan tentang hubungan agama dengan negara
  - Berkembangnya kelompok umat beragama berideologi transnasionalisme

DOK. FDD 12

Salah satu *slide* presentasi yang dipaparkan Hasanuddin Ali mengenai *Tantangan Keberagaman Indonesia* saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 2 Maret 2022, dengan topik Menggali Nilai Kemerdekaan, Keberagaman, dan Persatuan Indonesia.

(lihat grafis).

Dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut, Hasanuddin menawarkan dua solusi. Pertama, pendidikan. Survei pada 2017 di kalangan siswa SMA dan mahasiswa menunjukkan bahwa pandangan intoleran juga muncul di lingkungan pendidikan. Karena itu, Hasanuddin menekankan pentingnya forum-forum diskusi lintas keilmuan di kalangan mahasiswa untuk memperkaya wawasan mereka, serta menghidupkan literatur keagamaan yang beragam di masjid-masjid dan lembaga pendidikan. Penting juga untuk memastikan ada kepedulian dan keberpihakan dari

manajemen lembaga pendidikan untuk mencegah tumbuhnya intoleransi.

Kedua, ketegasan pemerintah dalam menanggapi masalah intoleransi. Hasanuddin mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan TNI dan Polri untuk waspada terhadap penceramah radikal. Namun, ia menyoroti bahwa di beberapa daerah, masalah intoleransi sering terhambat oleh kepentingan politik lokal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membersihkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN dari paham intoleransi.

“Selain mengukur kinerja dan kompetensi, rekrutmen dan promosi jabatan di ASN juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan yang dianut oleh pegawai tersebut,” tukas Hasanuddin. ■





**Negara harus mampu mengelola perbedaan pendapat dengan bijak dan menciptakan ruang dialog bagi berbagai narasi yang berbeda.”**

**Willy Aditya**

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (2019-2024)

# 6 Proses Menuju Indonesia Bersatu Belum Sempurna

---

---

**P**ENTINGNYA mengelola kebinekaan di Indonesia menjadi sorotan Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (2019-2024). Menurutnya, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, bagaimana negara membangun dan mematangkan nilai-nilai Pancasila? Indonesia memiliki kondisi sosiohistoris yang unik, terdiri atas berbagai suku bangsa yang bersatu menjadi sebuah negara. Hal itu berbeda dengan negara-negara di Arab atau Eropa yang umumnya satu bangsa tapi memiliki satu atau beberapa negara. Dengan keragaman yang begitu besar, keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa menjadi tantangan tersendiri untuk dijaga dan dipertahankan. Willy menambahkan

bahwa Indonesia sebagai negara bangsa adalah ‘komunitas imajiner’, seperti yang dikemukakan oleh Ben Anderson. Indonesia terbentuk dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari keyakinan, suku, bahasa, hingga pandangan politik. Bukanlah hal mudah untuk mempertahankan keberadaan negara yang plural seperti Indonesia.

Di samping itu, Willy menekankan pentingnya mengembangkan demokrasi di Indonesia. Para pendiri bangsa, katanya, menginginkan demokrasi yang tidak hanya fokus pada aspek politik, tapi juga ekonomi. Demokrasi di Indonesia diharapkan berdiri di atas dua pilar, yaitu demokrasi politik dan ekonomi.

Yang kedua, menurut Willy, sejauh mana Indonesia dapat mengelola keberagaman yang ada. Mengutip Nezar Patria, Willy menyebut bahwa *common project* atau proyek bersama untuk membangun Indonesia sebagai sebuah negara bangsa masih terus berlangsung.

### **Belum Sempurna**

Proses menuju Indonesia yang sepenuhnya bersatu masih berjalan dan belum sepenuhnya sempurna. Willy menekankan pentingnya peran berbagai komponen, termasuk aktor non-negara, dalam menjaga keberlanjutan Indonesia sebagai negara bangsa yang beragam.

Ia juga menyampaikan pandangan mengenai tantangan pluralisme di Indonesia. Menurutnya, pengalaman di era Orde Baru

yang bersifat monolitik telah merusak keberagaman di Indonesia. Kini, di era *post-trust*, masyarakat semakin terfragmentasi dalam kelompok-kelompok kecil dengan munculnya politik identitas dan primordialisme sehingga tantangan baru bagi persatuan kian besar.

Willy menekankan bahwa tugas negara ialah melanjutkan proyek bersama untuk membangun Indonesia sebagai negara bangsa.

Tak lupa, ia pun mengkritisi slogan 'NKRI harga mati' yang menurutnya sering dijadikan mitos tanpa diikuti upaya nyata untuk mewujudkan persatuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Willy mengingatkan kembali pada perdebatan klasik antara Soekarno dan Hatta tentang persatuan nasional. Menurutnya, Soekarno sangat mengagungkan persatuan nasional, tetapi Hatta mengkritiknya dengan menyebut bahwa persatuan itu hanya 'persatean', di mana perbedaan-perbedaan ditiadakan.

Willy menyoroti bahwa sikap yang mengecap orang dengan pandangan berbeda sebagai anti-Pancasila, bahkan melabeli mereka sebagai ancaman, sudah berlangsung sejak dua rezim sebelumnya.

Menurutnya, negara harus mampu mengelola perbedaan pendapat dengan bijak dan menciptakan ruang dialog bagi berbagai narasi yang berbeda. Ia pun menegaskan, dalam melakukan riset, penting untuk mengarahkannya sebagai proyek untuk merancang rekayasa politik yang mendukung keberagaman dan persatuan yang sejati di negeri ini. ■



*Media mainstream*  
masih memberikan ruang  
bagi pandangan  
yang eksklusif, bukan  
pandangan yang beragam.  
Hal itu menjadi  
tantangan dalam  
menghadapi  
populisme.”

**Abdul Kohar**

Anggota Dewan Redaksi Media Group

# 7 Peran Media Menghadirkan Inklusivisme

---

---

**A**BDUL Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group, menyatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kabar baik dan kabar buruk terkait dengan toleransi serta kemajuan sosial.

Dalam menanggapi para pembicara, Kohar menjelaskan, meskipun ada sedikit peningkatan dalam indeks kualitas kemajuan sosial, nilainya masih sangat rendah.

Menurut laporan Social Progress Imperative, indeks toleransi dan kemajuan sosial Indonesia dari tahun 2014 hingga 2020 hanya mencapai skor tertinggi 35,47 dari skala 0 sampai 100. Itu berarti bahwa Indonesia masih berada di level yang rendah dalam hal toleransi, di mana skor 0 merujuk pada ketidaktoleranan total

dan 100 menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi.

Kohar menekankan, kendati ada peningkatan, perubahan itu tidak signifikan dan masih naik-turun. Ini menunjukkan bahwa upaya lebih keras masih dibutuhkan untuk meningkatkan toleransi di Indonesia.

Ia juga menyoroti kasus intoleransi terbaru di Banyuwangi, di mana plang Muhammadiyah di sebuah desa diturunkan paksa karena dianggap menimbulkan disharmoni. Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan tren mayoritas yang mendefinisikan kedamaian dan harmoni berdasarkan pandangan mereka, termasuk dalam konteks pandangan keagamaan. Ia melihat kejadian tersebut sebagai bukti bahwa intoleransi masih menjadi masalah yang memecah keharmonisan sosial di masyarakat.

Data dari Komnas HAM dan Setara Institute mendukung pandangan itu bahwa kasus intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bila lima tahun lalu kasus intoleransi berada pada angka 75-76 kasus, kini jumlahnya sudah melampaui 100 kasus per tahun. Kohar pun mengingatkan pentingnya mengakhiri tren ini demi mewujudkan visi Bung Karno tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang inklusif untuk semua.

Ia juga menanggapi pengaruh media sosial dan media *mainstream* yang disebut para pembicara sebelumnya turut membentuk persepsi masyarakat terhadap keberagaman. Disebut bahwa media memainkan peran penting dalam membangun suasana

kebatinan masyarakat terkait toleransi dan keharmonisan sosial. Kohar menyatakan praktik intoleransi yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan besar di tengah perubahan sosial yang pesat. “Dan itu harus segera diatasi,” tandasnya.

Kohar mengatakan, media saat ini menghadapi tantangan besar terkait populisme. Ia mengungkapkan banyak media termasuk media *mainstream* terseret ke dalam tren populisme yang dipengaruhi oleh klik dan algoritma. “Media yang mendapatkan lebih banyak klik akan berada di posisi atas, dan ini menguntungkan secara ekonomi,” ujar Kohar.

Namun, ia mengkhawatirkan bahwa pendekatan tersebut membuat media cenderung mengabaikan pandangan inklusif dalam hal keyakinan dan keberagaman. Menurut Kohar, media *mainstream* masih memberikan ruang bagi pandangan yang eksklusif, bukan pandangan yang beragam. Hal itu menjadi tantangan dalam menghadapi populisme, karena serangan terhadap keberagaman sering datang dari berbagai pihak, termasuk *buzzer* dan mesin otomatis di media sosial.

### **Bersih-Bersih di Media**

Ia mendorong adanya ‘inisiatif bersih-bersih’ di institusi media untuk memastikan bahwa keberagaman tetap terjaga. Di sisi lain, Kohar juga menyoroti masalah demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia belum sepenuhnya menjalankan demokrasi yang kokoh karena masih didominasi oleh para elite, bukan partisipa-

si masyarakat yang sejati. Demokrasi di Indonesia masih berada dalam gaya *guardianship*, di mana elite memiliki peran dominan dalam menentukan kebijakan.

Ia pun mengingatkan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunatullah atau hukum alam yang tak bisa dihindari. “Melawan keberagaman sama saja dengan melawan hukum Tuhan,” tegasnya. Menurut Kohar, penting bagi para elite, tokoh masyarakat, dan juru dakwah untuk terus mendorong toleransi dan menjadikan keberagaman sebagai roh utama Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hukum dan inklusivisme, khususnya untuk melindungi kelompok minoritas. Kohar berharap media, termasuk media sosial, dapat memainkan peran dalam menghadirkan inklusivisme, terutama di tengah demografi gen Z dan milenial yang kini menjadi mayoritas di Indonesia. Dengan demikian, media dapat mendukung keberagaman dan toleransi di dalam masyarakat secara lebih luas.

### **Bukan Kesamaan Alami**

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menekankan bahwa persatuan bangsa Indonesia terbentuk dari tekad dan ikhtiar bersama, bukan dari kesamaan alami. Ia mengingatkan bahwa meskipun suku Melayu hanya berjumlah sekitar 3%-3,5% dari populasi, bahasa Melayu justru dipilih sebagai bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia.

Namun, Saur mengakui, seiring berjalannya waktu, ma-

syarakat Indonesia kini cenderung lebih mudah tersinggung atau menyinggung. Ia mencontohkan beberapa insiden, seperti ketika seorang anggota DPR meminta seorang pejabat Sunda dicopot hanya karena menggunakan bahasa Sunda, atau ketika ada yang merendahkan Kalimantan dengan menyebutnya ‘tempat jin buang anak’ serta ‘alam yang lemah’. Menurut Saur, pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari sikap saling menghormati, terutama dalam isu suku dan agama.

Oleh karena itu, ia merasa bahwa upaya untuk terus memperkuat persatuan dan kebangsaan Indonesia perlu dilandasi dengan ‘etika kebangsaan’. Saur berpendapat, ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan secara sembarangan, dan kedewasaan menuntut setiap orang untuk mampu mengendalikan diri. Dengan begitu, rasa saling menghormati bisa terwujud dalam kehidupan berbangsa. ■





# Pentingnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia



# 1 Latar Belakang: Empat Pilar Penjaga Toleransi

---

---

**H**ARI Toleransi Internasional diperingati setiap 16 November. Peringatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi di antara berbagai kelompok sosial, budaya, agama, dan etnis. Perbedaan-perbedaan yang sangat kompleks di tengah masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan potensi disintegrasi yang sangat besar. Pemahaman yang baik akan nilai-nilai keberagaman dan toleransi dapat mempromosikan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat yang heterogen.

Indonesia sebagai negara dengan berbagai perbedaan agama, budaya, suku, atau pandangan politik sangat memerlukan nilai-nilai toleransi. Toleransi terhadap berbagai perbedaan dapat



DOK. FDD 12

Lestari Moerdijat ketika melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (27/11/2019).

mengatasi ketegangan yang mungkin timbul di antara kelompok masyarakat. Perayaan Hari Toleransi Internasional di Indonesia merupakan upaya penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana semua orang dapat hidup bersama dengan damai tanpa memandang perbedaan di antara mereka.

Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*, berperan penting dalam menjaga toleransi dan menangkal ancaman disintegritas. Ada tiga pertanyaan penting

yang harus dijawab. Pertama, bagaimana proses pendidikan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda? Kedua, mengapa pemerintah terkesan lamban dan tidak tegas dalam melawan intoleransi di berbagai daerah? Ketiga, bagaimana peran para pemangku kepentingan dalam meningkatkan nilai-nilai toleransi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan. ■



*Bhinneka Tunggal Ika*  
adalah anugerah yang  
menjadi milik bangsa  
ini, bukan masalah yang  
dapat menimbulkan  
disintegrasi.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Perbedaan Sebagai Anugerah

---

---

**P**ERINGATAN Hari Toleransi Internasional bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Semua pihak harus membangun kesadaran bahwa perbedaan memerlukan sebuah tata kelola berkelanjutan, dan yang paling penting ialah bagaimana perbedaan bisa diterima sebagai anugerah. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah anugerah yang menjadi milik bangsa ini, bukan masalah yang dapat menimbulkan disintegrasi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan pandangan tersebut ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 1 November 2023.

Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, kata Lestari



DOK. FDD 12

Lestari Moerdijat memberikan pengantar dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 1 November 2023, dengan topik Pentingnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia.

Moerdijat yang biasa disapa Rerie, *Bhinneka Tunggal Ika*, Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pusat refleksi dan nilai untuk bisa bersama-sama membangun rasa kebangsaan dan kemudian mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang diinginkan para *founding father*.

Setara Institute menyatakan rata-rata indeks kota toleran nasional pada 2022 mencapai 5,03 dan di 2021 sebesar 5,24 (dari skala 1 paling buruk dan 7 paling baik). Itu menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia belum mencapai tingkat yang memuaskan. Selain itu, kata Rerie, beberapa catatan juga menunjukkan masih

banyak peristiwa yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ini menjadi penting untuk didiskusikan bersama karena elemen toleransi sesungguhnya sudah terpatri dalam ideologi berbangsa dan bernegara. Jika ditarik ke dalam sejarah perjalanan peradaban bangsa ini, kata Rerie, nilai-nilai toleransi adalah sesuatu yang selalu dikedepankan sampai hari ini. Sejarah mencatat bahwa ketika Islam masuk, para pemimpin mengadopsi nilai-nilai ajaran agama setempat dan di situlah Islam bertumbuh subur. Warisan nilai-nilai toleransi tersebut, kata legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah II (Demak, Kudus, dan Jepara) itu, masih bisa dijumpai hingga hari ini di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Misalnya masjid-masjid beratap tumpang yang melambangkan Gunung Semeru yang dianggap suci dalam agama Hindu. Di Kudus, masyarakat lokal sampai hari ini tidak makan daging sapi untuk menghormati masyarakat lokal yang beragama Hindu ketika Islam masuk, karena sapi adalah binatang suci dalam Hindu.

Nilai-nilai seperti itu tumbuh dalam masyarakat di berbagai tempat. Sayangnya kondisi tersebut mulai luntur. Ini, kata Rerie, menjadi catatan penting buat semua pihak. Perlu pemikiran dan refleksi untuk menjadikan kearifan lokal sebagai pedoman merawat keberagaman berbangsa dan bernegara, yang mengedepankan harmoni manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan penciptanya. ■



**Ketika perbedaan  
tidak dikelola  
dengan baik,  
ada potensi terjadi  
perpecahan dan  
gesekan sosial.”**

**Ahmad Ramadhan**

Kepala Biro Penerangan Masyarakat  
Divisi Humas Polri

# 3

## Mencegah Perpecahan

---

---

**I**NDONESIA adalah negara dengan beragam suku, bangsa, agama, golongan, dan lainnya. Kebinekaan itu adalah sebuah kekayaan yang menyatukan semua elemen tersebut dalam NKRI. Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, mengatakan kebinekaan Indonesia berbeda dengan di Timur Tengah. Misalnya, di Timur Tengah ada etnis Arab, tetapi mereka terbagi dalam beberapa negara. Adapun di Indonesia, berbagai suku itu menjadi satu di sebuah negara yakni NKRI.

Ketika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, kata Ramadhan, ada potensi terjadi perpecahan dan gesekan sosial. Apalagi jika ada kelompok atau oknum yang tidak bertanggung jawab

memprovokasi dengan mengumbar perbedaan tersebut. Keutuhan bangsa ini menjadi rentan, gampang terpecah belah, mudah diadu domba, jika ikatan toleransi menjadi longgar. Gesekan sosial berdampak pada gangguan keamanan yang nantinya menghambat pembangunan dan mengganggu perekonomian. Ketika terjadi gangguan, negara dan bangsa tidak akan maju.

Saat menghadapi gangguan toleransi, kata Ramadhan, kepolisian mempunyai peran sesuai tugas pokok Polri yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kepolisian memiliki tugas sebagai aparat negara, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang memelihara keamanan dan penegakan hukum. Jadi, tambah Ramadhan, penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam rangka memelihara kamtibmas dan melindungi serta mengayomi masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, yang diutamakan ialah upaya preventif, bukan penegakan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, kata Ramadhan, masyarakat menginginkan pelaku kejahatan dihukum secara adil. Sebaliknya masyarakat akan merasa tidak adil ketika pelaku kejahatan tidak ditindak dengan tegas. Jika ada sumbatan-sumbatan penegakan hukum, kata Ramadhan, itu salah satunya karena ketidakprofesionalan anggota Polri. Komitmen Kepala Polri (Kapolri) saat ini, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bahwa setiap anggota yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela yang mencemarkan nama baik Polri, termasuk penegak hukum yang

bermain-main, akan dikenai sanksi. Itu telah ditunjukkan tanpa pandang pangkat mulai dari yang rendah sampai perwira tinggi.

Mengenai kesan bahwa Polri ragu-ragu dalam menindak pelaku intoleransi, Ramadhan mengatakan Polri harus berhati-hati dalam menerapkan dasar hukum lantaran menyangkut rasa keadilan pihak yang diduga melakukan intoleransi maupun korban intoleransi. Dasar hukumnya ialah UUD 1945, UU Polri, dan berbagai peraturan perundangan lain. Jadi dasarnya bukan pendapat anggota Polri secara individu.

Saat menjawab pertanyaan moderator Abdul Kohar tentang keluhan adanya pembubaran ibadah atau pelarangan kegiatan agama tertentu oleh kelompok masyarakat, Ramadhan mengatakan hal itu jelas tidak menghargai toleransi. Jika polisi menangkap tangan pelaku intoleran lengkap dengan bukti, tidak ada alasan lamban menangani kasus tersebut, tapi tetap dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian. Polri mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan sebagai wujud kebinekaan dan menjaga toleransi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ramadhan meyakinkan bahwa polisi bekerja atas dasar prinsip keadilan hukum. Bagi Polri, hukum tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi tajam ke semua sisi, ke atas, ke bawah, juga ke samping, tanpa membedakan status sosial, jabatan, dan pangkat. Bagi kepolisian, siapa pun yang melanggar aturan akan berhadapan dengan hukum tanpa ada perlakuan khusus karena semua warga negara sama di depan hukum. ■



Keberagaman  
merupakan kenyataan  
sosial antropologis.  
Siapa pun yang ingin  
menjadi pemimpin  
di Indonesia harus  
memahami, menjaga,  
dan merayakan  
DNA tersebut.”

**Komaruddin Hidayat**

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia

# 4 Merayakan Keberagaman

---

---

**M**ASYARAKAT Indonesia mempunyai dua DNA yang menonjol, yakni pluralitas dan religiositas. Keberagaman itu merupakan kenyataan sosial antropologis. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin menjadi pemimpin di Indonesia harus memahami, menjaga, dan merayakan DNA tersebut.

Pendapat itu dikemukakan Komaruddin Hidayat, Guru Besar yang juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Karena beragam, kata Komaruddin, maka konsep tata negara yang paling cocok dan sah untuk Indonesia ialah demokrasi. Demokrasi Indonesia juga menghargai keragaman dari sisi agama sehingga filosofi bernegara bangsa ini sangat khas. Agama tidak semata menjadi urusan individu. Negara juga ikut bertanggung jawab,

bahkan dana APBN pun disalurkan untuk pembinaan agama.

Di masa lalu, ketika terjadi ketidakadilan, masyarakat protes dengan membawa isu sentimen etnis dan agama. Akan tetapi, etnisitas sekarang sudah kian kendur. Generasi hibrida yang orangtuanya lintas etnis, produk dari mereka yang kuliah di kampus besar semacam UI, ITB, UGM, dan IPB, semakin mengindonesia. Mereka berkawan, berpacaran, menikah, dan berkantor lintas etnis sehingga anak-anak mereka pun semakin mengindonesia.

Oleh karena itu, imbuah Komaruddin, konflik etnis sekarang semakin rileks. Kalaupun ada yang masih peka etnisitas, itu terkait dengan etnis Tionghoa, karena selalu diasumsikan mereka adalah kelompok minoritas tapi akses pada ekonominya jauh melebihi mayoritas.

Adapun agama, menurutnya, itu sebagai instrumen untuk kendaraan dukungan legitimasi moral ketika terjadi berbagai tindak ketidakadilan pemerataan dan sebagainya. Namun, sesungguhnya, sejak awal umat Islam paling depan ikut mendorong, memperjuangkan, dan melahirkan negara ini. Lantaran aset modal historis, politik, ideologisnya paling besar, wajar bila pemerintah memberikan ruang yang cukup besar bagi pembinaan agama Islam. Sejak awal umat Islam Indonesia bersikap moderat. Buktinya, walaupun sebagai kelompok mayoritas, umat Islam setuju mengambil bentuk negara republik dan sistem pemerintahan demokrasi. Islam bukan sebagai dasar negara, melainkan panduan hidup bagi masyarakat. Indonesia bukan *Islamic state*,



Komaruddin Hidayat saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 1 November 2023, dengan topik Pentingnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia.

melainkan *muslim society*.

Karena itu, tandas Komaruddin, sejak awal genealogi umat beragama di Indonesia itu toleran. Kalau muncul radikalisme, biasanya dalam konteks global yang merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan yang tidak bisa diatasi dengan diplomasi politik dan ekonomi. Misalnya, Afghanistan di mata Amerika dianggap radikal, padahal mereka mempertahankan kampung halamannya. Dulu Indonesia dianggap radikal di mata Belanda, padahal kita membela tanah air kita. Begitu juga Palestina, di mata Yahudi dianggap teroris, padahal mereka mempertahankan tanah airnya.

Para intelektual Barat, lanjut Komaruddin, semakin tidak percaya bahwa para teroris itu sebagai wakil agama mereka, semakin tidak percaya bahwa itu identik dengan Islam. Para intelektual Barat kini kembali pada histori ajaran dasar Islam, tapi bukan diwakili kelompok tersebut.

Memori kolektif publik tentu masih ingat bahwa di masa lalu perlawanan dalam konteks politik mengendarai partai politik. Sekarang, partai politik sudah semakin lunak, semakin ke tengah. Kelompok kanan islamis semakin ke tengah, kelompok kiri juga kian ke tengah. Partai-partai politik mewakili aspirasi masyarakat membentuk pemerintahan untuk mengatur negara. Pertanyaannya, betulkah sekarang pemerintah dan parpol mewakili aspirasi masyarakat. Dulu parpol betul-betul aspiratif, tetapi sekarang melemah. Siapa yang menguasai parpol saat ini? Lingkaran elite parpol adalah para pemodal. Ini menimbulkan masalah baru bahwa kedaulatan rakyat hanya terjadi saat mencoblos di kotak suara. Setelah itu lepas. Karena itu, ketika terjadi ketimpangan, masyarakat tidak percaya kepada institusi negara.

Hasil survei belakangan menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada institusi-institusi pemerintahan itu turun. Mengapa? Karena publik disuguhi tindakan-tindakan menyalahi nalar sehat, ketidakadilan, dan sebagainya. Kalau sudah begini, tambah Komaruddin, diperlukan perbaikan penegakan hukum. Pertanyaannya, siapa yang bisa menegakkan hukum.

Komaruddin mengatakan setiap orde berusia kurang lebih 25

tahun. Di tiga kali ujung orde itu ada kelelahan. Orde Lama ujungnya lelah dan marah. Orde Baru pun ujungnya lelah dan marah. Komaruddin berharap di ujung Orde Reformasi jangan lelah dan marah, tetapi harus dijaga dan dibuktikan dengan tindakan. Bukan dengan retorika, karena retorika tidak bisa dipegang dan membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada sabda-sabda para elite politik.

Kalau itu terjadi, ujar Komaruddin, lagi-lagi bangsa ini kembali dari nol. Padahal ke depan harus membangun *state building*. Komaruddin yakin *nation building* atau ikatan keindonesiaan itu kuat sekali, tapi sebaliknya *state building* tidak kuat. Bangsa yang semakin maju, peradaban dan etikanya juga semakin maju. Korea, misalnya, sekarang mengekspor seni karena seni merupakan simbol peradaban. Teknologi juga simbol peradaban. Sebaliknya, Indonesia masih mengekspor gelondongan mentah dari sumber alam, juga mengekspor tenaga kerja tanpa *skillful*.

Ketika masyarakat secara ekonomi sudah maju, tuntutananya ialah keadilan politik. Akan tetapi, keadilan politik kadang dikalahkan oleh keadilan ekonomi. Sebagai negara yang telah maju, semestinya selain keadilan ekonomi juga ada keadilan politik, keadilan kesejahteraan, dan seterusnya.

Partai politik mempunyai peran sangat strategis untuk membangun bangsa karena parpol bisa menyalurkan dan lebih aktif menjaring putra-putri terbaik. Selain itu, parpol mempunyai otoritas, kewenangan, serta akses untuk mengisi lembaga legislatif

dan eksekutif. Persoalannya, tukas Komaruddin, cita-cita ideal dari parpol sekarang turun. Orang-orang baik tidak terjaring di partai politik karena biaya politik mahal. Orang-orang bermoral pun umumnya tidak kaya dan tidak mau berebut posisi politik.

Oleh sebab itu, mesti ada reformasi, perubahan undang-undang yang memungkinkan putra-putri terbaik bisa masuk ke politik dan mempunyai akses mengisi legislatif maupun eksekutif. Namun, partai politik lagi-lagi seperti ikan lele menikmati hidup di air yang keruh.

Di samping itu, parpol juga harus membuat agar politik berbiaya murah. Publik tahu bahwa selama ini ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau presiden sangat mahal dan parpol seperti menjual *boarding pass*. Parpol tidak perlu kerja mati-matian karena yang kerja calonnya saat kampanye. Bahkan parpol mendapat dividen *kickback* setelah menjual *boarding pass*. Ini tidak sehat. Jadi, parpol bukan sebagai penyambung perjuangan ide dan aspirasi rakyat, tetapi layaknya politik bisnis. Politik model itu harus diperbaiki.

Masalah lain yang dihadapi ialah bangsa ini belum berhasil dengan *state building*, tetapi buru-buru mengubah pendulum menjadi liberalisasi, desentralisasi, pemilihan langsung. *State building* belum berhasil, tetapi rakyat sudah diberi kebebasan, dan sekali kebebasan dikasih, sulit ditarik kembali.

Salah satu kebebasan yang menonjol ialah menggunakan instrumen agama untuk menjaring massa. Pada tiga pemilu yang

lalu, untuk menjaring massa diturunkan artis. Kini publik sudah tidak begitu tertarik kepada artis. Lalu diturunkan ulama untuk mencari massa, tetapi rakyat juga sudah mulai kurang berminat karena wibawa ulama di panggung politik pun turun. Akhirnya, kata Komaruddin, yang bertahan menjaring massa ialah uang. Namun, asal usul uang itu juga abu-abu.

Di lapisan bawah, uang dan agama masih menjadi instrumen mobilisasi massa untuk menghadiri bazar-bazar politik. Pada saat itulah terjadi manipulasi agama yang berpotensi memicu sikap intoleransi yang bersumber dari ketidaktahuan. Mereka menjadi korban bazar-bazar politik itu. ■



**Negara ini tidak dibangun  
untuk mengadvokasi  
perbedaan-perbedaan  
sehingga ruang-ruang  
untuk keberagaman  
masih sempit.”**

**Inayah Wulandari Wahid**  
Jaringan Gusdurian

# 5 Ruang Perbedaan masih Sempit

---

---

**P**LURALITAS dan religiositas secara umum merupakan jejak genetik bangsa Indonesia yang juga muncul dalam jargon-jargon politik. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar merupakan kenyataan. Pertanyaan kritis itu dijawab sendiri oleh Inayah Wulandari Wahid dari Jaringan Gusdurian dalam diskusi tersebut. Jawaban Inayah merujuk pada hasil *games* yang dilakukan terhadap sejumlah siswa sekolah. Kesimpulannya, pembicaraan soal toleransi terkadang tidak *matching* dengan sikap keseharian.

Inayah menceritakan, suatu ketika Jaringan Gusdurian dan Wahid Foundation mengembangkan sebuah *board games* membicarakan soal keberagaman, toleransi moderasi, dan segala macam. Pada saat *games* itu dimainkan di sekolah-sekolah juga disertakan

kuesioner. Saat mengisi kuesioner, anak-anak itu terutama ketika tahu bahwa penyebar kuesioner ialah Jaringan Gusdurian dan Wahid Foundation yang terafiliasi dengan Gus Dur, mereka mengisi sangat percaya kepada Pancasila, keberagaman, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan nilai-nilai moderasi. Nilainya 100% percaya.

Di halaman kedua kuesioner, tambah Inayah, pertanyaan menjadi sangat spesifik. Ditanyakan misalnya, kalau ada orang di lingkunganmu yang keyakinan agamanya dinilai melenceng oleh orang lain, apakah dia boleh dikenai kekerasan, maka mayoritas menjawab boleh. Bahkan ada beberapa yang menjawab misalnya perlu diusir. Ketika ditanyakan, apakah kamu mau bersekolah atau bermain dengan teman-teman yang beda agama, mayoritas menjawab tidak.

Dengan contoh itu, kata Inayah, menunjukkan bahwa pluralitas dan religiositas sering mencuat dalam jargon politik, tetapi tidak dalam tindakan nyata. Terkadang bicara toleransi, tetapi tidak *matching* dengan sikap.

Sering kali, kata Inayah, bangsa ini menganggap toleransi ibarat pil ajaib yang akan menyelesaikan banyak persoalan di Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa toleransi adalah indikator atau gambaran atas suatu masyarakat. Masyarakat yang diharapkan muncul ialah masyarakat moderasi, antikekerasan, harmonis, tidak berlandaskan kebencian, dan segala macam. Jadi toleransi itu hasil yang didukung sebuah ekosistem. Jika ekosistem tidak mendukung, toleransi pun tidak terwujud.

Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, Inayah

merasa negara ini tidak dibangun untuk mengadvokasi perbedaan-perbedaan sehingga ruang-ruang untuk keberagaman masih sempit. Contohnya, ketika berbicara tentang *climate change*, diselesaikan dengan satu sudut pandang. Juga isu tentang kemiskinan. Isu-isu politik pun sangat elitis dan homogen sehingga menjadi ruang yang sulit ditembus oleh yang berbeda. Jadi banyak sudut pandang tentang isu-isu yang ada di sekitar kita itu juga sangat monolitik.

Di sekolah-sekolah dapat dilihat betapa banyaknya perundungan (*bullying*) yang terjadi terhadap siswa yang berbeda dalam banyak hal. Bahkan Inayah memberikan contoh dirinya dihujat karena sebagai muslimah dia tidak memakai kerudung. Ini bukan sesuatu yang sepele, karena jika melihat konteksnya di Iran hari ini, kata Inayah, berapa banyak perempuan yang meninggal hanya karena mereka tidak mengenakan kerudung. Publik yang tampak sopan dan santun, bisa merangsek, menekan, dan tidak memberikan ruang kepada perbedaan-perbedaan.

Paling penting hari ini, tegas Inayah, yang pertama ialah membuka ruang seluas-luasnya terhadap perbedaan. Kedua, penegakan hukum. Penegak hukum memang harus netral, tetapi dalam hal ada kelompok terkena kekerasan, mereka tidak boleh netral.

Apa yang dicari dalam toleransi? Mengutip Gus Dur, Inayah mengatakan yang dicari ialah *peace* (perdamaian). Namun, *peace without justice is an illusion* (perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi). ■



**Ketika Piagam Madinah  
dilaksanakan  
dengan baik,  
itulah yang patut  
dipelajari yang  
namanya harmoni.”**

**Eva Yuliana**  
Anggota DPR RI  
dari Fraksi Partai NasDem  
Periode 2019-2024

# 6 Belajar dari Piagam Madinah

---

---

**L**INGKUNGAN seseorang menjadi tempat yang nyaman untuk belajar tentang seluruh aspek kehidupan. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mengatakan dia belajar toleransi dari kehidupan sosial sejak kecil. Lingkungan yang sangat heterogen, lingkungan Jawa, Arab, keturunan Tionghoa, dan berbagai agama merupakan habitat yang harmonis.

Bagi Eva, toleransi dalam bahasa Jawa adalah *tepo seliro*, yang berarti menghormati keberagaman, atau juga *wongke wong*, menghormati sesama atau menghormati orang lain walaupun berbeda. Pada dasarnya, kata Eva, toleransi itu bertujuan membangun kehidupan di antara berbagai kelompok masyarakat yang



DOK. FDD 12

Eva Yuliana saat berbicara dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 1 November 2023, dengan topik Pentingnya Nilai-Nilai Toleransi dalam Keberagaman Indonesia.

berbeda-beda. Kehidupan yang harmonis atau toleran dalam konteks Indonesia tidak bisa hadir begitu saja jika tidak didukung syarat tertentu. Syarat utamanya ialah kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah menjadi pokok dan penting untuk mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis dalam berbangsa dan bernegara.

Soal toleransi ini sebetulnya bisa dirunut jauh ke belakang. Dalam sejarah ada Piagam Madinah yang ditulis Nabi Muhammad SAW, yang berisi antara lain tentang keberagaman suku dan toleransi. Ketika Piagam Madinah dilaksanakan dengan baik, itulah yang patut dipelajari yang namanya harmoni. Di Islam juga

sudah dituangkan dalam Surah Al-Kafirun ayat 6, yakni *Lakum dinukum waliyadin* (Bagiku agamaku dan bagimu agamamu). Eva yakin prinsip serupa juga ada pada agama atau kepercayaan lain yang dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana bangsa dan pemerintah Indonesia mewujudkan itu dalam kehidupan nyata dan menjadi komitmen bersama.

Eva juga mengatakan penegak hukum harus melaksanakan tugas dengan baik dalam menangani kasus-kasus intoleransi. Mengamalkan penindakan hukum bukan satu-satunya solusi, tetapi tantangan besar bagi Polri ialah hadir di tengah masyarakat sebagai mediator terbaik di Republik ini.

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan toleransi tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Ketika terjadi berbagai ketimpangan maka yang muncul bisa jadi intoleransi. Namun, yang paling pokok ialah apa pun perbedaan itu harus dipandang sebagai anugerah. Perbedaan agama, suku, bahasa, dan etnis adalah anugerah. Yang bukan anugerah ialah disparitas sosial, ekonomi, dan pendidikan, juga disparitas kekayaan.

Karena itu, kata Saur, keadilan adalah kualitas pokok untuk memelihara penegakan toleransi. “Saya lebih suka kita menggunakan kata ‘menghormati’ daripada ‘toleransi’ karena *to tolerate* mengandung pengertian menerima sekalipun ada yang tidak kita sukai, sedangkan menghormati itu adalah menerima dengan penuh ketulusan,” pungkas Saur. ■





# Peran Nilai dan Revolusi Mental Menuju Indonesia 2045



# 1 Latar Belakang: Upaya Merevitalisasi Revolusi Mental

---

---

**S**EBAGAI anggota Group of Twenty (G20) atau Kelompok 20 yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah anggota Uni Eropa, Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju menjelang 100 tahun kemerdekaan di 2045. Untuk mencapai itu, berbagai usaha telah dilakukan, termasuk mengaktifkan nilai-nilai positif lewat berbagai dialog, baik antarmasyarakat maupun antargenerasi. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti gotong royong dan kebinekaan, dapat menjadi pelumas roda pembangunan agar melaju lebih cepat, terarah, dan fokus pada apa yang dicita-citakan.

Cita-cita utamanya ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Revolusi mental yang selama ini menjadi jargon presiden harus direvitalisasi dan diselaraskan dengan strategi

pembangunan manusia dan kebudayaan. Revitalisasi juga harus diinjeksi ke sistem pembangunan agar tecermin dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Dari survei lembaga Nenilai, terlihat jelas ada nilai-nilai yang menghambat kemajuan. Itu tergambar dari tingginya tingkat entropi di masyarakat.

Oleh sebab itu, kita perlu bersungguh-sungguh melakukan rekayasa sosial untuk terus bergerak maju menyongsong peluang bonus demografi dan 100 tahun Indonesia merdeka.

Saat mengantarkan diskusi, moderator Luthfi Assyaukanie mengatakan nilai-nilai yang dianut masyarakat sangat memengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia.

Jika bicara soal nilai, sering kali kita merasa itu sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Padahal, nilai-nilai tersebut adalah hal yang nyata dan bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Studi-studi tentang demokrasi, pembangunan, dan kebahagiaan selalu mengaitkan hasil dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya, dalam studi tentang demokrasi, keberhasilan suatu negara dalam menjalankan demokrasi sangat bergantung pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya, seperti kebebasan dan persamaan. Tanpa nilai-nilai itu, demokrasi akan sulit berkembang.

Sejak awal 1980-an, beberapa ilmuwan sosial mendirikan sebuah lembaga besar yang bernama World Values Survey. Lembaga itu melakukan survei setiap lima tahun untuk melihat nilai-nilai yang berlaku di lebih dari 80 negara.

Yang menarik, surveinya tidak hanya melihat nilai-nilai di

level negara, tapi juga di level masyarakat meskipun negara tetap menjadi identifikasi utamanya. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu membangun demokrasi dan tatanan yang baik cenderung memiliki nilai-nilai rasional dan mementingkan kebebasan ekspresi diri, bukan nilai-nilai yang lebih tradisional atau hanya bertahan hidup.

Temuan itu juga sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Nenilai. Lembaga itu punya cara sendiri dalam melakukan survei tentang nilai-nilai. Salah satu temuan mereka yang menarik ialah bahwa masyarakat Indonesia, jika ditanya secara umum, memiliki pandangan yang sangat baik mengenai nilai-nilai seperti demokrasi, gotong royong, dan toleransi.

Namun, masalahnya kenyataan yang ada di masyarakat seringkali berbeda. Ketika diminta untuk menjelaskan nilai-nilai yang berlaku di kehidupan sehari-hari, banyak yang menyebutkan hal-hal negatif, seperti diskriminasi, birokrasi yang rumit, korupsi, dan pelanggaran HAM. Artinya, ada jarak besar antara harapan dan kenyataan. Temuan ini harus menjadi perhatian besar. Jika berbicara tentang revolusi mental dan perbaikan mental masyarakat, harus dipikirkan bagaimana menyiapkan masyarakat Indonesia yang lebih baik, terutama menjelang 2045, di saat kita harus lebih kompetitif.

Dengan kenyataan tersebut, perlu kiranya berdiskusi untuk mencari solusi dan langkah-langkah yang bisa diambil demi memperbaikinya dan merealisasikan cita-cita besar sebelum 2045. ■



Seluruh elemen bangsa harus bersatu dalam menghadapi ancaman terhadap tatanan nilai kebangsaan yang datang dari paham-paham baru yang merusak.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Sistem Pendidikan Harus Bertujuan Memanusiakan Manusia

---

---

**W**AKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memulai inisiatif untuk mengadakan survei mengenai nilai-nilai kebangsaan. Saat mengantarkan diskusi, Lestari menjelaskan bahwa survei tentang nilai-nilai bertujuan melihat bagaimana nilai-nilai kebangsaan dimaknai dan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Rerie, demikian panggilan Lestari Moerdijat, survei ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut bisa menjadi pedoman atau *guidance* dalam mencapai Indonesia Emas.

Dalam kesempatan itu, Rerie mengungkapkan bahwa temuan-



DOK. FDD 12

Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 2 Februari 2022, dengan topik Peran Nilai dan Revolusi Mental Menuju Indonesia 2045.

temuan dari survei dapat menjadi pijakan untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) atau cetak biru (*blueprint*) dalam membangun bangsa.

Hal itu perlu dilakukan dengan melihat nilai-nilai yang ada, yang diharapkan, serta yang paling penting ialah kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan yang ditemukan dalam hasil survei.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami nilai-nilai kebangsaan, apalagi di tengah kondisi global yang penuh tantangan, seperti pandemi dan disrupsi teknologi.

Sebagai bangsa yang berketuhanan, imbuah Rerie, penting

untuk menggali lebih dalam aspek spiritual dalam memaknai nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah konsensus kebangsaan yang harus tetap dijaga.

Ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus bersatu dalam menghadapi berbagai permasalahan, terutama ancaman terhadap tatanan nilai kebangsaan yang datang dari paham-paham baru yang merusak.

Rerie pun mengungkapkan, hasil survei itu dapat menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan langkah bersama. Namun, ia menekankan, langkah-langkah yang diambil harus bersifat kolektif dan melibatkan seluruh pihak.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan, menurutnya, bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini dapat diterapkan dalam pendidikan. Rerie menekankan bahwa pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai yang mendalam adalah hal yang sangat penting. Selain itu, sistem pendidikan harus bertujuan memanusiakan manusia, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata. ■



Tantangan besar  
bagi Indonesia ialah  
bagaimana melakukan  
transformasi sosial untuk  
menghidupkan nilai-nilai  
positif dan mengurangi  
nilai-nilai yang  
menghambat kemajuan.”

**Alissa Wahid**  
Praktisi kemanusiaan

# 3 Mencari Solusi agar Indonesia Bergerak Maju

---

---

**A**LISSA Wahid, praktisi kemanusiaan, mengungkapkan temuan menarik dari survei *Nenilai* yang bertujuan memperhatikan nilai-nilai budaya di Indonesia.

Menurut Alissa, lembaga *Nenilai* berupaya mengumpulkan data secara masif untuk tujuan refleksi. Akan tetapi, yang lebih penting ialah bagaimana data tersebut digunakan untuk membangun dialog di kalangan masyarakat demi mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sentosa, sesuai dengan semangat kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung *Indonesia Maju*.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan *framework* yang sudah teruji secara global, yang diharapkan dapat terus

direplikasi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan terus berkembang.

Survei pertama dilakukan pada Juli-Desember 2020 dengan melibatkan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas sebagai responden. Meski dilaksanakan secara daring karena pandemi, survei ini berhasil menjangkau 50.000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia dengan demografi yang lebih lengkap.

Inisiatif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bappenas, Indika Energy, Dayalima, Pantarei, dan Stoik Trisula sebagai organisasi yang mengawal jalannya survei.

Fokus utama dari survei Nenilai ialah menilai tiga dimensi utama, yaitu nilai-nilai pribadi, nilai-nilai budaya nasional saat ini, dan nilai-nilai yang dianggap penting untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kalangan muda, dengan 39.000 di antaranya berusia 15-30 tahun. Hal itu mencerminkan bagaimana anak muda Indonesia memandang nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Dari sisi nilai pribadi, responden menyebutkan bertanggung jawab sebagai nilai yang paling dominan, diikuti dengan hidup sederhana, dipercaya dan memercayai orang lain, serta nilai-nilai seperti adil, disiplin, ikhlas, humor, integritas, menghormati orangtua, dan antusiasme.

Namun, kata Alissa, ketika melihat nilai-nilai budaya saat ini di Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa gotong royong me-

nempati posisi tertinggi, sesuai dengan semangat revolusi mental yang menekankan etos kerja, gotong royong, dan integritas.

Di sisi lain, nilai negatif yang menonjol ialah birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, serta diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Nilai-nilai positif lain yang masih mendominasi ialah keberagaman (*Bhinneka Tunggal Ika*), demokrasi, dan hak asasi manusia. Meski demikian, nilai berpegang pada aturan agama juga muncul tinggi, yang menurut kajian bisa menunjukkan kecenderungan pada rigiditas dalam penerapannya.

Secara keseluruhan, survei ini memberikan gambaran tentang nilai-nilai yang ada di Indonesia saat ini, serta menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai positif yang bisa membawa bangsa ini menuju kemajuan yang lebih baik.

Alissa Wahid menjelaskan, dalam survei juga ditemukan bahwa ada empat nilai positif yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain terdapat juga nilai-nilai negatif yang mendominasi.

Salah satu temuan utama ialah angka entropi budaya Indonesia yang mencapai 42%. Entropi budaya, menurut Alissa, mengukur keseimbangan antara nilai-nilai yang mendukung kemajuan dan nilai-nilai yang menghambat.

Dengan angka entropi budaya 42%, kata Alissa lagi, ini menunjukkan bahwa lebih banyak nilai negatif yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kondisi itu menunjukkan potensi terjadinya kemunduran jika tidak segera diatasi.

Angka entropi budaya yang sehat seharusnya berada di 13%. Angka 40% sudah dianggap kritis, dengan dominasi nilai-nilai yang menghambat kemajuan.

Alissa menegaskan pentingnya menerima fakta tersebut, yang merupakan bagian dari kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi kenyataan keras atau *brutal facts*. Setelah menerima fakta itu, langkah selanjutnya ialah mencari solusi untuk bergerak maju.

Survei Nenilai juga menggali tentang nilai-nilai budaya yang diharapkan agar Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Beberapa nilai yang dianggap penting oleh masyarakat ialah keadilan, keadilan sosial, hak asasi manusia, gotong royong, demokrasi, berpikir jangka panjang, serta budaya bertanggung jawab dan integritas. Nilai-nilai itu diharapkan bisa mendukung terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa.

Namun, survei ini juga mengungkapkan adanya ketimpangan antara nilai yang diharapkan dan kenyataan yang ada saat ini. Misalnya, walaupun keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi nilai yang diinginkan, dalam praktiknya masih banyak diskriminasi dan dominasi oleh golongan elite. Nilai-nilai itu menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diperbaiki.

Jika dibandingkan dengan negara lain, angka entropi budaya Indonesia masih cukup tinggi, terutama kalau dibandingkan de-

ngan Bhutan. Entropi budaya di negara itu sangat rendah, hanya 4%. Hal tersebut terkait dengan pendekatan Bhutan dalam mengukur keberhasilan pembangunan, yang tidak hanya menggunakan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga *gross happiness index* atau indeks kebahagiaan. Karena itu, budaya positif di Bhutan lebih dominan daripada budaya negatif.

Melihat temuan itu, Alissa Wahid menekankan bahwa tantangan besar bagi Indonesia ialah bagaimana melakukan transformasi sosial atau *social engineering* untuk menghidupkan nilai-nilai positif dan mengurangi nilai-nilai yang menghambat kemajuan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi seluruh elemen masyarakat.

Survei Nenilai juga berhubungan dengan gerakan global terkait G20, di mana pembangunan di satu wilayah akan memengaruhi wilayah lain. Pandemi covid-19 menjadi contoh nyata ketimpangan global, di saat negara-negara maju memiliki akses lebih banyak terhadap vaksin, negara-negara berkembang dan Afrika masih kesulitan mendapatkannya.

Kesenjangan itu menunjukkan perlunya kolaborasi global demi memperbaiki kondisi dunia yang saling terhubung. ■



**Nilai-nilai besar  
yang sebelumnya  
menyatukan berbagai  
kelompok dalam suatu  
sinkronisasi tidak lagi  
mampu menjamin  
adanya keselarasan.”**

**F. Budi Hardiman**

Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Pelita Harapan

# 4 Menyikapi Benturan dan Sinkronisasi Nilai dalam Masyarakat

---

---

**F**RANSISCO Budi Hardiman, Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Pelita Harapan, mengungkapkan bahwa dalam membahas nilai-nilai, masyarakat perlu memahami sejarah di baliknya. Mengapa terjadi benturan nilai? Mengapa pula ada proses sinkronisasi nilai dalam perjalanan sejarah?

Menurut dia, benturan nilai sering muncul sebagai hasil dari proses modernisasi yang kemudian diserap oleh sistem-sistem besar, seperti kapitalisme. Kapitalisme, sebagai suatu sistem, lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai-nilai yang bersifat regional atau sektarian.

Begitu pula dengan liberalisme, yang pernah menjadi universal, mendorong globalisasi dan kosmopolitanisme yang kini mere-

sap dalam masyarakat global.

Jika kita menilik perkembangan di abad ke-20, dapat dilihat bahwa liberalisme dan kapitalisme telah mencapai suatu prestasi besar dengan menguniversalkan nilai-nilai tersebut ke berbagai kebudayaan dan masyarakat.

Namun, cerita sejarah mengenai nilai-nilai ini sebenarnya adalah kisah tentang pemekaran dan penyempitan nilai. Globalisasi yang didorong oleh nilai-nilai universal yang terbuka, toleran, pro kebebasan, dan pro kesetaraan, sering kali dipandang sebagai ancaman yang menghilangkan identitas lokal.

Menurut Budi Hardiman, inilah yang kemudian mendorong gerakan-gerakan antiglobalisasi, regionalisasi, dan primordialisme.

Samuel P. Huntington, seorang pemikir terkenal, mengemukakan gagasan mengenai benturan antarperadaban yang muncul pasca-Perang Dingin. Di era tersebut, kerangka nilai-nilai besar yang sebelumnya menyatukan berbagai kelompok dalam suatu sinkronisasi tidak lagi mampu menjamin adanya keselarasan. Ini memunculkan potensi benturan budaya yang semakin tajam.

Dalam konteks Indonesia, kita menghadapi fenomena yang disebut sebagai entropi budaya, sebuah situasi di mana ketegangan antara globalisme dan antiglobalisme semakin meningkat. Antiglobalisme kini juga mewujud dalam bentuk fundamentalisasi politik, sektarianisme, dan politik identitas.

Jika dibayangkan sebagai suatu organisme hidup, Indonesia

saat ini tengah mengalami sakit. “Proses entropi ini merujuk pada kecenderungan suatu tatanan untuk runtuh, dan hal ini terjadi dalam tatanan nilai kita,” kata Budi Hardiman.

Krisis nilai ini mengakibatkan gesekan-gesekan yang sulit untuk disinkronkan. Lalu di mana letak krisis ini? Menurut Budi Hardiman, ada dua area utama yang menjadi lokasi entropi di Indonesia. Pertama, di bidang agama dan ideologi. Kedua, di bidang hukum dan politik. Selain itu, fenomena tersebut semakin diperburuk oleh perkembangan komunikasi digital yang tidak terkendali.

### **Pelemahan Pancasila**

Ia melanjutkan, pelemahan ideologi Pancasila sebagai dasar negara menjadi masalah serius yang kini dihadapi bangsa ini. Berbagai data menunjukkan adanya radikalisasi yang menjangkiti berbagai sektor, dari pegawai negeri, sekolah, hingga kampus. Intoleransi agama pun kian meningkat, dengan munculnya konflik mengenai pendirian rumah ibadah, larangan ibadah, bahkan pembubaran ibadah.

Konflik identitas, seperti yang baru-baru ini terjadi terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semakin memperburuk situasi. Di sisi lain, politik identitas kian merajalela menjelang pilkada dan pilpres, dengan munculnya demagogi yang bernuansa politik identitas.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa ada krisis dalam

kerangka besar di negara ini. Pancasila, sebagai ideologi negara, kini menghadapi tantangan besar. Hal serupa juga terjadi dengan ideologi besar lainnya, seperti liberalisme, kapitalisme, dan globalisme, yang semakin dipertanyakan oleh gerakan-gerakan kecil yang lebih spesifik.

Di bidang politik dan hukum, misalnya, “Saya melihat adanya krisis dalam praktik politik deliberatif dan hukum demokratis yang belum maksimal disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Budi Hardiman. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, tambahnya, sering disalahpahami sebagai kebebasan untuk membenci, yang mengarah pada polarisasi sosial.

Dalam praktik politik, terdapat dua filosofi yang kerap digunakan oleh para politisi: politik Republikan dan politik Machiavellian. Politik Republikan mengutamakan kesejahteraan dan keharmonisan sosial, dengan tujuan bersama untuk mencapai kebaikan umum.

Sebaliknya, politik Machiavellian lebih cenderung pada perpecahan dan manipulasi demi keuntungan pribadi, memanfaatkan kelemahan lawan untuk meraih kekuasaan. Saat ini, politik Machiavellian semakin menguat di masyarakat, menggusur politik yang lebih mengedepankan kebersamaan.

Di sisi hukum, banyak sekali kasus tebang pilih yang terjadi, dengan keputusan-keputusan hukum yang lebih mempertimbangkan kepentingan politik ketimbang keadilan. Hal itu merugikan solidaritas sosial dan memperburuk ketimpangan, yang mencip-

takan ketegangan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Oligarki dan politik identitas kian meresap dalam struktur negara kita, memperburuk suasana sosial dan politik. Lebih ironis lagi, fungsi intelijen yang seharusnya menjaga stabilitas dan keamanan negara justru melemah karena kebocoran informasi. Misalnya, upaya untuk menertibkan masjid-masjid yang diduga terlibat dalam radikalisasi, yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati, malah dibuka secara besar-besaran ke publik. Hal itu justru memperburuk keadaan dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat.

### **Komunikasi dan Media Sosial**

Kebebasan komunikasi yang berkembang pesat di media sosial, disebut Budi Hardiman, juga berkontribusi pada perpecahan sosial. Tanpa diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan keadaban publik, media sosial justru menjadi alat untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan teori konspirasi. “Polarisasi politik yang semakin tajam, yang kita lihat sejak Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres, memperburuk keadaan,” ujarnya.

Sentimentalitas politik yang mengarah pada pembelahan bangsa bahkan merembet hingga ke dalam keluarga. Demagogi, *post-truth*, dan isu antivaksinasi masih menjadi topik yang terus mengemuka. Di sisi lain, teori-teori konspirasi tentang elite yang terlibat dalam pemindahan ibu kota semakin berkembang.

Oposisi politik yang seharusnya dikelola dengan sehat dan

lembaga yang tepat, kini justru mengalir bebas ke media sosial. Libido berposisi yang tidak dilembagakan dan tidak disublimasikan dalam bentuk sistem oposisi yang sehat justru menambah kerusakan dalam iklim politik negeri ini.

### **Menghadapi Tantangan Global**

Lebih jauh Budi Hardiman mengungkapkan bahwa sebagai bangsa, Indonesia perlu lebih waspada terhadap pengaruh kekuasaan asing. Dengan kondisi negeri ini yang memiliki kekayaan alam luar biasa, negara-negara besar yang membutuhkan sumber daya alam, bahan mentah dari Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memecah belah bangsa ini.

“Jika tidak bersatu, Indonesia tidak akan bisa maju sebagai suatu bangsa,” tegasnya seraya mengingatkan bahwa kepentingan asing bisa datang dari berbagai negara besar yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Jika terdapat entropi dalam suatu sistem, harus ada negentropi untuk menyeimbangkan keadaan. Entropi menggambarkan kekacauan, kompleksitas yang tak terkendali, dan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Sebaliknya, negentropi adalah pengurangan kompleksitas dan upaya untuk menguatkan sistem. Dalam hal ini, masyarakat perlu memperkuat sistem sosial, budaya, dan politik untuk mengurangi kekacauan yang terjadi.

Budi Hardiman mengungkapkan pentingnya penguatan sistem dalam menghadapi tantangan global. Pancasila sejak kela-

hirannya sudah mengandung fusi horizon, yakni penyatuan nilai-nilai kultural, politis, dan religius. Nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam Pancasila untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara, tetapi juga sebuah sistem yang mengakomodasi keragaman nilai-nilai yang ada di Indonesia.

Bahkan, imbuh Budi Hardiman, seorang penulis Prancis menyebut Indonesia sebagai sebuah peradaban yang serupa dengan peradaban Mediterania, di mana berbagai budaya dan nilai luhur yang sangat khas bisa bersatu dan saling memahami satu sama lain.

Menurut Budi Hardiman, revolusi mental yang diperlukan di Indonesia haruslah bersumber dari nilai-nilai yang majemuk dalam masyarakat Indonesia. Pancasila lebih bersifat komunitarian daripada liberal. Pancasila mengedepankan kepentingan bersama dan kebersamaan, bukan hanya individualisme yang seringkali berkembang dalam sistem liberal.

Diingatkan, “Jika terlalu fokus pada aspek ekonomi, bangsa ini bisa jatuh ke dalam liberalisme yang berlebihan. Sebaliknya, jika terfokus pada birokrasi dan kontrol negara, bangsa ini bisa terjebak dalam otoritarianisme, seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru.”

Maka dari itu, ia menawarkan empat rekomendasi praktis untuk memperkuat kebangsaan Indonesia. Pertama, perlu digelar dialog restoratif. Banyak generasi muda, bahkan mahasiswa, yang

tidak tahu atau melupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, seperti tragedi 1965.

Sejarah itu penting untuk dipahami agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dialog restoratif bertujuan memulihkan kembali komitmen kebangsaan di berbagai level, baik lokal maupun nasional. Bentuknya bisa berupa forum-forum diskusi, kongres, atau musyawarah di tingkat lokal. Penting untuk membicarakan masalah kebangsaan, bukan hanya ekonomi atau politik sehari-hari, tetapi juga bagaimana bangsa ini membangun komitmen bersama.

Kedua, Budi Hardiman menyarankan agar bangsa ini memperkuat politik deliberatif dengan membuka lebih banyak kanal komunikasi publik. Legislatif dan hukum harus berfungsi membatasi oligarki yang merusak tatanan ekonomi dan politik. Hal itu penting agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang yang menguasai sumber daya dan mengambil keuntungan pribadi dari sistem yang ada.

Ketiga, bangsa ini harus menyosialisasikan etika komunikasi digital, terutama di bidang pendidikan dan media. Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam sosialisasi nilai-nilai di masyarakat. “Namun, jika kita tidak waspada, media sosial bisa menjadi alat yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Meskipun ada sisi positif di media sosial, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang salah, hoaks, dan ujaran kebencian,” tegasnya.

Jika tidak berhati-hati, generasi muda bisa terjerumus dalam dampak negatif dari penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka dapat memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Keempat, diskusikan kemungkinan institusionalisasi oposisi. Saat ini, meskipun secara *de facto* sudah ada oposisi dalam masyarakat, sistem oposisi yang sehat belum terbentuk secara sistemik. Oposisi yang tersebar dan bergerilya tanpa sistem yang jelas justru bisa mengarah pada perpecahan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur oposisi dalam sebuah sistem yang memiliki mekanisme *check and balance* yang terkendali.

Sistem ini juga memungkinkan moderasi dari komponen-komponen oposisi yang lebih radikal, yang jika dibiarkan bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Oposisi yang sehat akan memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi dan keberagaman di Indonesia.

Akhirnya, Budi Hardiman menekankan pentingnya melatih sikap beroposisi dengan benar. Dalam sebuah sistem yang demokratis, beroposisi haruslah sesuai dengan aturan main yang berlaku, dengan menjaga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Reproduksi nilai *fairness* dalam beroposisi akan memperkuat sistem politik dan sosial, mengurangi ketegangan, dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga dengan baik. ■



Perlu mengembalikan  
partai politik sebagai  
wakil sejati rakyat,  
bukan sekadar kekuatan  
yang memperburuk  
ketimpangan dan  
merusak nilai-nilai  
kebangsaan yang  
telah terbentuk.”

**Komaruddin Hidayat**

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia

# 5 **Kembalikan Partai Politik sebagai Wakil Sejati Rakyat**

---

---

**R**EKTOR Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat, mencoba memberikan gambaran kritis terhadap perkembangan nilai-nilai dalam sejarah dan politik Indonesia. Meskipun optimistis terhadap proses sejarah yang akan mencapai titik keseimbangan, ia menyadari bahwa tantangan besar muncul dari ketegangan antara identitas lokal dan nasional, juga pengaruh kuat oligarki dan sentimen agama dalam politik.

Dalam konteks ini, menurut Komaruddin, penting bagi lembaga-lembaga demokrasi dan partai politik untuk kembali berkomitmen pada nilai-nilai yang mendasari pembentukan bangsa Indonesia, yaitu persatuan dalam keragaman, keadilan, dan kese-

jahteraan rakyat. Ke depan, diperlukan upaya untuk mengembalikan partai politik sebagai wakil sejati dari rakyat, bukan sekadar kekuatan yang memperburuk ketimpangan dan merusak nilai-nilai kebangsaan yang telah terbentuk.

Komaruddin juga mengungkapkan pandangannya yang optimistis tentang perjalanan sejarah, meskipun disadarinya bahwa terkadang sejarah terlihat seolah-olah berjalan dalam pola yang kacau dan semrawut. Baginya, sejarah merupakan sebuah proses yang memiliki mekanisme *self-correction*, di mana ketika terjadi penyimpangan, sejarah akan memperbaiki dirinya sendiri.

Meskipun pada titik tertentu bangsa ini berada dalam sebuah tikungan sejarah yang penuh kebingungan, ia yakin bahwa pada akhirnya sejarah akan menemukan titik keseimbangan atau ekuilibrium.

Ia menyoroti beberapa wilayah atau domain yang memengaruhi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ada empat domain utama yang berperan besar dalam membentuk nilai-nilai tersebut, yakni masyarakat itu sendiri, negara, pemerintahan, dan lembaga-lembaga demokrasi. Keempat domain itu, disebut Komaruddin, saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam membentuk nilai-nilai yang ada pada suatu bangsa.

Menurut dia, Indonesia memiliki aset nilai-nilai yang sangat kaya. Namun, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, cara pembentukan nilai di kedua negara ini berbeda. Di Amerika, orang-orang datang bersama untuk membangun cita-cita dan

mimpi-mimpi mereka, menciptakan rumah bersama atas dasar kesamaan demokrasi. Nilai-nilai kewarganegaraan (*citizenship*) dibangun oleh masyarakat plural yang ingin melepaskan diri dari penindasan di Eropa dan mencari kedamaian setelah perang saudara.

Adapun di Indonesia, nilai-nilai tersebut terbentuk dalam konteks yang berbeda. “Ketika berbicara tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang beragam, harus diakui bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah keluar dari rumah mereka sendiri,” katanya.

Konkretnya, setiap kelompok etnis tetap mempertahankan identitasnya, seperti orang Aceh, Bali, atau Jawa, yang tetap memandang Indonesia dari perspektif lokal masing-masing.

Ia memberikan contoh bahwa bagi orangtuanya, ketika menyebut Indonesia, yang ada dalam benak mereka ialah Jawa, dengan bahasa, tradisi, dan makanan yang khas. Meskipun ada perkembangan menuju penguatan identitas kebangsaan Indonesia, banyak orang masih lebih terikat pada tradisi, suku, dan agama mereka.

Namun, ia melihat bahwa generasi muda saat ini mulai mengarah pada identitas yang lebih nasional, yang merupakan hasil dari perkawinan lintas etnis. Sayangnya, perkawinan lintas agama masih sangat jarang. Meskipun etnisitas mulai kendur, identitas agama justru semakin menguat, terlebih lagi ketika politik desentralisasi yang liberal memberi ruang bagi agama untuk men-

jadi identitas politik. Agama menjadi lebih kental sebagai simbol identitas politik, bukan sebagai penghayatan spiritual yang mendalam.

Dalam konteks politik, Komaruddin mengidentifikasi dua kekuatan utama yang memengaruhi kehidupan politik Indonesia. Pertama, kekuatan uang yang dikendalikan oleh oligarki. Kedua, sentimen agama yang sering kali dimanipulasi untuk tujuan politik. “Ketika sentimen agama dan kekuatan modal oligarki bertemu, keduanya menciptakan sebuah aset besar yang memungkinkan mereka untuk menguasai ruang-ruang pemerintahan melalui lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik,” ujarnya.

Hal itu mengundang pertanyaan penting, apakah lembaga-lembaga demokrasi, termasuk partai politik, benar-benar berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, atau justru lembaga-lembaga inilah yang merusak nilai-nilai tersebut.

Menurut Komaruddin, masalah utama bukanlah masyarakat yang merusak nilai-nilai, tetapi lembaga-lembaga yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjaga suara rakyat. Saat ini, kesan yang muncul ialah bahwa partai politik tidak lagi mewakili suara rakyat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, partai-partai politik sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang koruptif, di mana suara rakyat dapat dibeli dan aspirasinya tidak lagi dihargai.

Komaruddin menambahkan, pernyataan yang sering menjadi

pertanyaan ialah ketika pemerintah justru menjadi perpanjangan tangan dari partai politik, padahal komitmen partai politik itu sendiri bisa dipertanyakan terhadap nilai-nilai yang telah disepakati.

Di sini, negara tampaknya telah diambil alih oleh pemerintah, dan pemerintah itu sendiri terbentuk melalui partai politik. “Namun, beruntunglah kita, karena dalam masyarakat Indonesia masih ada ormas-ormas yang bergerak di level masyarakat. Sebut saja Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta lembaga-lembaga Kristen yang aktif dalam bidang pendidikan dan budaya,” ujarnya.

Menurut Komaruddin, pilar-pilar dari ormas-ormas itu sangat penting dalam menjaga nilai-nilai tersebut.

Setelah kemerdekaan, tujuan dari perjuangan rakyat ialah mewujudkan kewajiban negara terhadap kesejahteraan rakyat. Betapa sengsaranya masyarakat yang hidup tanpa negara, seperti yang dapat disaksikan di Palestina atau Afghanistan yang sedang dilanda kekacauan.

Komaruddin mengatakan Indonesia adalah negara yang tetap bertahan hingga kini. “Namun, ketika berbicara tentang Indonesia, seharusnya merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam Pancasila.”

Dari cita-cita itu lahir alasan mengapa bangsa ini sepakat membangun Indonesia bersama-sama. Diakui, sangat jelas terlihat bahwa saat ini ada ketimpangan dalam pemahaman dan

penerapan nilai-nilai tersebut. Indonesia tidak dibangun atas dasar kesamaan ras, agama, atau bahasa. Masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, meskipun unsur-unsur bahasa Indonesia berasal dari Melayu.

“Jika berbicara dalam konteks politik, orang Malaysia sering mengungkapkan bahwa dalam forum-forum internasional, mereka merasa seperti ‘kepala naga’ berada di Malaysia, sedangkan ‘ekor’ dari naga itu ada di Kalimantan dan Sumatra,” tutur Komaruddin.

Jika pandangan itu terus berkembang, tambahannya, akan timbul perasaan tidak nyaman, terutama bagi orang-orang Indonesia bagian timur yang merasa tidak terhubung dengan konsep Melayu tersebut.

Selain itu, Indonesia tidak dibangun berdasarkan ras karena ras yang dominan di Indonesia ialah Jawa. Meskipun demikian, sisa-sisa etnisitas tersebut masih terasa kuat. Misalnya, masih ada anggapan bahwa seseorang yang bukan orang Jawa atau bukan muslim, maka akan sulit untuk menjadi presiden. Hal itu menunjukkan betapa kuatnya memori sosial yang ada, dan hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.

Lantas, bagaimana dengan Pancasila? Komaruddin menegaskan Pancasila seharusnya menjadi pendorong utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa perlu disebutkan secara eksplisit, seharusnya semua departemen dan lembaga negara mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila-

la. Pancasila seharusnya menjadi acuan dalam menilai kinerja pemerintah, seperti bupati, wali kota, atau presiden, apakah mereka benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan mereka?

“Saya pribadi merasa sedih karena jaminan terhadap nilai-nilai dan cita-cita kebangsaan semakin menjauh. Saya agak pesimistis, meskipun dalam jangka panjang Indonesia mungkin akan membaik,” tukasnya.

Namun, di saat-saat seperti sekarang, bangsa ini harus menghadapi kenyataan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai kemajuan itu sangat besar. Komaruddin kembali menegaskan negeri ini beruntung memiliki kekuatan sosial yang sangat kaya dan solid. Jika dikelola dengan baik, kekuatan sosial ini bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran yang sangat penting. Tanpa dukungan dari mereka, seseorang yang ingin menjadi pemimpin mungkin tidak akan terpilih. Oleh karena itu, ormas-ormas ini seharusnya menjadi forum untuk menyampaikan ide-ide dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, ketika ide-ide tersebut hanya diputuskan di Senayan (parlemen), “Saya tidak terlalu percaya bahwa hal itu akan membawa perubahan yang signifikan,” demikian Komaruddin. ■



Tiga tantangan besar yang harus dihadapi dalam revolusi mental, yaitu krisis integritas, penguatan etos kerja, dan kreativitas yang berdaya saing.”

**Muhadjir Effendy**

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

# 6 Tantangan dan Harapan Revolusi Mental

---

---

**M**ENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, sebagai Menko PMK, ia memang bertanggung jawab atas implementasi gerakan nasional revolusi mental.

Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikonsepskan? “Saya masih terus mencari format yang benar-benar sesuai untuk mencapainya,” kata Muhadjir.

Menurut dia, ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi dalam revolusi mental, yaitu krisis integritas, penguatan etos kerja, dan kreativitas yang berdaya saing. “Semuanya harus didukung oleh budaya gotong royong.”

Menko PMK menjelaskan, budaya gotong royong sendiri, jika merujuk pada pendapat Bung Karno, merupakan saripati dari Pancasila. Dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang sejalan dengan kelima sila Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Gotong royong bukan hanya soal kerja sama, tetapi juga tentang motivasi beribadah dan nilai-nilai profetik yang terkandung di dalamnya.

Sasaran revolusi mental, jelas Muhadjir, sebetulnya sangat holistik, mencakup seluruh perjalanan siklus kehidupan manusia Indonesia, dari awal kehidupan hingga lansia.

Ada berbagai intervensi yang diterapkan pada setiap tahap kehidupan, mulai gerakan masyarakat sehat, jaminan sosial nasional, bantuan sosial, revolusi mental itu sendiri, sampai pembangunan kebudayaan dan penanggulangan bencana.

Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah perhatian terhadap penyandang disabilitas. Disabilitas tidak mengenal usia maupun strata sosial sehingga peran serta masyarakat dalam hal ini sangat penting.

Muhadjir mengatakan, pada setiap etape kehidupan, intervensi yang diberikan harus disesuaikan. Sebagai contoh, pada 1.000 hari pertama kehidupan, fokus utama ialah penurunan angka *stunting*. Target yang diberikan oleh Presiden ialah mencapai angka *stunting* 14% di 2024. Adapun saat ini angka *stunting* masih 24,4%.

Dalam dua tahun pandemi, penurunan angka *stunting* hanya 1,7% per tahun, padahal target kita ialah 2,7% per tahun. Itu berarti ada kekurangan 1% dari target. “Kita berharap pandemi covid-19 bisa segera berakhir pada 2022 sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dan meningkatkan penurunan angka *stunting* menjadi 3% per tahun untuk mencapai target 14% pada 2024,” ujar Muhadjir.

Ia menambahkan, pandemi covid-19 yang datang dan pergi sebetulnya juga memberikan peluang untuk menjadikan revolusi mental sebagai gerakan nasional untuk semua lapisan masyarakat. Pendekatan *pentahelix* yang melibatkan lima elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, akan menjadi kunci dalam mendorong perubahan ini.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 untuk penanganan *stunting*, yang kini berada di bawah tanggung jawab BKKBN, bukan lagi Kementerian Kesehatan, karena merupakan bagian dari pembangunan negara yang lebih luas.

Saat ini Indonesia, menurut Muhadjir, berada di titik kritis terkait dengan SDM yang memasuki usia produktif. Mereka harus siap memasuki dunia kerja sehingga memerlukan kesiapan, dari sisi lapangan pekerjaan ataupun kualifikasi yang dibutuhkan, baik bagi mereka yang lulus dari SMA/SMK maupun perguruan tinggi.

Pembangunan SDM di Indonesia sudah menunjukkan arah

yang luar biasa dalam visi Presiden Jokowi. Pada awal masa kepemimpinan Presiden, jumlah taman kanak-kanak (TK) di Indonesia tidak lebih dari 30.000, dan sebagian besar dimiliki oleh sektor swasta. Kini, dengan adanya berbagai kebijakan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, diharapkan Indonesia dapat terus berkembang, menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

### **Hargai Mereka Nun Jauh di Sana**

Dalam menanggapi para pembicara, Henny Supolo Sitepu dari Yayasan Cahaya Guru menggarisbawahi apa yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bahwa saatnya bangsa ini, khususnya para elite, untuk memanusiakan manusia.

“Sebetulnya ketika bicara tentang nilai-nilai, maka sesungguhnya ini adalah upaya untuk memanusiakan manusia,” kata Henny.

Konsekuensinya, tambah Henny mengutip apa yang sudah disampaikan Alissa Wahid, para pemimpin negeri ini harus siap menghadapi fakta brutal. Pemimpin tidak cukup memulai dengan visinya semata-mata, tetapi sekaligus mengajak pula semua untuk menghadapi fakta brutal berikut implikasi-implikasinya.

Fakta brutal adalah fakta yang harus dihadapi secara langsung. Konsep itu dikenal sebagai *paradoks stockdale*, yang menyatakan bahwa pemimpin hebat harus mampu menggabungkan keyakinan dengan fakta yang ada di hadapannya. Fakta adalah infor-

masi yang dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat objektif. Fakta dapat diperoleh melalui indra manusia atau data keadaan nyata yang telah terbukti.

Apa fakta brutal yang kini terjadi di Indonesia? Mengacu pada hasil survei yang dilakukan Nenilai, Henny menjelaskan, ada gap besar antara nilai pribadi dan nilai-nilai yang saat ini terjadi di masyarakat. Nilai pribadi menunjukkan bahwa manusia Indonesia peduli dengan hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab, adil, dapat dipercaya, dan hidup sederhana. Akan tetapi, faktanya dalam kehidupan nyata, korupsi atau perilaku koruptif terjadi di mana-mana. “Korupsi seharusnya tidak ada saat nilai-nilai pribadi dijunjung tinggi,” tutur Henny.

Mayoritas masyarakat menjunjung tinggi nilai adil dan keadilan serta pentingnya menjunjung hak asasi manusia. Namun, fakta yang terjadi sekarang masih ada praktik diskriminasi berdasarkan SARA.

### **Pelajaran dari Maluku**

Henny Supolo juga menyampaikan pandangannya mengenai kelemahan dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dia berpendapat, ketika berbicara tentang nilai, yang dimaksud ialah kesadaran yang harus tumbuh secara reflektif dalam kegiatan sehari-hari.

“Pertanyaannya ialah, apakah kita mau meluangkan waktu untuk belajar secara reflektif dari hal-hal yang sudah kita laku-

kan,” ujarnya.

Henny menekankan pentingnya pembelajaran reflektif dalam mengajarkan sejarah. Bukan sekadar menghafal nama-nama tokoh atau tahun-tahun penting, tetapi juga bagaimana belajar dari peristiwa yang terjadi dalam sejarah.

“Belajar reflektif dari sejarah adalah hal yang harus dilakukan untuk memahami perspektif orang-orang yang selamat dari peristiwa tersebut,” tambahnya.

Salah satu contoh inspiratif yang disampaikan Henny ialah kejadian di Maluku, khususnya di daerah Sawai. Pada periode konflik 1999 hingga 2004, daerah tersebut selamat dari aksi kekerasan berkat peran seorang kepala sekolah dan seorang guru yang mengajak masyarakat untuk saling merangkul dan berjanji hidup bersaudara. Masyarakat yang beragam, baik Muslim maupun Kristen, saling melindungi dan mengusir pihak yang berusaha memaksa warga untuk meninggalkan kampung mereka.

Henny juga mengangkat kisah dua sekolah di Maluku, yakni SMP Negeri 4 di Salahutu dan SMP Negeri 9 di Lateri, yang tetap mempertahankan prinsip persaudaraan meski mayoritas muridnya bukan berasal dari agama yang sama. Kedua sekolah itu menggunakan kearifan lokal dalam membangun ikatan persaudaraan di antara siswa-siswa dengan latar belakang agama yang berbeda. “Pernahkah kita mendengar tentang kisah ini? Apakah kita pernah membantu untuk mewartakannya?” ungkap Henny.

Di samping itu, Henny menyoroti peran penting guru dalam

membangun kesadaran sosial. Dia memberi contoh tentang ‘ma-mama’ dari Ambon dan Serang yang berkumpul setiap minggu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mereka bukan hanya berbagi cara mengajar anak tanpa perangkat digital, tetapi juga cara melibatkan anak-anak dalam ketahanan pangan dan kesehatan. Meski berasal dari kalangan yang sederhana, mereka memiliki semangat luar biasa dalam mengembangkan ketahanan sosial di tengah keterbatasan.

Mengakhiri pernyataannya, Henny mengajak untuk lebih menghargai harapan-harapan positif yang ada di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jarang terdengar suaranya. “Kita harus mampu mendengarkan dengan aktif dan memberi ruang bagi mereka yang tidak memiliki akses atau jaringan untuk menyuarakan pendapatnya,” tandasnya.

Dengan mendengarkan dan saling menguatkan, bangsa ini dapat memperbaiki keadaan dan membangun kembali budaya persaudaraan yang kuat dalam menuju masa depan yang lebih baik.

“Melalui refleksi aktif, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh dan menguatkan kehidupan sosial kita. Mari bersama-sama menuju perbaikan, saling menguatkan, dan menciptakan budaya yang lebih baik,” tukas Henny. ■



**Evaluasi terhadap sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk distribusi anggaran pendidikan.”**

**Ahmad Baedowi**

Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa

# 7

## Pendidikan adalah Kunci

---

---

**D**IREKTUR Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa, Ahmad Baedowi, menyoroti survei yang dilakukan Nenilai bahwa nilai entropi masyarakat Indonesia yang di atas 40% memang berada di titik kritis.

Baedowi menyebut hasil survei Nenilai tersebut menggambarkan itulah produk dari sistem pendidikan di Indonesia 40 tahun terakhir. Ia menemukan sebuah buku lama karya Thomas Lickona yang berjudul *Educating for Character*. Dalam buku itu, Lickona menyebutkan ada 10 tanda kehancuran negara. Salah satunya yang sangat mengganggu ialah adanya penurunan nilai-nilai yang sebelumnya dihargai.

Jika diperhatikan, tanda-tanda itu ternyata mulai terlihat di



DOK. FDD 12

Ahmad Baedowi saat berbicara dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 2 Februari 2022, dengan topik Peran Nilai dan Revolusi Mental Menuju Indonesia 2045.

Indonesia, dan masyarakat perlu bertanya, mengapa nilai-nilai tersebut semakin menghilang.

Lickona mengidentifikasi beberapa indikator yang bisa menjadi tanda kehancuran suatu negara, di antaranya meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Jika hal itu terjadi, ini salah satu tanda bahwa negara sedang menuju kehancuran.

Selain itu, ketidakjujuran yang semakin membudaya juga menjadi masalah yang sangat serius. Fanatisme yang berlebihan, lemahnya rasa hormat terhadap orangtua dan guru, serta semakin kaburnya perbedaan antara baik dan buruk adalah beberapa hal yang menunjukkan pula terjadinya pergeseran nilai yang be-

sar dalam masyarakat kita.

Lebih jauh lagi, menurut Baedowi, penggunaan bahasa yang kian kasar dan tidak sopan pun memperburuk situasi. Itu semua merupakan gejala yang mencerminkan masalah besar dalam nilai-nilai yang ada di masyarakat.

“Jika dilihat lebih dekat, tampaknya negara belum cukup berhasil menangani masalah-masalah ini, yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, partai politik, dan bahkan kepada negara itu sendiri,” ujar Baedowi.

Dia mengingatkan, pendidikan menjadi kunci dalam upaya mengatasi masalah ini. Salah satu hal yang harus difokuskan ialah bagaimana menginstitusikan nilai-nilai yang baik ke dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, evaluasi terhadap sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk distribusi anggaran pendidikan. Banyak masalah yang terjadi, seperti bantuan operasional sekolah yang sering kali disunat hingga penyalahgunaan dana-dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan.

Tentu saja itu menghambat tercapainya revolusi mental yang didambakan karena akar masalahnya terletak pada ketidakjujuran dalam pengelolaan dana pendidikan. Revolusi mental bukan hanya tentang mengubah cara berpikir masyarakat, tetapi juga perbaikan dalam kebijakan publik dan tata kelola anggaran pendidikan.

“Jika ingin memastikan bahwa pendidikan kita dapat mem-

berikan dampak positif, perlu ada evaluasi yang ketat terhadap cara anggaran ini dialokasikan dan dikelola,” tegas Baedowi.

Selain itu, tambah Baedowi, peran legislator dalam sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak bisa dianggap remeh. Banyak legislator yang seharusnya bisa memberikan pengawasan yang lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik, tetapi kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak cukup peduli dengan detail kebijakan tersebut.

“Riset yang kami lakukan menunjukkan bahwa minat baca di kalangan anggota legislatif sangat rendah, bahkan kurang dari 20%. Hal itu sangat memprihatinkan, karena bagaimana mungkin para legislator dapat mengawasi dokumen-dokumen penting seperti RPJMD atau APBD jika mereka tidak membaca dan memahami dengan baik?” ungkap Baedowi.

Kesadaran dan daya kritis terhadap kebijakan publik harus ditanamkan pada setiap legislator. Mereka perlu tahu betul arah kebijakan yang diambil dan bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi masyarakat.

Sebagai contoh, Baedowi pernah meneliti tentang perbedaan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gorontalo dan program-program prioritas di enam kabupaten/kota di sana. Ternyata, hampir tidak ada kesamaan antara prioritas yang ada di RPJMD dan yang tercantum dalam APBD, yang membuat kebijakan tersebut tidak terarah dan tidak jelas. Masalah itu tentu saja berimbas pada pelayanan publik yang se-

makin buruk. Masyarakat merasa kian kesulitan menghadapi birokrasi yang rumit dan tidak efisien. “Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melakukan riset dan evaluasi terhadap kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Semua kebijakan yang ada harus diorientasikan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi formalitas administratif.

Dalam rangka mewujudkan perubahan yang nyata, menurut Baedowi, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pendidikan dan kebijakan publik yang ada. “Revolusi mental yang diharapkan hanya bisa tercapai jika bangsa ini berani melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang ada.”

### **Berpikir Jangka Pendek**

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan temuan mengejutkan dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga Nenilai. Survei Nenilai menunjukkan ada masalah besar dalam masyarakat: berpikir jangka pendek.

Menurut Saur, pola pikir itu sangat mengganggu dan menjadi salah satu penyebab utama banyak masalah di negara ini. Berpikir jangka pendek, kata Saur, berkontribusi pada keruntuhan demokrasi dan integritas. Hal itu juga menyebabkan orang cenderung ingin cepat kaya dengan mengambil jalan pintas, bahkan

terkadang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan tersebut. Semua itu adalah dampak dari kurangnya pemikiran jangka panjang dalam setiap tindakan.

Saur kemudian mempertanyakan apakah revolusi mental, yang menjadi fokus banyak kebijakan pemerintah, mampu mengubah pola pikir jangka pendek menjadi jangka panjang dalam waktu yang singkat.

Ia menduga bahwa perubahan besar ini tidak akan terjadi dengan mudah. Sebab, untuk menghasilkan perubahan yang mendalam, perlu langkah-langkah kecil yang berkelanjutan atau ‘mikroevolusi mental’ yang dimulai dari level individu.

Lebih lanjut, Saur menggali pertanyaan besar terkait dengan Pancasila, dasar negara Indonesia. Ia menekankan, sejauh ini belum ada tokoh yang bisa dianggap sebagai sosok yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Bahkan, jika ditanya apakah ada satu atau sepuluh tokoh yang mewakili nilai Pancasila, jawabannya sangat sulit ditemukan.

Saur mengutip perkataan Presiden Soekarno yang mengatakan, “Beri aku 10 pemuda, aku akan mengguncangkan dunia.” Saur juga merujuk pemikiran Profesor Komaruddin Hidayat yang mengatakan, “Beri aku kepala daerah yang Pancasila, aku akan mengubah Indonesia.”

Namun, menurut Saur, “Saat ini kita bahkan kesulitan menemukan satu tokoh seperti itu. Jika revolusi mental tidak mampu menghasilkan tokoh-tokoh yang benar-benar mencerminkan

nilai-nilai Pancasila, kita akan terjebak dalam pola pikir jangka pendek yang terus berulang.” ■



# IV

## Sinergi Strategi Pemberdayaan Pemuda 2023



# 1 Latar belakang: Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda

---

---

**P**EMUDA, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, perkiraan jumlah pemuda hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (24%).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menganggarkan program kepemudaan sebesar Rp151 miliar. Program kepemudaan pada 2023 diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP). Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga, IPP pada 2021 sebesar 53,33. Sebelumnya pada 2020, nilai IPP Indonesia sebe-



BRY

Pengunjung memperhatikan diorama Kongres II Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Jumat (28/10/2022).

sar 51,00. Adapun target nilai IPP Indonesia 2024 sebesar 57,67.

Pengukuran IPP terdiri dari lima domain, yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan dan kesejahteraan, 3) lapangan dan kesempatan kerja, 4) partisipasi dan kepemimpinan, serta 5) gender dan diskriminasi.

Hasil Susenas 2022 memperlihatkan sebesar 39,60% pemuda telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA), 23,38% memiliki keluhan kesehatan dengan 59,55%

pemuda memiliki jaminan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), sekitar 61,84% tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan 13,93% tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Berdasarkan lima domain IPP 2021, indeks pendidikan pemuda di angka 70, kesehatan dan kesejahteraan pemuda 60, lapangan dan kesempatan kerja pemuda 40, partisipasi dan kepemimpinan pemuda 43,33, serta gender dan diskriminasi pemuda di angka 53,33. ■



Visi global akan dunia yang inklusif dan setara bakal menjadi tanggung jawab serta dilanjutkan oleh generasi muda.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

# 2

## Tanggung Jawab Semua

---

---

**S**AAT membuka diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menggarisbawahi bahwa pemuda atau generasi muda adalah aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tidak bisa dimungkiri, visi global akan dunia yang inklusif dan setara bakal menjadi tanggung jawab dan dilanjutkan oleh generasi muda.

Survei Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 menunjukkan jumlah pemuda di Indonesia mencapai 24% dari total penduduk saat ini. Persebaran terbanyak masih berada di Pulau Jawa.

Menurut Lestari, ada permasalahan yang muncul dan harus diantisipasi sekaligus disikapi. Bukan hanya oleh para pemangku



Lestari Moerdijat memberikan pengantar dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Januari 2023, dengan topik Sinergi Strategi Pemberdayaan Pemuda 2023.

kepentingan dan pengambil kebijakan, melainkan juga para pemuda itu sendiri. “Kenapa? Pemuda memiliki banyak energi. Lalu, bagaimana energi itu dapat disalurkan, dimaksimalkan untuk dapat mendorong kemajuan pembangunan? Ketika itu tidak bisa terjadi, bisa menjadi beban bagi negara saat potensi tersebut tidak teroptimalkan,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Dalam perspektif sosiologi, identitas diri menjadi masalah dan pertanyaan, utamanya di kalangan anak pada usia-usia tertentu di saat mereka mulai menginjak usia dewasa muda. “Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan individu sering kali menjadi proyek refleksi berbasis pemilihan identitas, gaya hidup, serta tidak terlepas dari orientasi dan visi kehidupan yang dalam

hal ini harus terus dicermati. Kalau boleh, saya minta izin menggunakan kata ‘dikawal’ agar tidak lepas dari koridor falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Rerie.

Oleh karena itu, sinergi strategi pemberdayaan pemuda harus ditingkatkan untuk tidak hanya mendorong pemuda Indonesia pada sektor tertentu, tetapi lebih dari itu membuka seluas-luasnya semua kemungkinan termasuk membuka berbagai kanal yang ada agar mereka memiliki kemampuan dan dapat tegak berdiri di semua bidang kehidupan.

“Hal itu mengingat tantangan yang dihadapi ialah tantangan yang sangat kompleks, di mana kita berhadapan dengan berbagai dimensi dan dinamika global. Kita juga berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan dan skenario-skenario ekonomi terburuk, termasuk kondisi geopolitik,” ungkap Rerie.

Belum lagi berbagai situasi yang berhubungan dengan perubahan-perubahan tata kelola dan perpolitikan. Demikian pula dampak *climate changes* yang secara langsung sudah mulai terasa serta akan mengubah tata dan konstelasi dunia. “Di sini pemberdayaan pemuda tidak hanya menjadi tugas dan kewenangan kementerian/lembaga atau kepentingan tertentu, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.”

Rerie berharap diskusi yang berlangsung pada Rabu, 18 Januari 2023 ini dapat menghadirkan sebuah pemikiran baru, membentuk paradigma bersama, memperkaya semua agar pemberdayaan pemuda tidak hanya berpusat pada penggalian kete-

rampilan, tetapi juga pengembangan seluruh dimensi diri yang meliputi aspek kognitif dan afektif.

“Ketika bicara pemberdayaan pemuda di 2023, saya ingin mengajak kita semua kembali melihat sejarah perjuangan bangsa kita, yakni kemerdekaan Indonesia, yang diinisiasi oleh kaum pemuda. Raden Soetomo mendirikan Budi Utomo ketika usianya masih 20 tahun. Ki Hadjar Dewantara pada usia 19 tahun mendukung Budi Utomo khusus bergerak di bidang propaganda.”

Kemudian, ada Cipto Mangunkusumo yang di usia 20 tahun menulis kritik hubungan feodal dan kolonial. Sam Ratulangi baru berusia 24 tahun ketika berbicara mengenai pentingnya Indonesia bersatu. Pun, Muhammad Hatta, yang di usia 17 tahun sudah menjadi pengurus Jong Sumatera Bond di Batavia dengan menginisiasi perlunya Indonesia merdeka, serta Adam Malik yang di usia 20 tahun memelopori kantor berita *Antara*.

Di waktu lebih lampau, ada Sultan Hasanuddin yang di usia 22 tahun sudah diangkat menjadi Raja Gowa dan memimpin perlawanan terhadap kolonial.

“Dari catatan-catatan sejarah, begitu banyak anak muda yang mengambil peran secara nyata. Tak hanya berdiri tegak mengangkat senjata, tetapi juga memunculkan pikiran-pikiran besar dan pikiran-pikiran emas yang melahirkan dan menghadirkan Indonesia saat ini yang harus terus kita cintai,” ungkap Rerie. ■





**Ketika fokus dengan  
pembangunan  
kepemudaan,  
maka pada hakikatnya  
kita menanam  
kesuksesan dalam  
5-10 tahun ke depan.”**

**Asrorun Ni'am Sholeh**

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda  
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

# 3

## Pembangunan Kepemudaan

---

---

**M**ENYOROTI isu mengenai keberpihakan terhadap kepemudaan, khususnya dalam konteks wilayah pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan bahwa sebelumnya batasan usia pemuda diatur hingga 35 tahun. Namun, dalam penyusunan Undang-Undang 40/2009, terdapat kesadaran untuk mempercepat intervensi pada kalangan muda, terutama terkait dengan partisipasi pemuda.

“Dalam Undang-Undang 40/2009, isu utama yang diangkat ialah partisipasi pemuda. Semakin rendah (batas usia) diatur, semakin awal partisipasi pemuda didorong, yang tentu saja

akan berdampak positif dalam menyiapkan generasi muda untuk berkontribusi di berbagai bidang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Asrorun melanjutkan, usia pemuda yang sebelumnya ditetapkan 18 hingga 35 tahun, kemudian dipangkas menjadi 16 sampai 30 tahun. “Perubahan ini bertujuan mendorong partisipasi pemuda lebih awal demi kepentingan pembangunan generasi masa depan.”

Hal itu akan sangat terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, yakni bagaimana Indonesia memiliki sejarah sukses anak-anak muda di dalam mengambil peran publik. Namun, kondisi faktual hari ini penting untuk dijadikan introspeksi, sebagai mawas diri, sekaligus pijakan dalam mengakselerasi intervensi kepemudaan. “Termasuk dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang berpihak pada partisipasi anak muda secara lebih awal.”

Asrorun memberi contoh, di DPR RI, meskipun ada komitmen untuk percepatan dan intervensi, partisipasi anak muda di bidang sosial-politik masih cukup rendah, kalau tidak dibilang stagnan bahkan mundur, jika dibandingkan dengan sejarah keberperanan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia.

“Ketika kita fokus dengan pembangunan kepemudaan, maka pada hakikatnya kita menanam kesuksesan dalam 5-10 tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah merancang arah pembangunan nasional dengan menempatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagai prioritas,” ujar Asrorun.

Program prioritas tersebut, lanjutnya, kemudian diturunkan ke dalam Program Prioritas Kemenpora yang tiga di antaranya terkait langsung dengan pembangunan kepemudaan. Ketiganya ialah tata kelola, komitmen menumbuhkan semangat kewirausahaan, serta komitmen penguatan ideologi dan karakter. Secara lebih operasional, program prioritas tersebut kemudian diturunkan ke dalam proyek- proyek prioritas.

“Yang pertama terkait dengan komitmen untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan, yaitu melalui pelatihan kewirausahaan. Kedua, terkait dengan peningkatan kepeloporan dan jiwa sukarelawan di kalangan anak muda, itu berkaitan dengan partisipasi serta pembangunan karakter. Kemudian yang ketiga, peningkatan pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba,” ungkap Asrorun.

Yang terakhir, lanjut dia, lebih bersifat pencegahan serta penanganan hal-hal bersifat destruktif yang menghambat tumbuh kembang anak muda.

### **Pembangunan Karakter**

Lebih rinci mengenai proyek prioritas, Asrorun menyebut bahwa komitmen pembangunan karakter kebangsaan menjadi saka guru sekaligus fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bagaimana karakter itu menjadi hal yang bersifat mendasar untuk ditanamkan guna melompat lebih jauh dalam komitmen pembangunan nasional.”

Selanjutnya, mendorong partisipasi anak muda seoptimal mungkin di berbagai bidang seiring dengan era disruptif dan era digital yang menuntut kecepatan. “Kecepatan itu ada pada anak muda, baik secara fisik maupun ide dan gagasan di berbagai bidang,” ujar Asrorun.

Terkait dengan tema diskusi yakni tentang komitmen peningkatan indeks pembangunan kepemudaan, Asrorun mengatakan hal itu mencakup antara lain peningkatan kualitas pemuda dengan target yang jelas, juga inisiasi proyek untuk mengintervensi lokasi dengan capaian IPP yang rendah melalui peningkatan kebecerjaan, kewirausahaan, dan partisipasi pemuda. “Kemenpora bersama Bappenas dan BPS menyusun IPP. Data 2018, apabila dibandingkan dengan data 2015, menunjukkan kenaikan dalam domain pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja meskipun ada stagnasi pada domain partisipasi dan kepemimpinan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, penting untuk memberikan ruang bagi anak muda dalam pengambilan kebijakan publik, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga pelibatan mereka di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Adapun pelayanan kepemudaan dilaksanakan melalui tiga langkah, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang diarahkan untuk menghasilkan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, dan berkarakter.

Untuk mengintervensi dan menguatkan IPP yang telah

disusun, Kemenpora, khususnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, mengembangkan tiga hal inti dalam *Youth Development*, yaitu *leadership* (kepemimpinan), *pionering and voluntarism* (jiwa kepeloporan dan kesukarelawanan), serta *entrepreneurship* (kewirausahaan).

“Terkait dengan IPP, saya meninjau profil anggota DPR RI 2019-2024. Yang berusia di bawah 30 tahun, yang sesuai dengan definisi anak muda dalam UU 40/2009, dari 575 anggota, baru 1,2% yang berusia di bawah 30 tahun atau sekitar 7 orang. Itu berdasarkan data yang saya lihat dari Setjen DPR,” papar Asrorun.

Hal ini menunjukkan bahwa IPP memerlukan perhatian bersama. Untuk itu, Asrorun menilai, kegiatan diskusi ini sangat penting untuk mengoptimalkan peran sektoral dalam pemberdayaan pemuda demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

### **Tiga Klaster**

Pada tahap terakhir, Asrorun memaparkan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk menerjemahkan prioritas nasional, yakni menerjemahkan program dan proyek prioritas dalam konteks pemberdayaan serta pengembangan kepemudaan.

Yang pertama penguatan sisi *leadership*, identifikasi, dan aktualisasi potensi kepemimpinan. Hal itu didasarkan pada pandangan bahwa setiap anak muda memiliki potensi kepemimpinan. “Hanya saja, intervensi yang kemudian menyebabkan

apakah anak muda itu mampu mengaktualkan fungsi dan fitrah kepemimpinannya atau tidak?”

Dengan demikian, salah satu program utama ialah penelusuran, penumbuhan, dan pendampingan potensi kepemudaan agar dapat diaktualisasikan dan diarahkan demi kepentingan yang lebih produktif, bukan konsumtif. Dari sana, program dibagi dalam tiga klaster.

### **1. Kepemimpinan berbasis personal**

Dalam konteks era digital, kepemimpinan personal memiliki potensi untuk meng-*influence* lebih luas. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada konteks komunal atau kelompok, tetapi juga dapat memengaruhi ratusan ribu, bahkan jutaan orang hanya dari ruang pribadi melalui kreativitas dan inovasi. Karena itu, intervensi dalam pengembangan kepemimpinan berbasis personal dan kewirausahaan menjadi sangat penting.

### **2. Kepemimpinan berbasis rumah tangga**

Anak muda diharapkan menjadi bagian penting dalam penguatan kehidupan keluarga karena keluarga merupakan entitas terkecil yang membentuk masyarakat. Intervensi dalam pengembangan kepemimpinan di level rumah tangga sangat penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengatasi berbagai persoalan sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, dan pernikahan usia dini.

### 3. Kepemimpinan publik

Ini berfokus pada peran pemuda dalam ranah publik dan pengambilan keputusan yang lebih luas. Selain itu, terdapat kegiatan yang bertujuan menumbuhkan semangat kepeloporan dan voluntarisme di kalangan anak muda.

Terakhir, terkait dengan kewirausahaan anak muda, Kemenpora berfungsi sebagai koordinator lintas sektor untuk mengoptimalkan pengembangan kewirausahaan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemenpora menjadi konsolidator yang menghubungkan berbagai pihak perihal kewirausahaan pemuda.

Ada tiga langkah utama yang dikembangkan. Pertama, penumbuhan dan penelusuran minat, termasuk pemberian akses permodalan bagi anak muda yang sudah siap dan berkomitmen dalam mengembangkan kewirausahaan tapi terkendala oleh masalah permodalan. “Kemenpora bersama Kemenkop dan BUMN lainnya menyediakan dukungan permodalan untuk memulai usaha, terutama bagi *startup* muda yang membutuhkan,” ujar Asrorun.

Kedua, pendampingan dan pembiayaan sangat lunak. “Jadi, bukan *grant*, melainkan model pendampingan pembiayaan seperti ultramikro,” jelasnya.

Ketiga, fasilitas model Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana pemerintah mendorong seoptimal mungkin akses terhadap permodalan dengan memfasilitasi dan kemudahan-kemudahan. ■



Penanggung jawab urusan pemberdayaan kepemudaan telah diatur, yakni pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing.”

**Ratih Megasari Singkarru**

Anggota DPR RI dari  
Fraksi Partai NasDem  
Periode 2019-2024

# 4 PEMBERDAYAAN PEMUDA

---

---

**B**ERBICARA tentang strategi pemberdayaan pemuda, anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkaru menjelaskan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang 40/2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang telah mengamanatkan dan menjelaskan koridor-koridor yang perlu dibangun untuk mencapai pemberdayaan pemuda Indonesia yang optimal.

“Pemberdayaan pemuda, yang saya yakini juga merupakan bagian dari fungsi pelayanan kepemudaan, bertujuan mewujudkan pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan,” ungkapnya.

Dalam perspektif pemberdayaan, Ratih melanjutkan, berdasarkan amanat undang-undang didefinisikan sebagai kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Hal itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, pengetahuan, keterampilan diri, serta organisasi untuk kemandirian para pemuda.

Pelaksanaan pemberdayaan ini juga diatur dalam Pasal 25, yang menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain peningkatan iman dan takwa, pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara, ketahanan nasional, penguatan kemandirian ekonomi pemuda, serta peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda.

Penyusunan penelitian dan pendampingan kepemudaan juga menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan. Penanggung jawab urusan pemberdayaan kepemudaan telah diatur, yakni pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing.

“Namun, yang paling penting ialah partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi kepemudaan itu sendiri. Mereka ini sebenarnya yang memiliki andil sangat besar. Kalau bisa saya tegaskan kembali, sebenarnya untuk membangun pemuda Indonesia, semuanya sebenarnya perlu berjalan berkaitan, terpadu, dan terintegrasi dengan tetap memperhatikan pula kondisi potensi serta

karakteristik di daerah masing-masing,” tegas Ratih.

Merujuk pada RPJMN 2020-2024, target IPP pada 2024 ialah 57,67, meningkat dari 51,50 pada 2019. Salah satu arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMN ialah meningkatkan kualitas pemuda, yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran pemuda dalam dunia usaha, industri, dan masyarakat. Hal ini juga termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi yang positif bagi para pemuda.

Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam bidang sosial dan politik sangat penting, termasuk peran pemuda dalam forum-forum internasional, pertukaran pemuda, serta partisipasi dalam pelestarian lingkungan. “Isu lingkungan, terutama terkait perubahan iklim, saat ini sangat menjadi perhatian, tidak hanya dari generasi milenial, tetapi juga generasi Z. Pemuda kini semakin bersemangat menyuarakan isu-isu lingkungan, yang merupakan salah satu topik hangat di kalangan mereka,” ungkap Ratih.

Di samping itu, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda seperti kekerasan, perundungan (*bullying*), penyalahgunaan minuman keras, dan penyebaran penyakit, juga menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan. Arah kebijakan dan strategi ini juga diadopsi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, yang kemudian disusun lebih rinci untuk diimplementasikan.

Ada pula koordinasi lintas sektor untuk pelayanan kepemu-

daan yang sudah diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017. “Secara umum arah kebijakan dan strategi pemberdayaan kepemudaan itu tujuannya baik, untuk meningkatkan IPP yang memang merupakan tolok ukur dan meningkatkan kualitas pemuda, yang menurut saya sebenarnya sudah cukup jelas dan terencana,” ujar Ratih.

Demikian pula, di atas kertas, regulasi-regulasi dan perencanaan yang ada, dalam pandangan Ratih, sejatinya sudah menjadi bekal yang sangat cukup untuk bisa diformulasikan menjadi bentuk program ataupun kegiatan pemberdayaan pemuda yang lebih konkret lagi di lapangan. Hal itu mengingat sekarang ini terjadi pergeseran struktur umum penduduk yang membuat peran pemuda kian penting.

“Kita sedang dalam fase bonus demografi yang menuntut pemuda untuk bisa lebih kreatif, inovatif, produktif, juga memiliki kapasitas lebih agar bisa memiliki daya saing, baik di dalam negeri maupun kancah internasional,” ujar Ratih.

Pun, sebagai penduduk usia produktif dengan jumlah yang jauh lebih banyak, pemuda sebenarnya banyak dituntut untuk mampu membawa negara Indonesia memaksimalkan peluang bonus demografi tersebut. “Untuk itu, peningkatan kualitas pemuda memang menjadi salah satu agenda yang sangat strategis sekali dalam mempersiapkan generasi yang akan datang, generasi masa depan yang memang tangguh dalam pembangunan bangsa kita,” tukasnya.

Lalu, terkait IPP, memang sudah menjadi tolok ukur perkembangan kualitas pemuda Indonesia dari tahun ke tahun. “Tetapi setelah menelusuri hasil IPP 2021, jadi saya sempat *searching-searching* juga, saya mendapati beberapa hal yang lumayan menarik. Salah satunya terkait bagaimana urutan hasil IPP dari setiap provinsi,” ungkap Ratih.

Terlepas dari peringkat tiap-tiap provinsi terhadap IPP, Ratih melihat, masih ada perbedaan yang tinggi antarwilayah. Dengan begitu, ia berpandangan, strategi pembangunan pemuda dalam rangka meningkatkan kondisi kepemudaan di daerah harus berorientasi kuat pada domain-domain lemah dari capaian IPP wilayah masing-masing.

“Strategi tersebut sebenarnya bisa diterjemahkan dengan memperkuat basis pendidikan, khususnya di kalangan pemuda. Lalu, meningkatkan peluang kesejahteraan bagi pemuda, mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi para pemuda, dan yang pasti meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam segala bidang yang memang berorientasi menunjang pembangunan,” Ratih menyarankan.

Daerah yang masih dinilai lemah dalam domain tertentu, lanjutnya, sebenarnya dapat mengadopsi atau mengadaptasi pengalaman daerah yang memiliki kinerja domain lebih baik. Hal itu penting dilakukan sebagai upaya bagi otoritas pemangku kebijakan daerah melakukan evaluasi serta refleksi pada indikator-indikator yang memang masih dinilai lemah ataupun

yang belum menunjukkan hasil secara progresif.

“Tetapi, tentu yang masih harus kita perhatikan ialah bagaimana supaya pemerintah pusat dan daerah-daerah itu dapat bersinergi dalam menentukan kebijakan yang lebih kuat lagi dengan domain prioritas ataupun domain yang lebih utama. Jadi, sinergi di sini memang sangat penting. Dari situ juga penting untuk menjaga fleksibilitas pemerintah daerah agar dapat bergerak secara fleksibel menyesuaikan kondisi pemuda di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ratih mengemukakan beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan tiap-tiap domain dari IPP. “Misalnya, domain pendidikan, mungkin kita bisa mendorong program kebijakan pemerataan pendidikan kepada pemuda, juga meningkatkan koordinasi dengan elemen terkait untuk mengawal perkembangan kepemudaan,” ujarnya.

Lalu, pengembangan kesadaran orangtua untuk mengirim dan memberikan dukungan kepada anak-anaknya belajar sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Terkadang, di beberapa daerah, seperti di Sulawesi Barat yang merupakan daerah pemilihan Ratih, ada orangtua yang lebih memilih pasrah kepada nasib ketimbang menyekolahkan tinggi anaknya. “Lebih baik bantu orangtua saja untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi tidak ada motivasi dari para orangtua untuk sekolahkan anak setinggi-tingginya,” ungkap Ratih.

Berikutnya, dia menambahkan, meningkatkan peluang dan

kesempatan pemuda untuk mengenyam pendidikan pada level perguruan tinggi. “Itu juga sangat penting, jadi tidak setop hanya sampai di SMA atau SMK, tapi lanjut ke jenjang lebih tinggi lagi.”

Untuk itu, Ratih berpandangan mengenai pentingnya menyediakan beasiswa perguruan tinggi untuk meningkatkan kesempatan para pemuda. “Juga sangat penting untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil, termasuk pula penyebaran guru yang sangat belum merata, khususnya di daerah-daerah 3T.”

Ratih melanjutkan, selain kesehatan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesempatan kerja, domain gender dan diskriminasi juga penting untuk menekan jumlah pernikahan di bawah umur bagi perempuan. “Karena tadi, balik lagi, masih banyak kejadian di beberapa daerah, pernikahan di bawah umur. Akhirnya, orang-orang ini melahirkan anak-anak *stunting*. Jadi sebenarnya domain gender dan diskriminasi ini menurut saya juga penting, khususnya untuk menekan jumlah pernikahan di bawah umur,” tegas Ratih.

Penting pula untuk memperkuat koordinasi kelembagaan dalam menangani adanya kekerasan pada perempuan. Antara lain, dengan membuka ruang fasilitasi ataupun konsultasi bagi korban perempuan dan anak melalui kerja sama dengan instansi resmi, perusahaan, dan lembaga pendidikan dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan. “Lalu juga mendorong pemuda khususnya perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan seting-

gi-tingginya,” saran Ratih.

Yang tidak kalah penting, lanjutnya, ialah domain partisipasi dan kepemimpinan. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan partisipasi pemuda dalam forum pembangunan dengan memperkuat koordinasi dengan kelompok-kelompok pemuda. Selain itu, mengembangkan program yang menciptakan partisipasi aktif di kalangan pemuda dengan berbasis pada pertimbangan spasial atau wilayah.

“Demikian juga memperkuat koordinasi kelembagaan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda. Berikutnya ialah menciptakan *event* yang berbasis pada kebudayaan dalam mendorong partisipasi aktif pemuda di dalamnya. Tentu saja sebenarnya strategi-strategi ini ibaratnya generik dan *template*. Sebenarnya, balik lagi, semua itu kembali ke bagaimana tiap-tiap wilayah dalam menerapkannya serta sebaik apa sih koordinasi lintas sektornya, mulai dari pusat hingga ke wilayah, dalam menjalankan strategi-strategi tersebut.”

Lebih lanjut, Ratih berpandangan, setiap wilayah ada baiknya bisa berkaca pada hasil IPP dari setiap domain untuk kemudian dapat menentukan pendekatan apa yang paling efektif agar bisa meningkatkan IPP dan kualitas pemuda secara keseluruhan. “Kita kembali kepada apa sih pemberdayaan itu, juga yang dapat dipahami sebagai suatu ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multilevel. Lalu juga sebagai hasil dari interaksi individual, sosial, dan kolektif. Dalam arti yang lebih luas lagi, pem-

berdayaan bersandar pada sejumlah ragam indikator, seperti individu, keluarga, organisasi, dan komunitas, yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial,” ujarnya.

Kemudian, sambungnya, ekonomi dan politik yang bertujuan meningkatkan keadilan sosial yang berkualitas bagi kualitas hidup bangsa ini. Berangkat dari pemahaman tersebut, menurut Ratih, berbagai program pemberdayaan kepemudaan yang diformulasikan setidaknya memiliki dua fungsi utama.

Pertama, membangun kapasitas pribadi atau *capacity building*. Kedua, mengintegrasikan persepsi-persepsi kontrol dan pengendaliannya, pendekatan yang proaktif dalam kehidupan, dan pemahaman yang kritis dalam lingkungan sosial-politik.

“Pemberdayaan dalam level kolektif juga sangat berlaku di dalam keluarga, organisasi, dan komunitas, yang menurut saya, ini melibatkan proses dan sistem yang dapat meningkatkan keahlian ataupun kemampuan anggota-anggotanya. Demikian juga memfasilitasi mereka dalam upaya-upaya perubahan dan meningkatkan kesejahteraan kolektif serta memperkuat jaringan intra-mereka serta keorganisasian untuk memperkuat kualitas dan integrasi kolektif tersebut,” tutupnya. ■



Butuh peran pemerintah  
dan legislator untuk  
membuat regulasi  
yang berpihak kepada  
pengusaha muda atau  
pengusaha baru.”

**Akbar Himawan Buchari**

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan  
Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi)

# 5 Wirausaha Muda

---

---

**S**AAT membuka paparannya pada diskusi ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan, baru sekitar 16% perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki organisasi Hipmi. Atau, dari 4.400 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya sekitar 700 kampus di kota-kota besar yang memiliki organisasi Hipmi perguruan tinggi.

“Kita tahu bersama bahwa semua organisasi senat mahasiswa ada di kampus-kampus, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar sadar atau peduli terhadap pentingnya kewirausahaan. Belum semua kampus, bahkan belum sampai 700

kampus, yang fokus terhadap dunia usaha,” ungkapnya.

Dia berharap, ke depan, anak-anak muda Indonesia semakin melek digital, terutama dalam hal kewirausahaan. Karena itu, butuh peran pemerintah, khususnya para legislator, untuk dapat membuat regulasi yang berpihak kepada pengusaha muda atau pengusaha baru.

“Kemarin, kami menginisiasi di DPR RI untuk diterbitkan undang-undang kewirausahaan yang dapat melindungi teman-teman muda agar lebih mudah memulai usaha dengan memastikan berbagai aspek yang mendukung keberlanjutan usaha tersebut,” ujar Akbar.

Ada empat aspek penting yang dapat melindungi anak muda dalam memulai usaha. Pertama, aspek perizinan dan legalitas. Kedua, aspek permodalan. Ketiga, aspek pasar. Keempat, aspek kepastian hukum yang dapat membuat anak-anak muda lebih berani dan tertarik memulai usaha.

Akbar melanjutkan, jumlah pengusaha di Indonesia hanya mencapai 3,4% dari total populasi 270 juta jiwa. Di negara-negara maju dan berkembang, jumlah pengusaha mencapai 10% hingga 12% dari populasi. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk membangkitkan gairah anak muda agar bisa berkontribusi dalam pembangunan negara pada konteks perekonomian, sekaligus menjawab tantangan bonus demografi. Bonus demografi menjadi sebuah peluang, bukan sebuah ancaman.”

Pemerintah juga sedang menggalakkan program KUR yang akan disalurkan terutama kepada kaum muda dan wirausaha baru yang belum *bankable*. Artinya, pembiayaan ini tidak hanya berasal dari perbankan, tetapi juga lembaga nonbank yang bisa membantu pemuda untuk memulai dan mengembangkan usaha.

Akbar berharap program-program pemerintah yang baik itu dapat memberikan dampak positif. “Namun, perlu kita ingat bahwa anggaran untuk pemuda sangat terbatas, sehingga pemuda sekarang tidak boleh hanya bergantung pada APBN. Kita harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.”

Dia memberikan contoh, dari 5,7% pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022, sekitar 60% disumbang UMKM. Sebab itu, dia berharap, digitalisasi UMKM, UMKM *go to export*, bisa diisi oleh anak-anak muda yang melek digital yang bisa mengisi peluang-peluang tersebut. Hal itu bisa menjadi sebuah nilai tambah untuk bisa membangkitkan gairah anak-anak muda. “Sehingga anak-anak muda di Indonesia bisa lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang,” tukas Akbar. ■



Potensi aktivasi perempuan untuk berkontribusi dalam dunia kerja di Indonesia diperkirakan bisa meningkatkan PDB Indonesia hingga US\$135 miliar.”

**Fransiska PW Hadiwidjana**  
Cofounder & CTO at Women Works

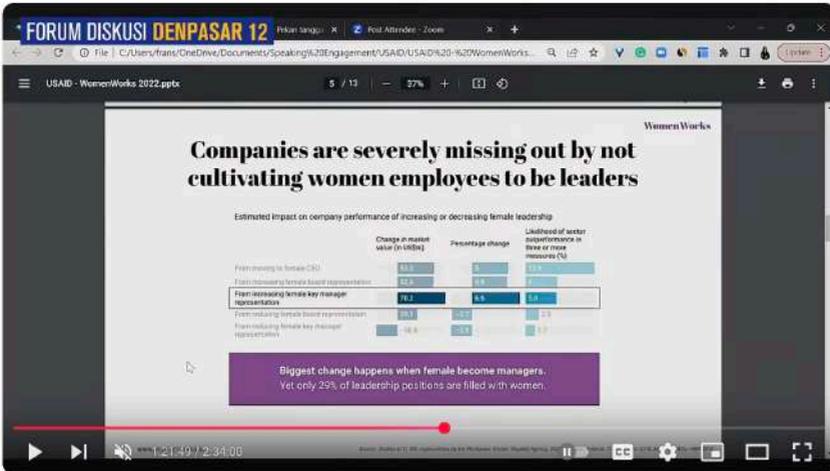
# 6 Perempuan Posisi Strategis

---

---

**M**EMBANTU perempuan untuk aktif bekerja memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jika melihat potensi aktivasi perempuan untuk berkontribusi dalam dunia kerja di Indonesia, misalnya, dengan meniru model yang berhasil di kawasan Asia Tenggara, diperkirakan PDB Indonesia bisa meningkat hingga US\$135 miliar.

Karena itu, menurut Cofounder & CTO at Women Works Fransiska PW Hadiwidjana, Women Works melakukan banyak inisiatif untuk membantu para pemuda di Indonesia. “Dampak signifikan ini terlihat ketika perempuan ditempatkan dalam posisi kunci, seperti manajer. Kami melihat bahwa perubahan paling besar



DOK. FDD 12

Salah satu pemaparan Fransiska PW Hadiwidjana di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Januari 2023, dengan topik Sinergi Strategi Pemberdayaan Pemuda 2023.

terjadi ketika perempuan berada di posisi- posisi tersebut. Saat ini, kenyataannya hanya 29% dari posisi kepemimpinan yang dipegang oleh perempuan. Ini tantangan yang sedang kami coba ubah di Women Works,” tutur Fransiska.

Dia menyebut, peran model sangat penting. Karena itu, selain mendukung, mendengarkan, dan memberdayakan, para mentor juga berfungsi sebagai *role model*. “Kami juga membantu para perempuan muda untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan berharga, yang mungkin tidak mereka dapatkan di tempat lain.”

Sesi mentoring itu, ujar Fransiska, juga disediakan secara pri-

badi, atau grup yang lebih kecil dan intim. Sekilas tentang para mentor pada Women Works, rata-rata memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun dan berpengalaman di lebih dari 20 industri, sebagian besar dengan latar belakang di sektor *startup*.

Saat ini, Fransiska melanjutkan, produk terbaru yang sedang mereka kembangkan ialah platform rekrutmen. “Kami percaya selama ini banyak perusahaan merekrut orang-orang yang mereka percayai dan yang ada dalam jaringan mereka. Kami sedang berusaha mengembangkan sistem yang memungkinkan lebih banyak perempuan muda menduduki posisi-posisi strategis, mulai dari manajer hingga level lebih tinggi.”

Mengakhiri sesinya, Fransiska menuturkan, untuk mencapai tujuan kesetaraan dan posisi-posisi strategis bagi para perempuan, mereka tidak bisa berjalan sendiri. “Kami membutuhkan kerja sama dengan banyak korporat untuk mewujudkannya.” ■



Saya sendiri percaya  
bahwa ketika kita  
mengangkat  
generasi muda,  
percepatan perubahan  
itu akan ada.”

**Billy Mambrasar**  
Staf Khusus Presiden RI

# 7

## Baper

---

---

**M**EMBUKA paparannya, Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar mengatakan, sepanjang 2020-2022, ia terlibat dalam penyusunan rencana-rencana percepatan pembangunan di Papua.

Dia menjelaskan, bersama dengan 132 anak muda Indonesia dari Sabang hingga Merauke, ia membentuk tim bernama Baper (Bawa Perubahan) untuk membangun Indonesia dengan fokus pada peran anak muda sebagai penggerak utama. Harapannya, terjadi akselerasi pembangunan di Indonesia yang dimulai dari Papua dan kemudian menyebar ke seluruh Tanah Air. “Saya sendiri percaya bahwa ketika kita mengangkat generasi-generasi muda, percepatan perubahan itu akan

ada. Tim saya terdiri dari anak muda dari Sabang sampai Merauke dari berbagai suku, agama, dan bermacam latar belakang, bergabung menjadi satu. Kita mulai pergerakan dari yang berbasis anak muda dan pembangunan sumber daya manusia,” ujar Billy.

Dia lalu menceritakan pengalamannya berkeliling 17 provinsi dan bertemu dengan kurang lebih 6.000 anak muda dari berbagai daerah. Para anak muda itu berdiskusi tentang kegelisahan mereka. “Dari diskusi dengan 6.000 anak muda Indonesia di 17 provinsi tersebut, ada beberapa kegelisahan yang mereka munculkan. Kegelisahan pertama ialah rendahnya akses pendidikan,” kata Billy.

Berbicara akses pendidikan, ungkap Billy, tidak banyak anak muda Indonesia yang menjalani pendidikan sarjana bahkan SMA. Paling banyak sampai SMP saja. Sebab itu, keinginan mereka ialah mempercepat pencapaian pendidikan formal untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas.

Kegelisahan kedua ialah kesenjangan dalam akses memperoleh pekerjaan, baik formal maupun nonformal, juga akses untuk berwirausaha. Akses terhadap pelatihan, permodalan, dan pasar menjadi bagian penting dari kebutuhan mereka untuk dapat berwirausaha.

Kegelisahan lainnya ialah rendahnya partisipasi pemuda dalam pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. “Mereka merasa bahwa untuk masuk ke dalam birokrasi atau men-

jadi PNS, seseorang harus memiliki koneksi atau keluarga yang berada di dalamnya. Demikian juga untuk maju sebagai anggota DPR atau DPRD, diperlukan modal besar dan jaringan yang kuat. Akibatnya, mereka merasa tidak didengarkan dan tidak memiliki jalur untuk menyampaikan pandangan atau aspirasi dalam proses pembangunan dan pembuatan kebijakan,” tandas Billy.

Dari diskusi-diskusi dengan para anak muda tersebut, lanjut Billy, lahirlah lima program besar yang dia usung selama menjabat sebagai staf khusus presiden. Berikut kelima program tersebut.

### **1. Pusat Belajar Nonformal**

Membangun sebanyak mungkin pusat belajar nonformal di titik-titik dan daerah-daerah terluar Indonesia yang tidak punya akses pendidikan formal. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat mengakses pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sekolah di sekitar mereka. Pusat belajar nonformal ini memberikan kesempatan untuk belajar.

### **2. Pusat Inovasi dan Kewirausahaan**

Untuk mengatasi lemahnya akses terhadap kewirausahaan, pelatihan bisnis, permodalan, dan pemasaran, mereka mendirikan pusat-pusat inovasi dan kewirausahaan di daerah-daerah terpencil di provinsi-provinsi yang terpinggirkan.

### **3. Petani dan Nelayan Milenial**

Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka mengembangkan program ini karena kedua sektor tersebut adalah sektor penyerap pekerjaan anak muda terbesar di Indonesia. Meskipun jumlah petani muda terus berkurang setiap tahun, sektor ini tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

### **4. Manajemen Talenta Nasional**

Program ini bertujuan mengumpulkan data talenta Indonesia dalam satu sistem yang menghubungkan mereka dengan kesempatan kerja yang tersedia.

### **5. Sistem Aspirasi Data Daerah Indonesia/Sindi**

Untuk menjawab kegelisahan tentang rendahnya partisipasi anak muda dalam politik dan pemerintahan, mereka menciptakan teknologi bernama Sindi. Dengan Sindi, anak muda dapat memberikan masukan kebijakan melalui ponsel mereka, khususnya untuk Bappenas dan lembaga kementerian terkait.

Dengan adanya pusat-pusat belajar nonformal, Billy berharap, anak Indonesia berusia 6-18 tahun dapat mencapai angka partisipasi pendidikan lebih tinggi. Dari sebelumnya angka partisipasi murni 96%, dengan adanya pusat belajar nonformal, maka lebih banyak yang bisa mengakses pendidikan sehingga angka partisipasi murni dapat meningkat hingga 100%. “Dari seluruh

anak Indonesia, hanya 11% yang berpendidikan S-1. Dari jumlah itu, masih ada atau hampir 6% angka pengangguran,” ujar Billy.

Dengan demikian, sebagian besar anak Indonesia, atau sekitar 89% yang tidak berkuliah akan dimasukkan ke dalam pelatihan-pelatihan di pusat inovasi dan kewirausahaan. Mereka akan menerima pelatihan, permodalan, akses pasar, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan. Data mereka kemudian dimasukkan ke sistem manajemen talenta nasional yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. “*Theory of change* kita ini diperkirakan dapat menciptakan 96.800 pekerjaan per tahun, yang berarti dapat meningkatkan partisipasi anak muda Indonesia dalam pembangunan, ekonomi, serta peningkatan keterampilan dan kapasitas mereka,” papar Billy.

Dia melanjutkan, sejak program Baper digulirkan pada 2021-2022, mereka telah mencapai 20.000 anak muda di seluruh Indonesia. Pusat belajar nonformal juga telah didirikan di berbagai daerah terpencil. Selain itu, program petani milenial telah menjangkau hampir 1 juta petani melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. “Untuk daerah-daerah yang sulit mengakses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pasar, kami telah membangun pusat-pusat pelatihan kewirausahaan. Kami percaya ini penting, karena tidak adil jika di Jakarta Selatan banyak sekali pelatihan bisnis, sementara daerah lain kesulitan,” ungkap Billy seraya menambahkan bahwa saat ini mereka telah membangun pusat pelatihan di tujuh provinsi. ■



Anak-anak muda  
berharap pemuda-  
pemudi tidak hanya  
menjadi figuran politik,  
tetapi memang benar  
dilibatkan  
dalam prosesnya.”

**Amira Widya Damayanti**

Gerakan UI Mengajar (GUIM) angkatan ke-12

# 8

## Bukan Figuran Politik

---

---

**M**EMBERIKAN tanggapan atas diskusi kali ini, Amira Widya Damayanti dari Gerakan UI Mengajar (GUIM) angkatan ke-12 mengatakan, apa yang diangkat dalam diskusi memang sangat menarik. “Tadi, Ibu Rerie membuka diskusi dengan menyebutkan berbagai tantangan dan perubahan yang harus dihadapi oleh pemuda, terutama menjelang tahun 2024, yang akan menjadi tahun politik. Tahun ini akan menjadi momen awal bagi kita untuk bersuara dan menentukan pilihan masa depan, karena pemuda yang akan menentukan arah masa depan mereka,” ujar Amira.

Meskipun 2024 mungkin hanya menjadi titik awal, dalam pandangan Amira, sebenarnya ini adalah langkah pertama



DOK. FDD 12

Amira Widya Damayanti ketika berbicara dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 18 Januari 2023, dengan topik Sinergi Strategi Pemberdayaan Pemuda 2023.

bagi pemuda untuk terus bergerak. “Banyak tantangan dan perubahan yang sudah menanti di depan, yang menuntut untuk berkolaborasi lintas bidang dan lintas generasi. Kita harus menghadapi ini dengan bijak, tapi tetap responsif, dan ini bukan beban bagi satu pihak saja,” ungkapnya.

Dia merujuk pada apa yang telah disinggung dalam diskusi bahwa dampak perubahan iklim akan sangat memengaruhi pemuda dan pemudi. Dampak-dampak seperti perubahan iklim menjadikan pemuda sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya. “Oleh karena itu, pemuda harus menjadi subjek yang bergerak untuk mengatasi tantangan ini.”

Pemangku kebijakan memiliki peranan yang sangat penting, seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Ni'am mengenai intervensi yang sudah dilakukan untuk mendorong potensi kepemudaan. Namun, dalam pandangan Amira, pemuda sendiri juga harus turut bergerak. "Sebagai seorang pemuda, saya memilih untuk turut bergerak dalam Gerakan UI Mengajar, dan alhamdulillah gerakan ini sudah mencapai angkatan ke-12. Dalam angkatan ke-12 ini, kami tidak hanya melibatkan mahasiswa yang turun langsung, tetapi juga melakukan banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sponsor, untuk memastikan keberlanjutan Gerakan UI Mengajar," ujarnya.

Bahkan, dia menambahkan, selama pandemi, kami berhasil melaksanakan dua kali intervensi di pelosok dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan begitu, apabila Gerakan UI Mengajar masih bisa berjalan di tengah pandemi, Amira berharap, dukungan dari pemerintah dapat lebih ditingkatkan. "Kita tidak boleh lagi menyalahkan pandemi sebagai faktor penurunan indeks pembangunan pemuda (IPP). Sebaliknya, kita harus membuktikan bahwa pemuda tetap bergerak. Harapannya, kita semua bisa bersama-sama menggerakkan potensi kepemudaan."

Meningkatkan kualitas pemuda secara keseluruhan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Secara statistik, IPP terbaru memang menunjukkan penurunan, dan pandemi menja-

di faktor utamanya. Namun, sebenarnya pandemi tidak menghalangi, tetapi justru mendorong untuk mencari potensi baru di tengah kesulitan.

“IPP memang berbicara soal angka, tetapi realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Saya, yang terlibat dalam Gerakan UI Mengajar, melihat ada anak-anak yang sudah lulus SD masih belum bisa membaca, menulis, atau berhitung (calistung), meskipun kurikulum dan standar pendidikan telah ditetapkan. Anak yang tidak bisa membaca dan menulis ini lulus SD, dan ketika masuk SMP, mereka harus belajar bahasa Inggris, meskipun belum bisa calistung. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana peran guru dan keluarga yang kebersamaannya dalam hal ini?” tanya Amira.

Karena itu, dia melanjutkan, meskipun sering dibicarakan tentang program kewirausahaan, kepemimpinan, dan hal lainnya, di lapangan masih banyak anak muda yang bahkan tidak tahu apa itu abjad. Adapun undang-undang sudah menetapkan usia pemuda dari 16 hingga 30 tahun. “Dengan pemuda yang masih belum optimal ini, karena masih banyak kesenjangan, kami terus menyampaikan ide. Namun, suara kami sering kali tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari pemangku kebijakan. Kami di sini anak-anak muda berharap bahwa anak muda, pemuda-pemudi ini, tidak hanya menjadi figuran politik, tidak hanya menjadi pajangan politik, tetapi memang benar dilibatkan dalam prosesnya,” tegas Amira.

Terlebih lagi, ketika berbicara tentang kebijakan, dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi akan sangat memengaruhi masa depan. Pemuda akan menanggung dampaknya karena pergantian generasi. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu melibatkan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan agar dapat berperan dalam membentuk masa depan yang lebih baik. “Dan ini tidak hanya tentang kebijakan, melainkan juga tadi lapangan kerja dengan partisipasi yang besar dari anak muda, sehingga dapat melihat orientasi ekonomi dari sudut pandang kepemudaan dan masa depan,” sambungnya.

Dia melanjutkan, sebelumnya juga disebutkan bahwa pemuda punya potensi yang besar untuk mengakselerasi perekonomian. Dari pandangannya, niat untuk berwirausaha di kalangan pemuda itu tinggi, tetapi mungkin akses terhadap dukungan, permodalan, pembekalan, dan lain-lainnya belum sepenuhnya terjangkau. “Jadi ke depannya penting untuk memastikan bahwa akses terhadap hal-hal tersebut dapat dijangkau oleh pemuda dan pemudi. Ini tidak hanya di aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya dapat melibatkan anak muda lebih banyak lagi,” harap Amira.

Menutup paparannya, Amira mengatakan, sebagai pemudi dirinya setuju dengan *statement* Ibu Rerie bahwa pemuda dan pemudi memiliki energi yang besar. Karena itu, sangat penting untuk disediakan wadah penyaluran yang tepat. Jika potensi pemuda gagal dimanfaatkan, justru akan menjadi beban negara. ■



“Saya sering melihat bahwa generasi muda terkadang masih tersekat-sekat.”

**Sahat Martin Philip Sinurat**  
Rumah Milenial Indonesia

# 9 Kolaborasi Antargenerasi Muda

---

---

**D**ALAM menanggapi diskusi ini, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, khususnya bagi dia dan rekan-rekannya di Rumah Milenial Indonesia. Di 2023 ini, dengan situasi global yang masih rentan terhadap resesi, penting adanya kolaborasi antargenerasi muda. Dengan begitu, anak muda tidak hanya menjadi penonton dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, tapi juga terlibat aktif dengan kreativitas yang dimiliki.

“Saya sering melihat bahwa generasi muda terkadang masih tersekat-sekat oleh tembok organisasi, komunitas, atau latar belakang yang membatasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kolaborasi. Apa pun gagasan yang dimiliki, seperti program

petani milenial atau yang lainnya, harus melibatkan kerja sama lintas kelompok sehingga semangat untuk berkolaborasi semakin besar,” ungkap Sahat.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa di Pemilu 2024, pemilihan pemula dan generasi muda berusia hingga sekitar 45 tahun diperkirakan mencakup sekitar 50% dari total pemilih. “Tentunya juga jangan hanya menjadi penonton, yang kemudian menggunakan hak pilih tidak benar-benar tepat. Kita bisa menilai siapa pemimpin yang memang memperjuangkan aspirasi dari generasi muda.”

Terkait dengan aspirasi generasi milenial atau generasi muda, Sahat mengatakan, pertama tentunya soal pendidikan. Kemudian, akses pekerjaan, juga kebutuhan untuk bagaimana jaminan kesejahteraan ke depan setelah selesai kuliah. “Hal seperti ini yang menurut saya harus bisa dijawab oleh orang-orang yang kemudian masuk ke dalam sistem untuk bisa melakukan perubahan.”

Rumah Milenial Indonesia, lanjut dia, saat ini ada di sekitar 11 provinsi dan dalam beberapa minggu mendatang akan mengadakan program kepemiluan serta sekolah kebijakan publik. “Kenapa kami mengadakan sekolah kebijakan publik dan kepemiluan? Kita ingin membangun generasi muda yang cerdas. Bagaimana kebijakan publik itu adalah salah satu peran yang harus dilakukan oleh generasi muda sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh institusi pemerintahan dari pusat hingga daerah itu memang menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kebijakan publik itu, jelasnya, adalah kebijakan yang memang menjawab apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat yang tertindas, masyarakat yang termarginalkan, termasuk generasi muda yang saat ini sedang mencari jalan bagaimana menghadapi situasi ekonomi global yang masih berjuang dari pandemi covid-19.

### **Integritas**

Menutup diskusi, Wartawan Senior Saur Hutabarat menyebut pemuda adalah kelompok yang sedang mencari tempatnya di dunia. Oleh sebab itu, pencarian tersebut perlu dibantu dan difasilitasi agar mereka dapat menemukan jalan sesuai dengan pilihan masing-masing.

“Jika para pemuda Republik ini gagal menemukan tempatnya di dunia ini, hasilnya akan berupa pemuda-pemuda yang frustrasi pada tahun 2045,” ujarnya.

Namun, menurut Saur, ada hal penting dalam indeks pemuda yang perlu diperhatikan. Ketika kita berbicara tentang *role model*, panutan, kepemimpinan, dan lapangan kerja, kita juga harus mengedepankan integritas. “Meskipun ada lapangan kerja, posisi di eksekutif, atau bahkan di legislatif, jika kita tidak membentuk integritas sejak dini, pemuda masa depan justru akan mewarisi ‘keteladanan’ yang salah, seperti praktik korupsi,” tandasnya. ■

**PROD. NO.**  
**SCENE**

**TAKE**

**CO.**

# V

**Peran Produksi  
Film dan Konten  
oleh Negara dalam  
Rangka Pembentukan  
Karakter Bangsa  
untuk Mewujudkan  
Ketahanan Negara**



# 1 Latar Belakang: Pendekatan Berbeda

---

---

**S**ELAIN memberikan sumbangsih yang besar dalam perekonomian nasional, industri konten dan film juga berpengaruh besar terhadap pembangunan kebudayaan Indonesia seutuhnya. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, film disebut sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan. Pada Pasal 32 undang-undang itu disebutkan bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya. Tujuannya membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan peran aktif dan pengaruh

Indonesia dalam hubungan internasional.

Peran penting industri konten dan film dalam pembentukan kebudayaan tentu selaras dengan apa yang menjadi visi Indonesia 2019-2024 yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Salah satu dari lima visi tersebut, yakni aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM), menjadi irisan yang sangat strategis dalam pengembangan industri konten dan film di masa yang akan datang. Semangat tersebut juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan begitu, ke depan dapat menjadi sarana mewujudkan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Peran konten dan film dalam pembentukan karakter dan kebudayaan bangsa berhubungan erat dengan perilaku dari setiap generasi manusia. Saat ini terdapat istilah generasi *baby boomers*, generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Tiap-tiap generasi memiliki pendekatan pendidikan karakter yang berbeda. Terkait dengan peran film, Saiful Mujani Research & Consulting merilis hasil survei bahwa kecenderungan untuk menyukai film nasional semakin menguat di kalangan kelompok usia paling muda, yakni 15-22 tahun. Sebanyak 81% dari kelompok usia tersebut menyatakan mereka menonton setidaknya satu film nasional, dan 51% menyaksikan setidaknya tiga film nasional di bioskop selama setahun terakhir. Film nasional ternyata lebih populer daripada film asing di kalangan anak muda. Persentase anak muda yang me-

nonton film nasional (67%) lebih tinggi daripada kaum muda yang menyatakan menonton film asing (55%).

Dengan demikian, film banyak dinikmati generasi Z. Generasi tersebut memiliki motivasi menonton film karena mengikuti tren dan merupakan *social-time* dengan teman. Generasi Z menilai film memberikan kepuasan, menjadi *up to date* dengan menonton film yang sedang tren, dan memberikan pengalaman *social time* yang menarik. Oleh karena itu, jika konten dan film akan digunakan untuk pembentukan kebudayaan, genre yang diusung tentu harus memperhatikan kebutuhan dari generasi Z. Selain itu, pemanfaatan teknologi turut menjadi kebutuhan dasar dalam proses distribusi konten dan film karena generasi Z memiliki kultur yang stabil, realis, dan fokus ke masa depan, juga akrab dengan penggunaan teknologi. ■



Film dapat  
dimanfaatkan untuk  
membangkitkan  
kembali nilai-nilai dan  
kesadaran bahwa kita  
semua adalah bagian  
dari satu bangsa.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Meningkatkan Rasa Kebangsaan

---

---

**U**NDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara spesifik menyebutkan film adalah salah satu objek pemajuan. Bagaimana agar film Indonesia bisa ditempatkan dalam bagian dari cara memajukan kebudayaan bangsa? Pertanyaan ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat ketika membuka diskusi tersebut pada Kamis, 10 Desember 2020, berdasarkan jejak-jejak sejarah perfilman dunia, banyak sekali film dibuat dengan agenda tertentu, agenda khusus, dan agenda perjuangan. Film-film tersebut berhasil mencapai tujuan dan perjuangan serta nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada publik.

Di Indonesia, kata Lestari yang akrab disapa Rerie itu, pada



DOK. FDD 12

Lestari Moerdijat memberikan pengantar dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Kamis, 10 Desember 2020, dengan topik Peran Produksi Film dan Konten oleh Negara dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan Negara.

masa lalu banyak film dibuat secara khusus sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Film-film itu secara khusus dibuat dengan menitikpkan dan memiliki pesan-pesan yang sarat nilai-nilai kebangsaan. Ke depan, tambah Rerie, menjadi tantangan bahwa sesungguhnya film bisa menjadi salah satu upaya untuk mengatasi berbagai hal, khususnya menghadapi tantangan dan ancaman kebangsaan. Dalam sejarah berbangsa, bermacam krisis pernah terjadi. Di antaranya, kata Rerie, ada nilai-nilai khususnya nilai ideologi bangsa yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Melalui film diharapkan bisa menyuarakan pemahaman atas pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk bisa meningkatkan rasa kebangsaan.

Bergesernya fondasi moral kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan ancaman terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Ancaman disintegrasikan serta melemahnya kemandirian bangsa, sesungguhnya bisa diatasi selain melalui kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa, juga menggunakan medium film yang luwes, sangat cair, dan bisa diterima masyarakat. Karakter merupakan ciri, perilaku, identitas, dan keluhuran nilai-nilai budaya sebuah bangsa. Gambaran manusia Indonesia dapat dilihat dengan sangat jelas melalui sebuah film. Selain berperan dalam pembentukan karakter, film dapat menyajikan kemampuan komunikasi secara maksimal, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda saat ini yang begitu lekat dengan teknologi.

Berhadapan dengan perkembangan pemikiran kritis anak-anak saat ini, tambah legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, diperlukan formulasi dan cara baru berkomunikasi. Film menjadi salah satu bahasa anak muda bahkan anak-anak usia sekolah yang masih di bawah umur untuk berkomunikasi. Karena itu, kata Rerie, film dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai dan kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari satu bangsa.

Dalam kondisi pandemi covid-19, insan film tetap memiliki kreativitas. Terbukti, masih banyak film pendek lahir dari tangan anak-anak muda yang kreatif. Kondisi itu memberikan angin segar bahwa sesungguhnya film memiliki kekuatan. Karena itulah, ini saatnya kembali membangkitkan tonggak kejayaan film nasional. ■



Film maupun konten harus menyuguhkan dan menguatkan konsensus seluruh komponen bangsa terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika.*”

**Rima Agristina**

Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP

# 3

## Media Penguatan Konsensus

---

---

**B**ADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan perhatian terhadap film karena dunia film dan juga musik merupakan media yang efektif bagi generasi milenial.

Menurut Deputy Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina, dalam pelaksanaan kegiatan bagi generasi milenial, BPIP selalu mengingatkan bahwa apa pun medium yang digunakan senantiasa dalam kerangka Empat Pilar Kebangsaan yang disosialisasikan MPR. Artinya, apa yang menjadi muatan film maupun konten harus menyuguhkan dan menguatkan konsensus seluruh komponen bangsa terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Tujuan Proklamasi bukan hanya merdeka, tetapi juga bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Diharapkan, me-

lalui film bukan hanya bisa bersatu, tetapi juga tercipta keadilan sosial.

Setiap lembaga pemerintah, kata Rima, senantiasa harus ingat peran dan tugas seperti yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa selain melindungi, juga mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bisa melalui film. Mudah-mudahan melalui film bisa juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Tentu saja muatan dari produk-produk film itu tidak perlu dicantumkan dengan kata-kata yang sama persis seperti isi Pembukaan UUD 1945. Namun, paling tidak ‘rasanya’ itu masuk ke dalam film, nilai-nilainya masuk di dalam organ-organ yang ada.

Presiden Jokowi mengintroduksi revolusi mental dalam melaksanakan Pancasila. Apakah sudah ada yang mengukur dampak revolusi mental? Bagaimana pula dampak dari film? Apakah menjadi berani atau penakut setelah menonton film horor? Menjadi bahagia atautkah sedih dan menangis setelah menonton film cinta? Ada pula pertanyaan, bagaimana mengajak semua pihak mendukung kegiatan generasi muda termasuk mereka yang berada di daerah perbatasan untuk bisa mempunyai akses terhadap film bermuatan Pancasila?

Menurut Rima, salah satunya melalui pengembangan sarana penayangan film yang dikelola pemerintah. Misalnya ada bioskop yang dikelola pemerintah. Memanfaatkan film sebagai media

pembentukan karakter bangsa memang idealistik.

Akan tetapi, apakah regulasi di sini sudah cukup untuk membangun ekosistem perfilman Indonesia? Pertanyaan itu diajukan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2019-2024, Muhammad Farhan. Menurut Farhan, saat ini sebagian masyarakat di Indonesia bahkan seluruh dunia mungkin berpikir tidak perlu pergi ke bioskop lagi untuk menonton film. Industri bioskop seperti akan mati. Jadi perlu ada interaksi yang baik antara masyarakat konsumen dan industri film. Para pembuat film, kata Farhan, dijamin oleh negara dalam kebebasan berkreasi, berinovasi, berkarya, tetapi harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Kondisi dalam negeri sebenarnya kondusif untuk memproduksi film-film lokal. Mengutip survei Saiful Mujani Research and Consulting, Farhan mengatakan sebetulnya anak muda sekarang tidak terlalu menyenangi film asing. Mereka memilih film lokal karena lebih *relate*. Film asing yang paling sukses di dunia, misalnya *Avengers* dan *Star Wars*, tidak *relate* dengan kehidupan anak muda.

Karena itu, Farhan berharap pemerintah merancang pembangunan industri film. Kenapa? Sekarang peluangnya besar karena semua orang butuh media dan konten. Maka, menjadi semakin jelas jika industri media dan konten didesain menjadi klaster dari industri film.

Soal pemasaran film Indonesia, kata Farhan, pihak swasta

bisa mencari festival dan *event convention* internasional untuk menjualnya. Ternyata film Indonesia juga belum dilirik para distributor internasional. Dianggap susah jualnya. Kalau alasannya karena bahasa Indonesia tidak umum, kata Farhan, itu agak aneh, sebab ada yang lebih tidak umum lagi yaitu bahasa Korea dan bahasa Thailand.

Farhan menyarankan agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri memperlakukan film Indonesia sebagai komodita ekspor budaya, bukan hanya simbol. Para Duta Besar Indonesia bisa menggelar nonton bareng film Indonesia. Penontonnya tidak hanya warga negara Indonesia di negara itu, tetapi juga melibatkan distributor atau pekerja film dari negara tersebut.

Menurut Direktur Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hanifah Makarim, film Indonesia sudah cukup bagus sehingga mulai menggeser film asing. Akibat pandemi, digitalisasi menjadi sangat penting sehingga publik bisa menikmati film-film Indonesia di mana saja, tidak harus ke bioskop.

Bagi Kemenparekraf, film merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif. Perfilman Indonesia bisa meningkatkan sektor-sektor lain termasuk pariwisata di daerah tertentu. Sebagai contoh, dulu masyarakat kurang tahu Belitung. Begitu ada film *Laskar Pelangi*, publik berbondong-bondong ke Belitung.

Kemenparekraf mengakui salah satu masalah yang dihadapi

dunia perfilman ialah akses pembiayaan. Bagi PH (*production house*) yang sudah mempunyai biaya cukup, tentu tidak menjadi soal. Namun, jika yang membuat film ialah anak-anak, remaja, kelompok koperasi, dan lain-lain, akses pembiayaannya pasti sangat minim. Ini yang salah satunya perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Hanifah mengakui pihaknya tidak tahu tantangan untuk meyakinkan perbankan bahwa perfilman bisa mendatangkan keuntungan sehingga bisa membuka akses ke perbankan.

Kememparekraf, tambahnya, telah membuat program-program untuk sektor perfilman. Misalnya, bekerja sama dengan Akatara (*startup* film di Indonesia) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) membuat Indonesian Film Financing Forum. Ternyata Indonesia kaya dengan animator yang karyanya bagus, tetapi kebanyakan menjadi tukang. Mereka menggambar, sementara IP (*intellectual property*)-nya bukan di Indonesia. Ini yang menjadi keprihatinan.

Film-film dokumenter Indonesia juga cukup menarik di dunia internasional sehingga Kememparekraf mengundang investor luar membuat film-film dokumenter. Beberapa sudah mendapatkan pembiayaan. Yang ditunggu pelaku film ialah program insentif pemerintah. ■



Fenomena *Korean Wave*  
bukan sesuatu yang  
terjadi *by accident*, tetapi  
sudah direncanakan. Itu  
terkait erat  
dengan reformasi.”

**Purwadi Sutanto**

Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbud

# 4 Belajar dari Korean Wave

---

---

**T**ANTANGAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ialah bahwa ke depan seluruh generasi muda harus disiapkan menjadi manusia unggul, yang memiliki nilai-nilai Pancasila dengan ciri-ciri berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Generasi muda harus mandiri, memiliki kreativitas tinggi yang bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bergantung pada orang lain. Mereka mesti bernalar kritis sehingga bisa menyelesaikan masalah untuk membawa Indonesia menjadi lebih hebat di masa yang akan datang.

Tujuan pendidikan itu secara tegas dikemukakan Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbud, Purwadi Sutanto, dalam di-

DOK. FDD 12

Purwadi Sutanto saat menjelaskan materi yang ia sampaikan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Kamis, 10 Desember 2020, dengan topik Peran Produksi Film dan Konten oleh Negara dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan Negara.

skusi ini. Untuk memiliki kreativitas tinggi, kata Purwadi, berarti anak-anak harus mempunyai inovasi. Peserta didik didorong untuk berkegiatan tinggi. Nilai budaya gotong royong menjadi ciri utama Indonesia. Karena itu, anak-anak harus didorong memiliki nilai gotong royong yang tinggi. Gotong royong merupakan budaya Indonesia dan harus ditanamkan sehingga dimiliki seluruh peserta didik. Selain itu, *Bhinneka Tunggal Ika* juga harus sudah ditanamkan sejak usia dini sehingga pemahaman bukan hanya soal kebinekaan di dalam, tapi juga kebinekaan secara global bahwa *human rights* warga dunia adalah sama.

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, kata Purwadi, ter-

masuk industri perfilman, harus memberikan dukungan sepenuhnya untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan pada anak didik. Melalui sistem Merdeka Belajar, anak-anak dengan inovasi dan kreativitas tinggi akan menghasilkan karya-karya berkualitas sehingga mampu memproduksi film bermuatan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, kebinekaan, kesatuan, tanpa bersifat menggurui atau berkampanye hingga terbentuk karakter anak bangsa.

Bagi Judith J Dipodiputro, Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PFN), *political will* sudah sangat kuat bagi industri film khususnya terkait dengan peran dalam penguatan pembentukan karakter bangsa. Kemauan politik juga dirasakan dari kalangan industri serta berbagai *stakeholder* lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pembentukan PFN menyatakan bahwa perfilman nasional merupakan salah satu sarana penerangan, pendidikan, di samping hiburan yang perlu dikembangkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, menurut Judith, PFN bertugas mendukung pengadaan film yang bermutu dan bernilai pendidikan serta berpijak pada kebudayaan nasional, juga membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah melalui penyelenggaraan usaha produksi film. PFN kini sedang bertransformasi. Judith menyebut PFN tidak lagi memproduksi film sendiri, melainkan dengan dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah dan seluruh *stakeholder* termasuk BUMN.

Korea adalah contoh aktual tentang negara yang sengaja didesain menjadi fenomena yang dikenal sebagai *Korean Wave*, yakni dengan membuat budaya Korea Selatan berkembang dan meluas ke berbagai negara di dunia. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, fenomena *Korean Wave* bukan sesuatu yang terjadi *by accident*, tetapi sudah direncanakan. Itu terkait erat dengan reformasi. Ketika terjadi reformasi di Korea Selatan, kata Umar, semangatnya ialah menjadikan budaya Korea mewarnai budaya dunia. Ada pergeseran dari mentalitas yang tadinya cenderung bertahan agar budaya Korea tidak dipengaruhi budaya asing, menjadi strategi ofensif yakni menjadikan budaya Korea dominan di dunia.

Perubahan seperti itu sangat terasa di berbagai bidang. Pertama di sisi edukasi. Sejak akhir 80-an memang secara sadar, sengaja dan direncanakan pendidikan di berbagai bidang yang menyangkut industri konten kebudayaan, termasuk film, didesain dengan tekanan pada *skill*. Produksi karya kreatif Korea Selatan bukan hanya pendidikan untuk artis dalam arti pemain film atau penyanyi, tetapi tenaga pendukungnya juga dikembangkan. Pendidikan ahli tata cahaya, ahli tata suara, dan ahli tata panggung dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul menghasilkan tenaga yang sangat terampil dari berbagai sekolah seni di ‘Negeri Ginseng’ itu.

Dari sisi sekolah seni, kata Umar lagi, dikembangkan sedemikian rupa sehingga umumnya sekolah itu kini menjadi seni teknologi dan media. Jadi di sekolah seni tidak hanya diajarkan mengenai kesenian, tetapi juga teknologi dan media. Itu revolusi di sektor pendidikan.

Adapun dari sisi regulasi, inti dari regulasi di Korea Selatan dalam bidang industri kreatif ialah liberalisasi. Sebelum reformasi, informasinya tertutup, sedangkan setelah reformasi menjadi betul-betul terbuka. Perusahaan asing boleh masuk. Sistem sensor dihilangkan, digantikan dengan rating yang diadopsi dari Amerika. Rating tidak dilakukan institusi pemerintah, tetapi oleh asosiasi industri. Ada proses liberalisasi dan karya seni film sebagai ekspresi kebudayaan dinilai semata dari konten seni.

Setelah reformasi, para pekerja film dan seniman di Korea Selatan juga menjadi sangat bahagia karena diberi kebebasan yang begitu luas ketimbang sebelum reformasi. Regulasi-regulasi diarahkan untuk mendukung, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun promosi. Untuk perfilman di Indonesia, tambah Umar, harus dilihat pula seluruh aspeknya. Soal regulasi, misalnya, harus bersama-sama dengan pengembangan regulasi di bidang industri penyiaran karena kedua industri itu akan terus-menerus saling mendukung. Tidak bisa regulasi perfilman bertabrakan dengan bidang penyiaran.

Mengenai lembaga sensor film, Umar mengatakan apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan sistem rating dan meninggalkan sensor. Bagi Umar, sensor masih diperlukan di era demokrasi seperti sekarang ini. Seorang pembuat film tentu ingin membuat kreasi sebagus-bagusnya, dengan imajinasi sehebat-hebatnya serta bahasa universal yang bisa dinikmati banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan keinginan *content creator* dengan kepentingan pembangunan karakter bangsa. ■



Negara harus berfungsi memproduksi film-film yang membentuk karakter bangsa karena sudah mempunyai instrumen PFN.”

**Akhlis Suryapati**

Kepala Sinematek Indonesia

# 5 Mengembalikan Fungsi PFN

---

---

**B**ANYAK pihak berharap agar lahir film dan konten yang membentuk karakter bangsa dalam rangka ketahanan budaya. Semestinya film dan konten seperti itu diproduksi oleh negara melalui PFN.

Akhlis Suryapati, Kepala Sinematek Indonesia, melihat masih minimnya peran negara melalui PFN dalam membuat film bermuatan nilai-nilai budaya. Menurut dia, sejak lahir era Reformasi sampai sekarang, PFN hanya memproduksi satu judul film. Di masa Orde Baru, PFN mampu memproduksi sekitar 22 judul film layar lebar. Selama Orde Lama ada sekitar 2-4 film lahir. Di masa revolusi lebih banyak lagi, 23 film lahir dari PFN. Dengan melihat data itu menunjukkan bahwa di masa Reformasi negara tidak ada

peran dalam melahirkan film.

Mengenai regulasi, tambah Akhlis, memang Undang-Undang tentang Film lahir pada 2009. Akan tetapi, peraturan pemerintah (PP)-nya sampai saat ini belum ada. Kalaupun ada, yang didahulukan ialah pendekatan yang sifatnya pengawasan atau sensor.

Jadi, kata Akhlis, negara harus berfungsi memproduksi film-film yang membentuk karakter bangsa karena sudah mempunyai instrumen PFN. Masyarakat Indonesia senang film, tetapi negara kalah dengan masyarakat yang didominasi ekonomi liberal.

Menurut Akhlis, masalahnya ada pada kemauan politik. Mengenai pentingnya film, hari ini film tidak hanya ditonton di bioskop, tetapi juga di *handphone* dan memasuki ruang-ruang keluarga. Artinya kini film mengepung hidup publik, tapi negara tidak mau hadir di situ. Negara hanya mengawasi. Pendekatannya ialah pengawasan, sensor, dan menarik pajak serta pungutan.

Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Rommy Fibri Hardiyanto juga berharap negara menjadi sponsor utama pembuatan film-film bermuatan pembentukan karakter bangsa dan nuansa kearifan lokal serta nasionalisme. Namun, pertanyaan mendasarnya, ke mana film seperti itu dijual? Apakah film seperti itu laku? Apakah bisa kembali modal? Apakah akan menyedot banyak penonton dan masuk *box office*?

Dalam sejarah film Indonesia, film dengan jumlah penonton tertinggi ialah *Warkop DKI Reborn* dengan 6,8 juta penonton, diikuti *Dilan* (6,3 juta), *Laskar Pelangi* (4,7 juta), *Habibie Ainun* (4,5

## PERAN PRODUKSI FILM DAN KONTEN OLEH NEGARA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NEGARA



DOK. FDD 12

Rommy Fibri Hardiyanto saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Kamis, 10 Desember 2020, dengan topik Peran Produksi Film dan Konten oleh Negara dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan Negara.

juta), dan *Pengabdian Setan* (4,2 juta). Itu menunjukkan ternyata film yang paling diminati ialah komedi, horor, lalu percintaan. Dengan fakta itu, bagaimana nilai-nilai budaya masuk dalam industri film?

Dalam konteks kualitas, kata Rommy, jumlah penonton menjadi patokan. Apabila negara hadir, PFN perlu difungsikan seperti dulu lagi. Memang *message* tentang tata nilai, tata budaya, Pancasila, dan nasionalisme bisa dititipkan kepada para produser.

Di lain pihak, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara intens dan fokus pada peran film dan konten tentang pembentukan karakter dalam rangka ketahanan negara. Menurut Is-

mail Nurdin dari IPDN, potensi radikalisme di kampus sangat tinggi. Beberapa survei menunjukkan persentasinya di atas 20%. Itu harus menjadi *warning* bagi semua pihak. Dalam konteks itu, film dan konten media menjadi instrumen strategi struktural. Memang film ibarat pisau bermata dua, di satu sisi sebagai instrumen mentransfer nilai-nilai budaya, di sisi lain menjadi sebaliknya sebagai media yang memprovokasi atau menyebarkan ideologi yang berbeda.

Oleh karena itu, kata Nurdin, pihaknya mendorong agar negara hadir memproduksi film yang mengutamakan kepentingan nasional. Film sebagai pilar utama dalam rangka ketahanan nasional harus dibuat masif. Jadi, perlu ada kebijakan anggaran untuk membuat konten yang mempromosikan kepentingan negara. Dengan demikian akan bisa efektif memanfaatkan film sebagai media untuk penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan. Film-film semacam itu bisa diputar ulang secara periodik.

Mengenai konten lokal, tambah Nurdin, pemerintah daerah harus berperan aktif. Kewenangan kebudayaan sudah didesentralisasikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu didorong untuk mengambil peran menumbuhkan produksi film.

Para duta besar Indonesia pun semestinya bisa menjadi ujung tombak penjualan film Indonesia di mancanegara. Menurut Diennaryati Tjokrosuprihatono, mantan Duta Besar Indonesia untuk Ekuador, pihaknya tidak memutar film Indonesia di KBRI karena jumlah orang Indonesia sedikit, tetapi diputar di kampus dan

## PERAN PRODUKSI FILM DAN KONTEN OLEH NEGARA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NEGARA



DOK. FDD 12

Diennaryati Tjokrosuprihatono saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Kamis, 10 Desember 2020, dengan topik Peran Produksi Film dan Konten oleh Negara dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan Negara.

ditonton banyak orang bekerja sama dengan televisi setempat.

Menurut Diennaryati, industri perfilman Indonesia di luar negeri itu terbuka. Film bermuatan Pancasila, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berbineka global, dan bergotong royong itu bagus sesuai nilai-nilai budaya Indonesia yang perlu dipromosikan ke luar. ■



Negara harus hadir memproduksi film dan konten dengan muatan nilai-nilai kebudayaan, Pancasila, gotong royong, dan kesatuan demi ketahanan bangsa.”

**Agus Mulyadi**

Direktur Programming & Production *Metro TV*

## 6 Menunggu Kehadiran Negara

---

---

**N**EGARA harus hadir memproduksi film-film bermuatan nilai-nilai Pancasila, budaya, serta ketahanan bangsa. Keseriusan itu dilandasi kesadaran bahwa film adalah medium pembentuk karakter dan ketahanan bangsa.

Ada infrastruktur negara yang siap bekerja sama menayangkan film dan konten yang bermuatan nilai-nilai budaya bangsa. Misalnya PT Telkom Indonesia yang merupakan BUMN melalui anak usaha IndiHome TV. IndiHome TV membutuhkan film-film bagus untuk bisa mengisi *channel-channel*.

Menurut FM Venusiana R, Direktur Consumer Service PT. Telkom Indonesia, pihaknya sudah bekerja sama dengan BPN untuk menayangkan serial film *Si Uryil*. Dengan itu diharapkan pelang-

gan Telkom bisa menikmati film di rumah. Telkom juga ingin bekerja sama dan berkolaborasi dengan *in house channel* agar bisa menciptakan konten-konten untuk menaikkan nilai tambah dan juga edukasi Indonesia. Sebetulnya, kata Venusiana, Indi-Home memiliki 7 *channel*. Jadi selain budaya Indonesia, juga bisa mengangkat konten lain.

Desakan agar negara hadir memproduksi film dengan konten budaya bangsa, kata Agus Mulyadi, Direktur Programming & Production *Metro TV*, tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pasar. Saat ini pasar lebih menginginkan film horor, komedi, dan cinta.

Namun, untuk sesuatu tujuan yang lebih idealistik, demi ketahanan negara, kata Agus, maka perlu ada intervensi dari negara. Negara harus hadir memproduksi film dan konten dengan muatan nilai-nilai kebudayaan, Pancasila, gotong royong, kesatuan, dan lain-lain demi ketahanan bangsa.

Industri film dan konten Indonesia siap memproduksi karya-karya bermuatan nilai-nilai budaya dan Pancasila. Lagi-lagi pertanyaannya ialah setelah film atau *game* dibuat, ke mana mesti dijual? Saluran distribusi terbatas. Stasiun-stasiun televisi tentu mencari konten-konten dengan rating tinggi.

Dalam menjawab itu, perwakilan Asosiasi Game Indonesia (AGI) M Gunawan mengatakan salah satu solusinya ialah pemerintah memberikan insentif untuk memproduksi film dan *game* bermuatan Pancasila.

Ketahanan sebuah negara harus dimulai dari ketahanan anak-

anak. Karena itu, film-film yang mengutamakan pendidikan anak harus lebih diangkat, kata Ari Kartika dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, dalam diskusi ini.

Terkait dengan film pendidikan anak-anak, kata Ari, yang perlu dimiliki ialah kanal. Saat ini hampir semua film berasal dari kanal swasta dan asing. Karena itu, yang perlu diperkuat ialah kanal khusus, inklusif untuk film-film Indonesia. Kreativitas anak-anak muda banyak sekali sehingga perlu ditampung dan didorong agar memiliki saluran untuk menampilkan karya-karya mereka bahkan kalau bisa disponsori.

Pendanaan film masih menjadi soal serius di Indonesia. Menurut M. Kisworo, Kepala Divisi Bisnis III PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), kalau ada *demand* yang tepat dari pemerintah, Jamkrindo bisa mengalokasikan beberapa persen untuk pengadaan film. Ketika para pembuat film memerlukan pendanaan dan kekurangan agunan, kata Kisworo, Jamkrindo bisa hadir memberikan jaminan. Bahkan Jamkrindo juga sudah merealisasikan kerja sama dengan PFN. Jika bisa difasilitasi ke depan, *supply* dan *demand*-nya sudah fix, Jamkrindo akan berperan di penjaminan pembiayaan.

Saat menutup diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat mengatakan apa yang disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, perlu menjadi pembelajaran. Bangsa ini harus mengubah orientasi bahwa produk kebudayaan seperti film harus menjadi komoditas ekspor. Artinya yang perta-



DOK. FDD 12

Saur Hutabarat saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Kamis, 10 Desember 2020, dengan topik Peran Produksi Film dan Konten oleh Negara dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa untuk Mewujudkan Ketahanan Negara.

ma harus diubah ialah posisi berpikir tidak lagi bersikap defensif.

Kedua, tambah Saur, untuk mengambil posisi berpikir ofensif, maka salah satunya melalui peran negara. Tapi negara terlalu abstrak, maka perlu didefinisikan. Apabila diambil alih oleh PFN, akan berhadapan dengan aspek strategis lainnya, yakni penonton. Karena itu, menjadi penting sinergi antara PFN dan Telkom yang memerlukan konten.

Menurut Saur, menanamkan karakter bangsa dengan cara terlalu kasar, terlalu keras, mungkin masuk ke wilayah propaganda. Cara itu tidak akan lagi berhasil di zaman sekarang. Karakter bangsa harus dapat diciptakan secara kreatif dengan kehalusan

keaktivitas, bukan dengan kotak saran atau penataran.

Dalam dunia yang diwarnai kebebasan berpendapat, yang di belakangnya berdiri tegak kebebasan berpikir, kata Saur, hampir tidak masuk akal generasi muda dapat dicekoki dengan cara-cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, NKRI, karakter bangsa, ketahanan negara dengan tanpa sublimasi proses kreatif. ■



# VI



**Politik dalam  
Membangun Peradaban:  
Hubungan ASEAN dan  
Tantangan ke Depan**



# 1 Latar Belakang: Menjaga Akar Kebangsaan di Tengah Perubahan Zaman

---

---

**D**ALAM sejarah peradaban manusia, politik telah memainkan peran penting sebagai fondasi terbentuknya tatanan sosial yang harmonis. Politik, sebagaimana dirumuskan dari gagasan awal ‘polis’ di Yunani kuno, hadir sebagai arena komitmen kolektif untuk mengoptimalkan potensi manusia menuju kesejahteraan bersama. Namun, perjalanan politik kebangsaan dalam dunia modern sering kali dihadapkan pada tantangan untuk tetap setia pada nilai-nilai luhur yang dimiliki sebuah bangsa.

Forum Diskusi Denpasar 12 kali ini mengusung topik Politik dalam Membangun Peradaban: Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan. Diskusi ini diharapkan mampu untuk menggali kembali



MI/ADAM DWI

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menerima kunjungan silaturahmi mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, (17/6/2022).

dua diktum kesadaran politik kebangsaan.

Pertama, politik sebagai gagasan polis mengingatkan bahwa politik sejatinya adalah wadah pengabdian dan pengelolaan kemampuan untuk meraih kesejahteraan sosial. Di tengah dinamika hubungan di antara negara-negara ASEAN, gagasan ini menjadi relevan untuk memperkuat kerja sama regional yang berlandaskan pada komitmen kolektif dan kepercayaan antarbangsa.

Kedua, ingatan akan identitas kebangsaan menegaskan pen-

tingnya menjaga semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan nilai-nilai luhur kebangsaan. Di era globalisasi yang sering kali mengikis batas-batas identitas, menjaga akar kebangsaan menjadi langkah strategis untuk tetap kokoh di tengah perubahan zaman.

Diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada 17 Juni 2022 menghadirkan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ia adalah seorang pemimpin visioner yang telah mengarahkan Malaysia melalui berbagai tantangan global. Dengan pengalamannya sebagai Perdana Menteri Malaysia (1981-2003 dan 2018-2020), Mahathir akan berbagi pandangan tentang bagaimana ASEAN dapat memanfaatkan politik kebangsaan sebagai alat membangun peradaban bersama, menjawab tantangan masa depan, dan memperkuat identitas regional di tengah kompleksitas geopolitik dunia.

Melalui forum ini, diharapkan para peserta dapat menggali pemikiran strategis dan kolaboratif untuk membangun ASEAN sebagai komunitas yang inklusif, progresif, dan berakar kuat pada nilai-nilai luhur kebangsaan. ■



Kepemimpinan nasional tercapai ketika seorang pemimpin mampu memahami denyut nadi rakyatnya, mengenali keresahan, harapan, dan impian mereka.”

**Mahathir Mohamad**

Perdana Menteri Malaysia

periode 1981-2003 & 2018-2020

## 2 Pemimpin Harus Berani Amputasi Penyakit Bangsa

---

---

**D**IMINTA untuk berbagi pandangan terkait dengan tema kepemimpinan nasional dan kemajuan negara, Mahathir Mohamad, mengaku ia bukanlah pakarnya. “Saya bukan seorang pakar atau akademisi yang dapat membahas teori-teori ilmu politik yang berkaitan dengan tema diskusi,” katanya merendah.

Mahathir mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan pada Forum Diskusi Denpasar 12 ialah pengalamannya yang terkumpul selama menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pun, pengamatannya terhadap para pemimpin negara lain selama periode ia menjabat. Berikut penjelasannya untuk memantik diskusi.

Bagian pertama yang dibahasnya ialah mengenai kepemimpinan nasional. Dalam sistem demokrasi modern yang dijalankan, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih melalui pemi-

lihan umum siapa calon atau pemimpin yang dianggap layak dan mampu memimpin negara. Namun, terkadang rakyat membuat pilihan yang keliru, dan itu dapat diperbaiki melalui pemilihan umum berikutnya. Yang lebih penting ialah apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin yang telah terpilih untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya kepada rakyat sehingga dapat mencapai status sebagai pemimpin nasional sejati.

Kepemimpinan nasional tercapai ketika seorang pemimpin mampu memahami denyut nadi rakyatnya, mengenali keresahan, harapan, dan impian mereka. Dengan kata lain, untuk mencapai tingkat kepemimpinan nasional, seorang pemimpin harus mampu dekat dengan rakyat, memahami pikiran mereka, dan memiliki empati yang tulus terhadap kondisi mereka.

Sebelum terpilih, seorang pemimpin idealnya menjadi jembatan suara rakyat kepada institusi-institusi negara dan lembaga-lembaga pengambil keputusan agar kepentingan rakyat dapat diperjuangkan. Setelah terpilih, tanggung jawabnya ialah memastikan bahwa perjuangan untuk rakyat yang telah dimulai sebelum memegang jabatan tetap dilanjutkan dengan konsisten demi membela nasib rakyat dan menjamin masa depan mereka.

Keputusan serta kebijakan yang diterapkan harus mencakup mayoritas rakyat tanpa mengabaikan kelompok mana pun dan tanpa mementingkan satu kelompok tertentu saja. Jika hanya berpihak kepada kelompok tertentu, seorang pemimpin akan kehilangan aspirasi sebagai pemimpin nasional dan berubah menjadi



Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat berpidato terkait dengan tema Kepemimpinan Nasional dan Kemajuan Negara dalam Rakernas Partai NasDem di Jakarta, Jumat (17/6/2022).

pendukung elitis.

Oleh karena itu, kepemimpinan nasional membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan tindakan meski keputusan tersebut mungkin sulit dan tidak populer, asalkan keputusan itu demi kepentingan mayoritas rakyat dan negara.

“Sering kali saya ditanya bagaimana saya mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer saat menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya menjelaskan bahwa sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kedokteran, saya memandang suatu isu atau masalah dari sudut pandang seorang dokter,” ungkap Mahathir.

Langkah pertama ialah mendiagnosis atau mempelajari penyakit yang dialami oleh rakyat atau negara. Setelah memahami penyakit tersebut, imbuah Mahathir, langkah berikutnya ialah mencari solusi atau pengobatan untuk menyembuhkannya. Terkadang, penyakit sudah terlalu parah dan menyebar sehingga menjadi ganas dan memerlukan tindakan amputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya. Keputusan seperti itu, meskipun menyakitkan dan memilukan, harus diambil demi kebaikan keseluruhan. Begitu pula dengan tugas seorang pemimpin nasional.

Namun, banyak pemimpin yang tidak memiliki keberanian dan hanya mencari jalan pintas yang populer. Akibatnya, rakyat mungkin terlena sesaat tanpa menyadari bahwa negara sedang rusak. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menanggung dampak buruknya dengan harga yang sangat mahal.

“Salah satu kriteria penting yang sering saya tekankan bagi seorang pemimpin yang ingin memajukan negara ialah terciptanya pemerintahan yang stabil. Sayangnya, stabilitas pemerintahan ini sering disalahartikan sebagai otoritarianisme,” kata Mahathir.

Stabilitas pemerintahan berarti kepemimpinan nasional yang telah terpilih melalui pemilu yang adil dan transparan harus bebas dari gangguan politik partisan. Setelah pemilu usai, kepemimpinan yang terpilih harus diberikan kesempatan untuk fokus pada pembangunan nasional tanpa terganggu oleh isu-isu politik yang tidak relevan.

Hal ini membutuhkan kedewasaan politik, baik dari pihak

yang menang maupun yang kalah. Demokrasi yang dijalankan harus dipahami sebagai penerimaan atas keputusan mayoritas rakyat. Pihak yang kalah dalam pemilu harus menghormati hasil tersebut dan tidak melakukan tindakan politik yang dapat menciptakan ketidakstabilan negara.

Namun, tandas Mahathir, ini bukan berarti pihak oposisi harus diam. Mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai pengkritik yang konstruktif dan pengawas yang efektif. Dalam situasi luar biasa, barulah oposisi dapat menekan pemimpin untuk mundur dari jabatannya, tanpa harus mengguncang seluruh pemerintahan.

Dengan stabilitas semacam itu, pemerintah dapat berfungsi dengan baik dan memusatkan perhatian pada program-program serta kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi rakyat. Pemimpin yang telah dipercaya oleh rakyat harus menjalankan tugas dengan amanah, memprioritaskan kepentingan bangsa, dan berkomitmen penuh untuk membangun negara. Seorang pemimpin harus terus belajar, menambah pengetahuan, dan memperhatikan perkembangan yang terjadi di luar negeri.

Kemajuan sebuah negara dapat dicapai jika pemimpin memiliki ide-ide yang inovatif dan perencanaan yang terstruktur untuk pembangunan. Perencanaan tersebut perlu mencakup pendekatan jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, perlu ditekankan bahwa sebagian besar keberhasilan pembangunan negara bergantung pada peran aparatur sipil negara.

Oleh karena itu, mereka harus diberi ruang yang cukup un-



MII/ADAM DWI

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat berpidato terkait dengan tema Kepemimpinan Nasional dan Kemajuan Negara dalam Rakernas Partai NasDem di Jakarta, Jumat (17/6/2022).

tuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Campur tangan politik perlu dihindari sejauh mungkin. Dengan demikian, institusi-institusi negara dapat diperkuat, dan prinsip pemisahan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan dapat diwujudkan. “Apa yang saya sarankan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Namun, di balik semua saran tersebut, keberhasilannya hanya dapat tercapai jika ada kepemimpinan yang baik--pemimpin yang tidak pernah berhenti memikirkan kesejahteraan rakyat, melampaui kepentingan pribadi dan keluarganya,” tandas Mahathir.

Kita telah menyaksikan bagaimana demokrasi yang lebih

matang sekalipun dapat menyimpang dari aspirasi nasional ketika pemimpin-pemimpinnya bertindak curang. Mereka menjadi dalang untuk melakukan kejahatan perang terhadap negara lain dan mendapatkan dukungan rakyat melalui manipulasi di parlemen. Hal ini terlihat dalam serangan terhadap Irak yang dipelopori oleh para pemimpin Amerika Serikat dan Inggris, dua negara yang sering dijadikan acuan oleh negara-negara berkembang yang ingin membangun fondasi demokrasi.

Para pemimpin semacam itu, yang layak disebut sebagai penjahat perang, adalah contoh nyata bagaimana pemimpin yang curang dan manipulatif dapat menyebabkan demokrasi di negara-negara yang telah maju menjadi keluar dari jalurnya.

Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang ingin mencapai tingkat kepemimpinan nasional harus memiliki jati diri yang kuat dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur. “Syukur alhamdulillah, berdasarkan pengamatan saya dan informasi yang saya terima, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan di atas jalur yang tepat. Tentunya, Partai NasDem dan kepemimpinan Bapak Surya Paloh juga berkontribusi dalam memastikan bahwa kepemimpinan nasional Indonesia terus berbakti kepada rakyatnya, sehingga kemajuan yang lebih baik dapat tercapai,” ujarnya.

Malaysia seharusnya turut berbangga apabila Indonesia mencapai keberhasilan dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Sebab, keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga akan dirasakan oleh seluruh Nusantara. ■



Ketika mencintai negara,  
kita akan berusaha  
melakukan yang terbaik  
untuk memajukannya,  
sehingga negara  
dipandang tinggi  
oleh dunia.”

**Mahathir Mohamad**  
Perdana Menteri Malaysia  
periode 1981-2003 & 2018-2020

# 3 Tanya Jawab Bersama Mahathir

---

---

**Latifah Al Anshori, Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial  
DPP Partai NasDem:**

Saya pernah membaca artikel Tun Mahatir saat berumur 22 tahun di koran yang terbit di Singapura dengan judul ‘Perempuan Melayu Membuat Kebebasan Mereka Sendiri’. Mohon diberikan tips buat kaum perempuan. Saya juga bertanya apa yang akan Bapak katakan kepada diri Bapak sendiri saat Bapak berusia 17 tahun?

**Mahathir:**

Pertama, setiap individu, baik muda maupun tua, perlu memberikan perhatian kepada negaranya. Memiliki semangat kebang-

saan sangatlah penting. Ketika kita mencintai negara kita, kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk memajukannya, sehingga negara kita dapat dipandang tinggi oleh dunia.

Kedua, terkait masa awal saya memasuki dunia politik. Banyak yang mengatakan bahwa saya adalah seorang dokter yang kemudian terjun ke politik. Namun, yang sebenarnya terjadi ialah kebalikannya: saya adalah seorang politikus yang menjadi dokter. Sebagai seorang politikus muda berusia 17 tahun di sekolah, pendapat saya tidak dianggap penting oleh siapa pun. Tetapi, jika saya memiliki gelar pendidikan yang tinggi, lebih banyak orang akan memperhatikan pandangan saya. Karena itu, sejak awal saya tidak memikirkan hal lain selain bagaimana memajukan negara Malaysia agar dihormati oleh dunia.

Saya diberi kesempatan untuk memegang jabatan tertentu, dan saya memanfaatkannya untuk melaksanakan semua hal yang saya yakini dapat memajukan negara dan meraih penghormatan dari seluruh dunia. Dalam masyarakat, jumlah perempuan dan pria dapat dikatakan hampir setara. Jika kita tidak memanfaatkan potensi tenaga kerja perempuan, kita kehilangan separuh dari kekuatan negara kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan sebanyak mungkin kesempatan yang setara antara perempuan dan pria, selama mereka memiliki kemampuan.

Namun, kita tidak boleh memberikan tanggung jawab kepada orang yang tidak mampu, baik itu pria maupun perempuan. Sebaliknya, perempuan yang berkualitas dan terlatih perlu diberi tem-

pat yang sama seperti pria untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara.

**Eksan, DPW Partai NasDem Jawa Timur:**

Tun Mahathir adalah salah satu tokoh internasional yang menginspirasi banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia saat Pilpres 2024 digelar. Pernah ada gagasan yang ingin menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai sebuah kekuatan kawasan, baik dari sisi politik kawasan maupun ekonomi. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti seperti konflik Ukraina dan Rusia maupun perdagangan antara Tiongkok dan Amerika, Malaysia dan Indonesia dengan semangat Tan Malaya yang pernah disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bisa menjadi bagian solusi. Bagaimana pandangan Tun Mahathir?

**Mahathir:**

Kemenangan Pakatan Harapan dalam pemilihan umum ke-14 pada tahun 2018 terjadi, sebagian, karena keberadaan Partai Bersatu. Mungkin peran saya memberikan sedikit kontribusi, tetapi ada banyak faktor lain yang menyebabkan kemenangan tersebut.

Faktor utama karena mayoritas rakyat Malaysia merasa bahwa perdana menteri saat itu tidak layak untuk memimpin. Ia terlibat dalam pencurian uang negara secara terang-terangan, dan hal ini terungkap bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di Amerika Serikat. Kasus tersebut bahkan disebutkan di pengadilan. Meski-

pun namanya tidak disebut secara langsung, semua orang tahu bahwa yang dimaksud ialah Perdana Menteri Malaysia. Peran saya mungkin hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap kemenangan Pakatan Harapan.

Di masa lalu, kita sempat memiliki cita-cita besar, yaitu menyatukan Malaya dengan Indonesia untuk membentuk satu negara yang dihuni oleh orang-orang dengan etnis, bangsa, dan budaya yang sama. Namun, ada pihak yang tidak setuju dengan ide tersebut.

Karena itu, gagasan Perdana Menteri Malaysia waktu itu tidak terwujud, meskipun kita berhasil bergabung dengan dua wilayah bekas koloni Inggris di Kalimantan atau Borneo, yakni Sabah dan Sarawak. Keputusan bergabung ini didasarkan pada hasil referendum yang diadakan di wilayah tersebut. Dengan demikian, Malaysia berkembang dari Semenanjung Tanah Melayu menjadi mencakup Sabah dan Sarawak.

Ada juga periode ketika Singapura menjadi bagian dari Malaysia. Namun, hubungan ini tidak bertahan lama karena perbedaan budaya yang signifikan.

### **Suyoto, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem:**

Apakah pandangan Tun Mahathir terhadap karakter perilaku orang Melayu? Apa saja yang perlu di-*upgrade* supaya bisa jauh lebih adaptif terhadap ekosistem digital yang sekarang ini terjadi?

**Mahathir:**

Saat saya menulis buku *Malay Dilemma atau Perasaan Serba Salah Orang Melayu*, kondisi orang Melayu di Malaysia saat itu sangat tertinggal, baik dari segi ekonomi maupun keterampilan dan pendidikan. Mereka hidup dalam kemiskinan yang parah. Sebagian besar dari mereka tinggal di luar kota dan tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan. Akibatnya, mereka tidak memiliki kekuatan atau pengaruh dalam dunia politik Malaysia.

Ketika kita mencapai kemerdekaan, seharusnya pemerintah fokus pada upaya membangun masyarakat Melayu. Sebab, jika kita melihat situasinya seperti sebuah kompetisi, seseorang yang berada di belakang dan tertinggal hanya dapat menyusul mereka yang di depan jika ia berlari lebih cepat. Karena itu, diperlukan upaya yang memberikan lebih banyak peluang dan dukungan agar orang Melayu dapat mengejar ketertinggalan dari kelompok lain.

Inilah sebabnya kami mengusulkan agar orang Melayu dan kelompok lain yang tinggal di Malaysia memiliki kesempatan dan kesejahteraan yang setara.

**Julie Sutrisno, Ketua DPW Partai NasDem Bali dan Anggota DPR RI:**

Apa saran Tun Mahathir agar Nusa Tenggara Timur bisa mendapat banyak kunjungan dari wisatawan?

Ini memang tidak ada urusan dengan politik, tetapi pariwisata

bisa mendatangkan kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa program Gubernur NTT adalah pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat. Koneksi atau jaringan seperti apa yang bisa dibuka untuk Malaysia dari Nusa Tenggara Timur?

**Mahathir:**

Saya melihat bahwa penduduk Pulau Komodo ini sudah sangat bijak hingga salah satu dari mereka bisa menjadi menteri. Tentunya, seorang menteri akan memberikan perhatian pada pembangunan Pulau Komodo. Pulau Komodo memiliki satu aset unik yang tidak dimiliki oleh tempat lain di dunia. Aset ini adalah daya tarik yang mendatangkan wisatawan ke Pulau Komodo.

Malaysia, pada satu waktu, tidak memiliki apa pun yang dapat menarik wisatawan dari negara lain untuk datang. Kami tidak seperti Mesir yang memiliki piramida, atau seperti banyak negara lain yang memiliki bangunan dan peninggalan bersejarah. Malaysia tidak memiliki hal semacam itu, dan tidak ada alasan jelas mengapa wisatawan akan datang ke Malaysia.

Namun, ketika kami menetapkan satu menteri yang khusus bertugas mengembangkan sektor pariwisata, ia melakukan konsultasi ke sana-sini dan mulai menarik wisatawan. Apa yang dianggap biasa oleh masyarakat Malaysia ternyata merupakan sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Contohnya, orang Arab yang tinggal di gurun pasir sangat jarang melihat hujan. Ketika hujan turun, mereka keluar untuk menikmatinya. Sementara itu,

di Malaysia hujan adalah hal yang biasa.

Demikian pula dengan tanaman di Malaysia yang sangat hijau, jauh lebih hijau jika dibandingkan dengan Eropa, apalagi kalau dibandingkan dengan wilayah Arab. Semua ini menjadi daya tarik. Aset kita adalah lingkungan di sekitar kita. Apa yang kita anggap biasa sebenarnya tidak biasa bagi orang lain. Wisatawan datang untuk melihat air laut yang jernih dan hutan yang hijau. Di negara mereka, saat musim gugur, daun-daun berguguran hingga pohon-pohon tampak gundul. Namun, di Malaysia dan Indonesia, alam selalu hijau sepanjang tahun.

Iklm kita yang berbeda juga menjadi daya tarik tersendiri. Sebenarnya, jika kita cermati, kita memiliki banyak aset yang bagi kita terasa normal, tetapi bagi wisatawan dari negara lain, aset-aset ini luar biasa. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan aset tersebut sebaik-baiknya. ■



**ASEAN memiliki kekuatan besar sebagai kesatuan regional. Meski terdiri dari sepuluh negara, ASEAN mampu bersatu sebagai satu entitas yang solid.”**

**Suryopratomo**

Duta Besar Indonesia untuk Singapura

# 4 Kawasan Strategis yang Menjadi Daya Tawar Dunia

---

---

**M**ENANGGAPI apa yang disampaikan Mahathir Mohamad, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, menegaskan bahwa ASEAN memiliki kekuatan besar sebagai kesatuan regional. Meski terdiri dari sepuluh negara, ASEAN mampu bersatu sebagai satu entitas yang solid.

“ASEAN sebagai satu kesatuan adalah kawasan dengan populasi sekitar 600 juta jiwa dan ekonomi senilai US\$2,5 triliun. Ketika bersatu, daya tawarnya menjadi luar biasa, bahkan dapat bersaing dengan negara-negara besar seperti Jepang, Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa,” ujar Suryopratomo.

Terkait dengan stabilitas dan pertumbuhan ASEAN, Suryopratomo menyoroti stabilitas kawasan ASEAN yang menjadi keunggulan utama. Dalam dua hingga tiga dekade terakhir, ASEAN menjadi salah satu kawasan paling stabil dan aman di dunia, hampir tanpa konflik besar. Hal ini, menurutnya, menjadi modal penting bagi ASEAN untuk terus tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Vietnam dan Kamboja, misalnya, menunjukkan perkembangan pesat. Vietnam, yang hingga 1975 masih dilanda perang, kini mampu mengejar ketertinggalannya dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” tambahnya.

Daya tarik ASEAN juga terletak pada perdagangan intrakawasan yang mencapai US\$214 miliar. Angka itu mencerminkan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya.

Selain itu, ASEAN aktif menjalin kerja sama ekonomi dengan kawasan lain, seperti Uni Eropa, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, yang memperkuat posisi ekonomi kawasan.

Suryopratomo juga menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan ASEAN. “Hampir 39% ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia, bersama Thailand dan Vietnam, telah mulai beralih dari industri berbasis tenaga kerja murah ke industri bernilai tambah tinggi,” tandasnya.

Ia menyebutkan bahwa Indonesia dalam tujuh tahun terakhir mulai fokus mengolah sumber daya alam sendiri untuk

menciptakan nilai tambah. Upaya ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “ASEAN adalah modal yang luar biasa, dan kerja sama di dalam kawasan ini harus terus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya.”

### **Membangun Masa Depan ASEAN**

Suryopratomo juga menegaskan pentingnya ASEAN sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi besar di kancah global. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam perdagangan dan devisa, didorong oleh transformasi ekonomi yang mengarah pada pengembangan industri manufaktur.

“Orientasi pembangunan manufaktur sudah berada di jalur yang tepat. Perekonomian kita bergerak dari berbasis padat karya ke padat industri. Hal ini harus terus dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Meski menunjukkan potensi besar, menurutnya, ASEAN masih menghadapi tantangan besar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Suryopratomo menjelaskan, kesenjangan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN masih cukup tinggi. “Dua universitas di Singapura termasuk dalam tiga besar Asia. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM agar bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang kita miliki.”

Presiden Joko Widodo dalam lima tahun terakhir telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan SDM. Suryoprato-mo menekankan bahwa pembangunan peradaban di ASEAN harus dimulai dari pendidikan yang lebih berkualitas dan merata. Selain SDM, keamanan siber dan ancaman terorisme menjadi isu strategis bagi ASEAN.

Perkembangan teknologi yang pesat, meski membawa dampak positif, juga memiliki potensi destruktif. “Di Singapura, sejak tahun lalu, telah dibentuk Counter Terrorism Information Facilities yang melibatkan sembilan negara untuk memperkuat koordinasi dan menjaga keamanan kawasan. Langkah ini penting untuk memastikan ASEAN tetap aman dan stabil,” imbuhnya.

ASEAN juga perlu mempersiapkan talenta digital yang memadai agar teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Keberagaman sosial budaya di ASEAN, yang terbagi antara budaya Indochina di utara dan budaya

Melayu di selatan, menurut Suryoprato-mo, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kesatuan.

“Pemahaman antarbudaya harus dibangun agar ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara dengan karakter yang berbeda dapat menjadi satu kekuatan bersama,” katanya.

Namun, ASEAN juga menghadapi tantangan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, terutama terkait dengan isu Myanmar. Sistem konsensus yang menjadi ciri khas ASEAN di

satu sisi mendukung persatuan, tetapi di sisi lain memperlambat eksekusi keputusan penting. “Kesulitan dalam mengeksekusi Five-Point Consensus terkait dengan Myanmar menunjukkan perlunya strategi baru untuk memastikan ASEAN tetap relevan dan tangguh menghadapi dinamika global,” tukasnya.

### **Tantangan ASEAN ke Depan**

Dia menggarisbawahi tiga bidang utama yang menjadi tantangan ASEAN ke depan, yaitu ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Dengan kerja sama yang erat dan pengelolaan isu strategis secara efektif, menurut dia, ASEAN dapat terus tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia.

Suryopratomo juga menegaskan pandangannya mengenai peran penting ASEAN dalam membangun peradaban global. Menurutnya, salah satu langkah awal dalam mewujudkan peradaban yang lebih baik ialah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang merata dan berkualitas diyakini dapat mendorong kawasan ASEAN menjadi kekuatan yang semakin diperhitungkan di dunia.

Namun, Suryopratomo juga mengingatkan bahwa ASEAN menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama terkait dengan isu keamanan siber dan terorisme. Ia menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat, jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat berisiko membahayakan kawasan ini.

Teknologi, yang ibarat pisau bermata dua, bisa menjadi ke-

kuatan positif, tetapi juga bisa digunakan untuk tujuan destruktif. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mengatasi ancaman tersebut.

Salah satu langkah positif yang telah diambil ialah pembentukan fasilitas pertukaran informasi terorisme di Singapura, yang telah melibatkan sembilan negara sejak tahun lalu. Inisiatif ini bertujuan memperkuat koordinasi di antara negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman terorisme dan mengelola masalah terkait keamanan siber.

Di samping itu, Suryopratomo juga menekankan kembali pentingnya infrastruktur dan SDM yang memadai, terutama dalam hal talenta digital. Hal itu diperlukan agar teknologi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial di kawasan ASEAN.

Menyinggung tantangan ke depan, Suryopratomo mengungkapkan bahwa ada tiga bidang utama yang perlu diperkuat oleh negara-negara ASEAN. Pertama, dari segi ekonomi, ASEAN perlu saling bersinergi untuk memperkuat daya saing di tingkat global. Kedua, dalam aspek keamanan dan politik, ASEAN harus mampu mengelola isu-isu seperti keamanan siber dan ketegangan di Laut China Selatan dengan lebih baik. Ketiga, dalam bidang sosial budaya, ASEAN harus mampu menjembatani perbedaan budaya antarnegara, mengingat setiap negara di kawasan ini memiliki karakter sosial budaya yang berbeda.

Negara-negara di bagian utara ASEAN, seperti Thailand, cen-

derung memiliki budaya yang lebih dekat dengan Indochina, sementara negara-negara di selatan, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina, lebih mengarah pada budaya Melayu.

Suryopratomo juga menyentuh tantangan kepemimpinan yang dihadapi ASEAN, yang proses pengambilan keputusannya berbasis konsensus. Meskipun hal ini bisa menjadi kelebihan, di sisi lain konsensus juga membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit, terutama dalam menangani isu-isu seperti krisis politik di Myanmar. Meskipun telah ada beberapa pertemuan antarpemimpin ASEAN, pelaksanaan lima pilar konsensus yang telah disepakati masih menemui hambatan sehingga upaya untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar belum dapat dieksekusi dengan efektif.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Suryopratomo berharap ASEAN dapat terus bersinergi dan bekerja sama untuk memastikan kawasan ini tetap menjadi kekuatan yang dihormati di dunia. ■



Saat ini, banyak pemimpin lebih memilih kebijakan populis yang cenderung hanya mencari dukungan tanpa memberikan kecerdasan bagi bangsa.”

**Fachry Ali**  
Pengamat politik

## 5 Kepemimpinan Mahathir dan Pengaruhnya terhadap Budaya Asia Tenggara

---

---

**P**ENGAMAT politik Fachry Ali menilai bahwa apa yang disampaikan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bukanlah hal yang baru. Meskipun demikian, ia menyebut bahwa kehebatan Mahathir terletak pada kemampuannya untuk memengaruhi tidak hanya Malaysia, tetapi juga persepsi dunia terhadapnya dan negaranya.

Fachry menekankan bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah sekadar ucapan-ucapan Mahathir yang sering kali biasa saja, melainkan aksi-aksi kepemimpinannya. “Ketika Mahathir pertama kali menjabat perdana menteri pada awal 1980-an, dia menarik perhatian dunia secara tidak proporsional,” ujar Fachry.

Ia menjelaskan bahwa perhatian yang diberikan lebih besar

daripada yang seharusnya, terutama ketika Mahathir melontarkan semboyan ‘*Look East*’ atau ‘Tengok ke Timur’, yang mengajak negara-negara Asia untuk mencontoh model pembangunan dari Timur, bukan dari Barat.

Menurut Fachry, semboyan *Look East* bukan hanya sebuah strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan sikap politik dan budaya yang menunjukkan ketegasan Mahathir serta Malaysia dalam membedakan diri dari kekuatan-kekuatan politik dan budaya Barat. “Mahathir dengan tegas menyatakan diri sebagai bagian integral dari Timur, bukan sebagai pengikut kekuatan politik dan budaya Barat,” tegasnya.

Fachry juga mencatat bahwa pada masa itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan kedua pemimpin tersebut, Soeharto dan Mahathir, adalah tokoh utama yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Menurutnya, berdirinya ASEAN tidak lepas dari peran dua pemimpin besar itu. Namun, Fachry menekankan bahwa dalam konteks politik budaya, Mahathir sangat tegas dalam menentukan sikap politik budayanya. “Apa yang dimaksud dengan semboyan *Look East* bukan hanya soal mencari model pembangunan ekonomi, tetapi lebih pada penegasan identitas budaya dan politik yang berlandaskan nilai-nilai Timur, bukan Barat,” ujarnya.

Fachry menilai bahwa sikap politik Mahathir ini mencerminkan dorongan budaya dan politik yang kuat, yang memengaruhi perkembangan Asia Tenggara dan hubungan antarnegara di kawasan tersebut.



DOK. FDD 12

Fachry Ali (kanan) bersama moderator Luthfi Assyaukanie dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Jumat, 17 Juni 2022, dengan topik Politik Dalam Membangun Peradaban: Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan.

### **Strategi Look East**

Fachry berpendapat, melalui semboyan *Look East*, Mahathir ingin menekankan bahwa pembangunan ekonomi, politik, serta sosial budaya tidak harus selalu mengadopsi model dari Barat.

Menurut Mahathir, ada alternatif yang bisa diambil, yang memberikan kontribusi signifikan bagi negara dan kawasan, khususnya Asia Tenggara. “Ini yang membuat kehadiran Mahathir menjadi sangat penting, karena dia mampu membangun alternatif pandangan yang memengaruhi banyak orang,” ungkap Fachry.

Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan Mahathir ialah soal kapitalisme pribumi. Mahathir mencatat bahwa dasar

dari kapitalisme Melayu dibangun dengan mengacu pada kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*) yang diterapkan di Malaysia setelah konflik etnis 1969. Melalui kebijakan itu, Mahathir berhasil menciptakan kapitalisme Melayu secara sistematis, yang hingga kini mampu bertahan meskipun kapitalisme etnis Tiong-hoa masih mendominasi di Malaysia.

Menurut Fachry, Mahathir juga dikenal karena perannya dalam memperkuat kapitalisme Melayu melalui perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN. “Mahathir tidak hanya mendistribusikan kekayaan kepada sektor swasta, tetapi juga memperbesar peran BUMN dalam ekonomi negara,” jelasnya.

Salah satu contoh keberhasilan Mahathir ialah perusahaan minyak negara Malaysia, yang berhasil bersaing dengan perusahaan multinasional di pasar global, termasuk Afrika.

Pada 2018, Mahathir kembali terjun ke dunia politik setelah lebih dari satu dekade absen. Pada masa ini, ia bekerja sama dengan Anwar Ibrahim untuk mereformasi politik Malaysia. Namun, kolaborasi tersebut tidak berakhir dengan baik.

Meskipun kolaborasi mereka mengecewakan sebagian kalangan, kata Fachry, ini menandai akhir dari masa pemerintahan Mahathir yang hanya bertahan dua tahun. Sebagai pengamat politik, Fachry melihat Mahathir adalah salah satu tokoh besar politik di Asia Tenggara yang perlu dipelajari lebih dalam. Kepemimpinan Mahathir menonjol karena keberaniannya mengambil keputusan yang tidak selalu populer, tetapi sangat berdampak pada negara

dan kawasan.

“Saat ini, banyak pemimpin yang lebih memilih kebijakan populis yang cenderung hanya mencari dukungan tanpa memberikan kecerdasan bagi bangsa,” kata Fachry lagi.

Di era abad ke-21, menurutnya, kemunculan tokoh karismatik sekelas Soekarno, Mahathir, Lee Kuan Yew, atau Soeharto kian sulit ditemukan. Proses demokratisasi, perkembangan pengetahuan masyarakat, dan perubahan mentalitas masyarakat menjadi beberapa faktor yang menyebabkan mitos tentang pemimpin karismatik mulai terkikis.

Fachry menyimpulkan, Mahathir tetap menjadi salah satu pemimpin yang patut dicontoh dalam hal kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan dan kemajuan jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. ■



Melalui demokrasi  
yang teruji kita bisa  
mendapatkan pemimpin  
nasional yang hebat.”

**Muhammad Farhan**

Anggota DPR RI  
dari Fraksi Partai NasDem  
Periode 2019-2024

## 6 Rekatkan Kembali Rajutan Kebangsaan yang Sempat Terpecah

---

---

**A**NGGOTA Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, mencoba mengaitkan topik diskusi ini, yakni Politik dalam Membangun Peradaban: Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan, dengan apa yang selama ini diwacanakan dan diperjuangkan Partai NasDem.

Farhan melihat Rakernas Partai NasDem yang mengangkat tema tentang politik kebangsaan memiliki kesesuaian dengan topik yang diusung Forum Diskusi Denpasar 12 dan juga apa yang disampaikan Mahathir Mohamad.

“Ini adalah sebuah politik yang ingin kita angkat agar bisa semakin merekatkan kembali jalinan rajutan kebangsaan yang sempat terpecah karena perubahan politik yang begitu tajam pada



DOK. FDD 12

Muhammad Farhan saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Jumat, 17 Juni 2022, dengan topik Politik dalam Membangun Peradaban: Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan.

2014, Pilkada 2017, dan bahkan tercabik-cabik lagi pada 2019,” kata Farhan menanggapi para pembicara.

Ia menambahkan, upaya para pemimpin bangsa untuk menyatukan kembali fakta-fakta tersebut dengan memasukkan Prabowo Subianto ke dalam koalisi besar oleh Presiden Jokowi, ternyata belum cukup menyembuhkan luka-luka yang pernah muncul.

Menurut Farhan, sebagai sebuah partai yang mengusung politik kebangsaan, NasDem ingin memperlihatkan kepada bangsa Indonesia bahwa partai pimpinan Surya Paloh ini sangat terbuka kepada satu hal, yakni kepemimpinan yang kuat. Farhan

pun memberikan apresiasi tinggi terhadap sosok Mahathir yang menurutnya memiliki konsep kepemimpinan luar biasa.

Farhan menyatakan bahwa salah satu kalimat Mahathir yang sangat mengena ialah tentang pemimpin nasional harus sudah selesai dengan dirinya sendiri dan hanya memikirkan nasib rakyat. “Kalimat tersebut memang terdengar klise, tapi seperti semua klise, ada nilai kebenaran yang sangat tinggi di dalamnya,” ujar Farhan.

Ia mengakui, meskipun sulit, Mahathir telah membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat.

Farhan, yang juga merupakan kader Partai NasDem, mengungkapkan bahwa dalam perjalanannya sebagai pemimpin, ia berkomitmen untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Namun, ia menyadari bahwa pembuktian dirinya baru dimulai sejak lima tahun lalu dan masih dalam proses pembelajaran sebagai seorang pemimpin.

Farhan juga mengungkapkan kekagumannya terhadap metode kepemimpinan Mahathir. Menurutnya, Mahathir yang berlatar belakang pendidikan kedokteran selalu memulai dengan mendiagnosis masalah sebelum mencari solusi yang tepat. “Beliau mengatakan bahwa jika solusi yang diberikan ternyata tidak efektif, bahkan harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar, maka itu harus dilakukan, meskipun keputusan tersebut tidak populer.”

Ia mengakui bahwa Mahathir pernah tampil sebagai sosok

yang tidak populer, bahkan sempat dipojokkan oleh media-media Barat karena tindakannya yang dianggap tidak demokratis, seperti ketika Mahathir meminggirkan Anwar Ibrahim. Namun, Farhan juga menilai bahwa Mahathir telah menunjukkan kemampuan untuk mengoreksi kesalahan tersebut dengan kembali memimpin Malaysia pada 2018 dan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya.

Dalam konteks demokrasi, Farhan menekankan pentingnya untuk selalu menguji demokrasi dan memastikan bahwa demokrasi dapat melahirkan pemimpin yang hebat, seperti yang dicontohkan oleh Mahathir. “Demokrasi harus diuji, karena hanya melalui demokrasi yang teruji kita bisa mendapatkan pemimpin nasional yang hebat,” tegasnya.

Farhan juga menyoroti pandangan Mahathir terhadap hubungan internasional. Mahathir menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Inggris, yang dikenal sebagai pemimpin demokratisasi dunia, telah melakukan intervensi dan tipu daya pada periode 2001 hingga 2003. Menurut Mahathir, hal itu menunjukkan bahwa salah satu musuh terbesar dari demokrasi dan kemanusiaan ialah perang yang tujuannya memaksakan kehendak.

“Apa pun yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, itu menunjukkan bahwa perang yang bertujuan memaksakan kehendak adalah salah. Kita harus jelas dan tegas dalam sikap kita. Kita tidak perlu memilih pro Barat atau pro Timur, yang penting kita harus pro kemanusiaan,” ujar Farhan.



W/BRYANBODO HENDRO

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat hadir di Panglima Itam Library, NasDem Tower, Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Farhan berharap, melalui prinsip-prinsip kepemimpinan Mahathir, Partai NasDem dapat menghasilkan pemimpin yang dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya dan berkomitmen pada kemanusiaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ■



Pemimpin yang baik  
harus mampu  
melihat tendensi global  
dan berani berbicara  
untuk perubahan  
yang lebih baik.”

**Connie Rahakundini Bakrie**  
Pakar pertahanan dan keamanan

## 7 Dicari, Pemimpin yang Cerminkan Keberanian dan Kebenaran

---

---

**P**AKAR pertahanan dan keamanan, Connie Rahakundini Bakrie, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya memiliki pemimpin yang percaya kepada dirinya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Mahathir.

Menurut Connie, menjadi pemimpin yang berani mengambil sikap tegas dan menyuarakan kebenaran tidaklah mudah, apalagi mengkritik pandangan internasional yang tidak sesuai. “Menjadi pemimpin seperti Mahathir itu tidak mudah. Bahkan untuk berani melabrak, menegur, atau meluruskan pandangan dunia internasional yang tidak tepat saja sangat sulit dilakukan.”

Connie juga menyoroti beberapa pemikiran geopolitik yang disampaikan oleh Mahathir, yang menurutnya sangat penting

dan relevan. “Mahathir sering dianggap sebagai ‘Soekarno kecil’ karena gagasan-gagasannya yang mengangkat nilai kemanusiaan dan internasionalisme, yang merupakan prinsip utama dalam perjuangan Soekarno,” kata Connie.

Ia berharap, pandangan Mahathir dapat mengingatkan bangsa Indonesia untuk kembali kepada nilai-nilai tersebut, yang menjadi dasar bagi sebuah politik luar negeri yang berlandaskan pada kepentingan negara dan kebenaran.

Lebih lanjut Connie menekankan bahwa seorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri harus berani berbicara dengan tegas demi kepentingan negara dan kebenaran. “Pemimpin yang baik harus mampu melihat tendensi global dan berani berbicara untuk perubahan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia juga berharap bahwa pernyataan Mahathir dapat mengingatkan negara-negara anggota ASEAN untuk kembali menguatkan politik kawasan yang merdeka dan berdaulat. “Kita harus mengembalikan politik kawasan Asia Tenggara, terutama ASEAN, kepada identitasnya yang asli, yaitu sebagai kawasan yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan luar,” tambahnya.

Menurut Connie, ASEAN harus mampu menjaga eksklusivitas kawasan, sambil tetap bergerak menuju inklusivitas dalam kerangka ekonomi, politik, dan sosial. “Setiap simpul eksklusivitas harus mampu menuju inklusivitas dalam konteks kerja sama kawasan yang lebih solid,” ujarnya.

Akhirnya, Connie menegaskan bahwa perdamaian dunia ha-



Connie Rahakundini Bakrie saat berbicara di Forum Diskusi Denpasar 12 pada Jumat, 17 Juni 2022, dengan topik Politik dalam Membangun Peradaban: Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan.

nya dapat terwujud jika kawasan-kawasan di dunia terbebas dari kolonialisme dan intervensi luar. “Dunia akan damai ketika setiap kawasan bebas dari kolonialisme, dan itu harus menjadi tujuan kita bersama.”

Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Connie berharap bahwa ASEAN dan dunia pada umumnya dapat bergerak menuju masa depan yang lebih damai, adil, dan berdaulat.

### **Siap Menerima Kekalahan**

Menutup diskusi, Wartawan Senior Saur Hutabarat mengungkapkan pandangannya mengenai pernyataan yang disampaikan



MI/ADAM DWI

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan jajaran pengurus DPP Partai NasDem se usai menyampaikan pidato dalam Rakernas Partai NasDem di Jakarta, Jumat (17/6/2022).

oleh Mahathir.

Menurut Saur, ada satu kata yang menarik dalam pernyataan Mahathir, yakni kata ‘tewas’. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut berarti ‘kalah’, yang mengingatkan kita untuk menerima ketewasan dalam pemilihan umum.

“Saya kira, Mahathir menyampaikan hal yang sangat penting, yaitu tentang ketewasan dalam pemilu. Bagi mereka yang kalah, mereka harus bisa menerima kenyataan tersebut,” ujarnya.

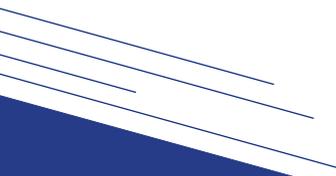
Saur juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk terus memelihara empatinya kepada rakyat, yang sering kali tidak disampaikan secara langsung dalam forum publik, tetapi lebih sering diungkapkan dalam pertemuan terbatas.

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Mahathir menyatakan bahwa dia merasa banyak belajar tentang demokrasi Indonesia yang stabil. Menurut Mahathir, Indonesia yang memiliki 275 juta penduduk, 17 ribu pulau, dan beragam suku bangsa merupakan tempat yang sangat menarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang demokrasi yang berkembang. “Saya pikir kehadiran Mahathir dalam Rakernas Partai NasDem menunjukkan betapa hebatnya acara tersebut, terutama dalam konteks pencalonan bakal calon presiden yang diusulkan. Mahathir berbicara tentang kepemimpinan nasional yang sangat penting,” ungkap Saur.

Saur juga memberikan pujian khusus kepada Mahathir, yang meskipun sudah lanjut usia, masih tetap tajam dalam memberikan wawasan tentang kepemimpinan. “Mahathir ini seperti ‘nanas tua’, semakin tua semakin bernas,” tambahnya, merujuk pada ketajaman pemikiran dan pengalaman Mahathir yang semakin terasah seiring bertambahnya usia.

Dengan kehadiran Mahathir di acara tersebut, Saur berharap dapat memberikan inspirasi dan perspektif baru tentang kepemimpinan dan demokrasi, baik di Indonesia maupun kawasan internasional. ■





# Catatan Moderator

## Keragaman, Toleransi, dan Entropi Budaya

---

---

Oleh: **Luthfi Assyaukanie**

**T**AHUKAH Anda kota apa yang paling toleran di Indonesia? Bukan Jakarta, bukan Yogyakarta, bukan pula Surabaya, melainkan Singkawang. Iya, kota kecil di Kalimantan Barat ini selalu menempati urutan teratas dalam indeks kota toleran (IKT) yang dikeluarkan oleh Setara, lembaga penelitian dan advokasi isu-isu kebebasan. Dalam edisi terbaru yang dirilis Setara tahun lalu (2024), Singkawang masih menempati urutan teratas kota-kota paling toleran di Indonesia.

Yang menarik dari temuan Setara ialah ada kaitan erat antara keragaman warga dan tingkat toleransinya. Kota dengan penduduk yang beragam cenderung lebih toleran daripada kota-kota yang homogen. Selain Singkawang, kota lain yang masuk 10 besar ialah Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta.

Selain keragaman, ada tiga faktor lain yang membuat masyarakat toleran atau intoleran. Pertama, aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Kedua, tindakan aparaturnya atau pengelola pemerintahan di daerah. Dan, ketiga, perilaku warga, baik dalam berhubungan dengan sesama mereka, atau antara mereka dan pemerintah setempat.

Agama memainkan peran penting. Kota-kota yang menempati urutan terbawah (intoleran) umumnya ialah kota-kota yang jumlah nonmuslimnya kecil, seperti Sabang, Bandar Lampung, Palembang, Pekanbaru, Mataram, Lhokseumawe, Padang, Banda Aceh, Cilegon, dan Depok. Sebaliknya, kota-kota teratas (toleran) umumnya ialah kota-kota dengan jumlah nonmuslim cukup besar, seperti Kupang (90%), Manado (70%), Singkawang (42%), Salatiga (35%), dan Semarang (25%).

Kendati demikian, ada beberapa kota yang jumlah nonmuslimnya tidak terlalu besar, tetapi tingkat toleransinya cukup tinggi. Misalnya, Kota Bekasi, Magelang, Kediri, dan Surakarta. Jumlah nonmuslim di kota-kota tersebut kurang dari 20%. Bekasi adalah yang paling fenomenal, karena sebelumnya pernah menjadi salah satu kota paling intoleran di Indonesia.

Pada 2015, ketika Setara pertama kali melakukan penelitian, Bekasi menempati urutan kedua dari bawah (93 dari 94). Kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama cukup sering terjadi ketika itu. Namun, sejak 2017, perlahan-lahan, kota ini berubah.

Apa yang terjadi? Salah satu faktor pentingnya ialah perubahan kepemimpinan. Pada Pilkada 2017, Bekasi memiliki pemimpin baru, yang cukup tegas dalam hal kebebasan beragama. Kasus-kasus kekerasan dan intoleransi yang sebelumnya dibiarkan ditangani dengan serius. Aparat juga memberi respons cepat setiap ada kasus yang terkait dengan diskriminasi dan intoleransi.

Tak hanya itu. Masyarakat sipil, khususnya yang bergerak di bidang kerukunan beragama, juga aktif mengambil bagian. Sementara mencatat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi memiliki banyak sekali kegiatan. Mereka menghidupkan forum-forum serupa di kalangan anak muda, perempuan, dan majelis taklim. Intinya, perubahan di Bekasi dimulai dari pemimpin dan para pembantunya. Jika pemimpin bergerak dan serius, sebuah daerah yang semula intoleran bisa berubah menjadi toleran.

### **Mengelola Entropi**

Merawat toleransi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kerukunan antarwarga, tapi juga demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di tingkat nasional. Toleransi terkait dengan *trust* (kepercayaan), sebuah nilai yang sangat penting dalam demokrasi. Seperti kata Francis Fukuyama (1995), demokrasi tidak akan berjalan di tengah masyarakat yang saling mencurigai dan selalu berprasangka buruk terhadap sesama.

Tidak hanya jelek bagi demokrasi, intoleransi juga buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Warga yang punya prasangka negatif kepada orang lain akan kesulitan bertransaksi dan melakukan bisnis. Menarik untuk dicatat di sini bahwa kota-kota yang intoleran, seperti tiga kota di Aceh yang disebut di atas, umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang lebih toleran.

Intoleransi adalah bagian dari entropi budaya yang harus diatasi. Jika tidak, energi suatu negara akan terbuang percuma untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak produktif. Entropi adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam dunia fisika untuk menjelaskan adanya energi yang terbuang akibat kerusakan atau kekacauan pada suatu sistem (mesin). Istilah itu kemudian diadopsi untuk melihat tingkat keharmonisan dalam suatu masyarakat.

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki tingkat entropi cukup tinggi (42%). Artinya, tingkat keselarasan antara energi yang digunakan dan hasil yang didapatkan tidak berimbang. Masih banyak energi yang terbuang percuma, baik dalam bentuk konflik di tengah masyarakat maupun kecurangan-kecurangan (korupsi) yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Tingkat entropi di negara-negara dengan demokrasi sudah terkonsolidasi umumnya rendah. Hal itu karena nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan dan kepercayaan (*trust*), bisa berjalan dengan baik. Masyarakat yang secara ekonomi sejahtera juga memiliki tingkat entropi yang rendah, meski tidak ada demokrasi di dalamnya. Negara-negara sejahtera seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, misalnya, memiliki tingkat entropi yang cukup rendah, yakni masing-masing 15% dan 12%.

Tingginya tingkat entropi Indonesia menjadi pembahasan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12). Para pembicara menekankan pentingnya pemerintah mengatasi masalah ini, khu-

susnya yang terjadi di birokrasi. Entropi yang tinggi artinya ada masalah serius dalam pengelolaan negara. Energi yang kita keluarkan lebih besar daripada hasil yang kita dapatkan.

Alissa Wahid, salah satu pembicara dalam forum itu, menjelaskan adanya kesenjangan antara nilai yang dibayangkan dan nilai yang diterapkan oleh masyarakat. Akibatnya, menurut salah satu ketua PBNU itu, banyak energi yang terbuang percuma. Setiap hari kita membayangkan nilai-nilai agung, seperti demokrasi, kesejahteraan, dan kejujuran. Akan tetapi, di saat yang sama, praktik-praktik korupsi, diskriminasi, dan kecurangan terus terjadi di depan mata kita.

Sejak lima tahun terakhir, masalah intoleransi relatif bisa diatasi. Politisasi dan kekerasan atas nama agama relatif berkurang jika dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun silam. Secara umum, masyarakat hidup lebih damai. Yang masih menjadi persoalan ialah pengelolaan negara. Korupsi, inkompetensi, dan pemborosan masih terus terjadi.

Entropi bisa datang dari masyarakat berupa konflik dan gesekan sosial. Bisa juga dari pemerintah, berupa korupsi dan inkompetensi. Setelah kita semua berjuang mengatasi kasus-kasus intoleransi di tangan masyarakat, saatnya kita menghilangkan entropi di birokrasi dan pusat pemerintahan. ■



## Memahami Kebutuhan dan Tantangan Pemuda

---

---

Oleh: **Luthfi Assyaukanie**

**P**EMBERDAYAAN pemuda menjadi kunci strategis dalam mendorong kemajuan bangsa, terutama di era yang penuh dengan dinamika perubahan global. Narasumber menekankan bahwa sinergi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan potensi generasi muda. Pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kepemimpinan, serta peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level.

Salah satu aspek penting yang disoroti ialah perlunya memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemuda saat ini. Isu-isu seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, kesenjangan peluang kerja, dan rendahnya partisipasi politik menjadi tantangan utama. Narasumber menegaskan bahwa strategi pemberdayaan harus responsif terhadap konteks lokal dan global sehingga mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh pemuda. Program-program yang dirancang pun harus inklusif, memastikan bahwa semua kelompok pemuda, termasuk yang

berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses, mendapatkan kesempatan yang sama.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital juga menjadi fokus utama dalam pemberdayaan pemuda. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga inovator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi atas berbagai permasalahan sosial. Literasi digital, kewirausahaan berbasis teknologi, dan penguatan kapasitas dalam mengelola informasi menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Narasumber menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pemuda mengembangkan potensi mereka di era digital.

Selain itu, pengalaman dari berbagai inisiatif pemberdayaan pemuda menunjukkan bahwa program yang berhasil umumnya memiliki pendekatan partisipatif. Keterlibatan pemuda dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan memberikan rasa memiliki yang lebih kuat serta meningkatkan efektivitas program tersebut. Narasumber menekankan bahwa pemberdayaan yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip dialog, kemitraan, dan penghargaan terhadap ide-ide kreatif yang muncul dari kalangan muda.

Sebagai rekomendasi, narasumber menegaskan pentingnya merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi pemuda dan mendorong kolaborasi lintas sektor demi mendukung pemberdayaan yang berkelanjutan. Program-program

pemberdayaan harus bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta memberikan ruang bagi pemuda untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.







# **Biodata Tim Ahli**



**Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.** lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.** lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



**Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.** lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



**Arimbi Heroeopetri** lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Luthfi Assyaukanie, Ph.D.** adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



**Sadyo Kristiarto, S.P.** lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Anggiasari Puji Aryatie, S.S.** merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.** memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.** lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■



MEDIA  
INDONESIA  
PUBLISHING

